



Vol. 5 No. 2 Desember 2021

P-ISSN: 2579-7050

E-ISSN: 2615-4668

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>Pengantar Redaksi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pola Harmoni Sosial Masyarakat Mataraman Di Kota Kediri</b>	
<i>Taufik Alamin.....</i>	<i>99-115</i>
<b>Persepsi Masyarakat Tentang Kiprah Kiai dalam Kancah Politik</b>	
<i>Heri Fadli Wahyudi.....</i>	<i>117-123</i>
<b>Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan</b>	
<i>Nihayatus Sholichah, Charity Oktoliya.....</i>	<i>125-145</i>
<b>Pergeseran Mata Pencaharian Pada Generasi Muda Petani Di Desa Selopanggung Kabupaten Kediri</b>	
<i>Trimurti Ningtyas .....</i>	<i>147-156</i>
<b>Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Desa Kalipucang Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan</b>	
<i>M. Daimul Abror .....</i>	<i>157-169</i>
<b>Gerakan Sosial Kewirausahaan Berbasis Komunitas Desa Oleh IBEKA</b>	
<i>Cantika Swasti, Sutriyono .....</i>	<i>171-186</i>
<b>Collaborative Governance Dalam Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19</b>	
<i>Retno Sunu Astuti, Taufik.....</i>	<i>187-196</i>
<b>Dinamika Pengelolaan Zakat Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak</b>	
<i>Salma Munawwaroh, Nura Fajria .....</i>	<i>197-203</i>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model *Library of Congress* untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

Arab	=	Indonesia	Arab	=	Indonesia	Arab	=	Indonesia
ا	=	'	ر	=	r	غ	=	gh
ب	=	b	ز	=	z	ف	=	f
ت	=	t	س	=	s	ق	=	q
ث	=	th	ش	=	sh	ك	=	k
ج	=	j	ص	=	ṣ	ل	=	l
ح	=	ḥ	ض	=	ḍ	م	=	m
خ	=	kh	ط	=	ṭ	ن	=	n
د	=	d	ظ	=	ẓ	و	=	w
ذ	=	dh	ع	=	'	هـ	=	h
	=			=		ي	=	y

Bunyi <i>madd</i> :	ā	(	آ	)
	ī	(	إي	)
	ū	(	أو	)

Bunyi <i>dipotong</i> :	ay	(	أي	)
	aw	(	أو	)

## PENGANTAR REDAKSI

Asketik merupakan jurnal dengan kumpulan artikel-artikel kajian sosial, dengan fokus keagamaan dan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Fokus dalam jurnal Asketik ini adalah masalah-masalah keagamaan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah keagamaan dan perubahan sosial bisa dikaitkan dengan aspek budaya, ekonomi, politik yang berkembang. Jurnal Asketik diharapkan mampu menjadikan sebagai jurnal ilmiah yang berkualitas dalam mendukung pengembangan iklim akademis serta penelitian, di bidang keagamaan dan perubahan-perubahan sosial di tingkat nasional dan internasional. Pada awal tahun 2017, pengelola Jurnal Asketik mengajukan ISSN untuk versi media cetak. Adapun nomor P-ISSN adalah **2579-7050** dan untuk terbitan perdana terbit pada Juli 2017 sedangkan untuk E-ISSN adalah **2615-4668**.

Diharapkan setiap tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan sumberdaya penelitian dalam bidang kajian ilmu sosial keagamaan. Tim redaksi membuka komunikasi lebih lanjut guna meningkatkan kualitas dan mutu terbitan jurnal. Apabila terdapat kritik dan saran terkait tulisan, isi dan konten, tim redaksi siap menindaklanjuti untuk keberlangsungan dan kebermanfaatan jurnal Asketik. Semoga Jurnal Asketik dapat bermanfaat bagi kita semua.

Hormat Kami,

Redaksi Asketik



# Pola Harmoni Sosial Masyarakat Mataraman Di Kota Kediri

Taufik Alamin

Sosiologi Agama IAIN Kediri  
taufikalamin25@iainkediri.ac.id

## ABSTRACT

Since the days of the kingdom, the Kediri area has been inhabited by people from various ethnic groups, languages, religions, and beliefs. It also includes many places of worship such as mosques, churches, pagodas, temples, studios and Islamic boarding schools. The existence of these places of worship not only shows the level of plurality and tolerance of its citizens, this process also occurs over a long period of time. This study aims to reveal more deeply about the model of social integration carried out by the people of Kediri in the midst of dynamics and changes that continue to occur. This research was conducted using a qualitative method, using a case study approach in Kediri. Data was collected by using observation and interview methods and using relevant document sources. From these data, analysis and interpretation of the selected data is then carried out, to then draw a conclusion. Furthermore, the writing and construction of research results are carried out. The results of this study indicate that social integration in the Kediri community has been created in three forms of community social life, namely in the fields of slametan rituals, traditional arts and inter-religious relations. The three forms turned out to be able to become a binder for other social systems, even bridging interactions between actors and uniting them in a shared social system. The social integration model used in building social harmony is the proceduralist model and the assimilationist model.

**Keywords:** social harmoni, mataraman community, kediri city

## I. PENDAHULUAN

Wilayah Kediri secara kultural penduduknya berasal dari suku Jawa. Data terakhir menunjukkan populasi orang Jawa di Kediri mencapai lebih dari 90%. Dominasi terhadap orang Jawa ini terasa sekali dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu ukuran dari dominannya budaya dan tradisi Jawa tersebut adalah digunakannya bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari, kadang pula peneliti temukan dalam interaksi mereka dalam bidang pemerintahan dan layanan publik di Kediri. Selain itu mereka meskipun mayoritas beragama Islam, namun praktik-praktik ritual keselamatan masih rutin dilakukan, seperti dalam kelahiran, pernikahan dan kematian.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga menemukan beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kota Kediri yang merupakan cerminan dari masyarakat yang menekankan adanya harmoni sosial.

Peristiwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Harmoni sosial tersebut tercermin dalam tiga peristiwa yang telah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga harmoni tersebut yaitu; harmoni dalam tradisi slametan, harmoni dalam berkesenian dan harmoni dalam beragama.

Istilah masyarakat mataraman dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyebut wilayah Jawa Timur bagian barat bagian selatan. Adapun yang masuk dalam wilayah mataraman tersebut antara lain; Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Sedangkan istilah mataraman sendiri telah lama digunakan oleh masyarakat dan para pengamat sosial budaya. Hal ini disebabkan pola-pola budaya yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya merupakan pengaruh dari kekuasaan kerajaan Mataram Kuno dan Mataram Islam. Dua kerajaan besar

inilah yang hingga saat ini sangat terasa pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Mataraman mulai sistem religi, bahasa, organisasi sosial, maupun seni budaya. Karena besarnya pengaruh budaya dari kerajaan yang berpusat di Jogja dan Solo tersebut, wilayah ini dinamakan Mataraman.

Di sisi lain, masyarakat Kediri dikenal memiliki tingkat kerukunan antar umat beragama cukup tinggi. Hal tersebut juga didukung oleh adanya fakta bahwa tingkat toleransi antar pemeluk agama juga menunjukkan angka yang tinggi. (LPPM, 2018) Atas dasar itulah Pemerintah Kota Kediri di bawah pemerintahan walikota Abdullah Abu Bakar menetapkan Harmoni Kediri sebagai *city branding* pada tahun 2016.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bentuk-bentuk integrasi sosial yang terjadi pada masyarakat Kota Kediri. Selain itu juga untuk mengetahui model integrasi sosial yang digunakan sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang harmonis.

## II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. (Creswell, 2013)

Pemilihan pendekatan kualitatif didasari atas pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami. Dalam penelitian ini, terungkap bagaimana proses integrasi sosial masing-masing kelompok sosial dalam

kehidupan masyarakat Kediri. Dengan data tersebut peneliti memungkinkan untuk menyelidiki dan memaknainya secara utuh sehingga mampu memberikan penjelasan secara terinci tentang fenomena yang diteliti secara keseluruhan (Maleong, 2000).

## III. PEMBAHASAN

Masyarakat tersusun dari beragam etnis dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu setiap etnis dan kebudayaan tersebut harus memiliki posisi dan ruang yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian setiap individu dan kelompok akan merasa dihargai hak-haknya untuk hidup bersama secara terhormat dan bermartabat. Kondisi tersebut dapat tercipta karena masyarakat memahami arti hidup bersama dengan damai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebersamaan. Dalam istilah lain, masyarakat mataraman sedang dan telah melakukan suatu proses yang disebut integrasi sosial.

Integrasi sosial diartikan sebagai suatu proses dalam masyarakat ketika setiap kelompok sosial melakukan sinergi guna melakukan kedekatan hubungan antara satu dengan yang lain dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Kelompok sosial tersebut dapat terwujud karena didasarkan pada agama, kepercayaan, adat atau tradisi, suku dan kelas. Integrasi sosial tidak selamanya dilakukan untuk menghilangkan adanya diferensi sosial, karena yang terpenting adalah adanya sebuah kesadaran untuk menjaga keseimbangan hubungan. Dengan demikian integrasi sosial merupakan penyesuaian dari beragam unsur dalam kehidupan masyarakat untuk menghasilkan pola kehidupan yang serasi dan harmonis bagi masyarakat tersebut.

William F. Ogburn dan Mayer Nimkoff lebih lanjut memberikan catatan agar proses integrasi sosial tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Pertama, harus memiliki kemampuan untuk mengisi kebutuhan masyarakat pada saat diperlukan sehingga tetap menjaga hubungan yang baik dan

keterikatan satu dengan yang lainnya. Kedua, keberhasilan dalam menciptakan nilai-nilai dan norma tertentu yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, nilai-nilai dan norma tersebut dapat berlaku dalam waktu yang cukup lama dan dapat dilakukan bersama-sama secara konsisten. (Susanto, 1979)

Selanjutnya untuk mengamati fenomena integrasi sosial pada masyarakat Kediri, digunakan pemetaan yang dilakukan oleh Bikhu Parekh. Dalam hal ini Parekh mengklasifikasikan tiga model integrasi yang ada di dalam masyarakat yaitu model integrasi sosial proseduralis, model integrasi sosial asimilasionis dan model integrasi sosial millet. (Parekh, 2008)

Integrasi sosial model proseduralis memandang bahwa kehidupan keberagaman dalam masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sehingga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Artinya diperlukan suatu kekuatan untuk menjadi penengah sekaligus mengayomi agar keberagaman tersebut dapat hidup secara berdampingan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuasaan pemerintah. Kehadiran pemerintah tersebut sangat dibutuhkan sebagai pegangan. Dengan demikian pemerintah diharapkan mampu menciptakan aturan dalam membentuk perilaku umum bagi setiap individu dan kelompok sehingga dapat secara leluasa menjalankan aktifitasnya dengan bebas dan aman.

Sedangkan integrasi sosial model asimilasionis adalah suatu penyesuaian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial yang tidak hanya tergantung pada kekuatan struktural semata, namun lebih menekankan adanya persamaan nilai-nilai antar kelompok dalam masyarakat. Dalam pandangan model asimilasionis ini, kesatuan dalam masyarakat akan tercipta jika ada kemauan dari setiap kelompok sosial dalam membangun pola kehidupan bersama berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Biasanya kesepakatan

tersebut muncul sebagai hasil dari proses interaksi dan dialog yang intensif sehingga menghasilkan pengertian bersama sebagai dasar dalam bersikap dan berperilaku.

Selanjutnya integrasi sosial model millet berasumsi bahwa penyatuan dalam masyarakat dapat tercipta ketika kelompok minoritas diberikan ruang yang cukup leluasa untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya. Demikian pula sebaliknya, kaum minoritas tidak boleh menentang kultur dominan yang sedang berlaku di suatu masyarakat. Dalam pandangan model millet, negara tidak hanya sebatas mengakui keberadaan kelompok minoritas tetapi juga melembagakan dalam bentuk otonomi kepadanya, namun pada saat yang bersamaan mereka juga harus tunduk pada kepentingan yang lebih besar yang biasanya melekat pada kultur dominan yang berlaku di masyarakat tersebut.

#### **A. Integrasi Sosial dalam Ritual Slametan**

Harmoni atau keselarasan dalam kehidupan masyarakat Jawa sebenarnya tidak selalu tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, karena bagi orang Jawa konsep harmoni tersebut merupakan hal-hal peta pikiran yang mampu menjiwai seluruh aspek kehidupan. Bagi sebagian besar orang Jawa berpandangan bahwa keharmonisan merupakan inti dari budaya Jawa, namun sebagian yang lain mengatakan bahwa keselarasan atau harmoni sosial merupakan cikal bakal untuk mencapai tujuan hidup yaitu hidup yang aman tentram dan sejahtera. Sedangkan kesejahteraan sendiri bisa dicapai apabila seseorang bisa melakukan keselarasan dengan lingkungan sosialnya, hubungan antara manusia dan Tuhan alam dan hubungan antar sesama manusia itu sendiri.

Selain menjunjung tinggi konsep harmoni, orang Jawa juga meyakini rukun dan rasa hormat. Dua hal tersebut masih dijunjung tinggi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ada beberapa pihak yang memang sudah meninggalkannya. Prinsip rukun dan hormat dalam masyarakat

Jawa juga merupakan kaidah dasar yang paling menentukan dalam pola hidup masyarakat bagi upaya untuk mencapai keselarasan dan pemeliharaan ketertiban. Untuk mewujudkannya masyarakat Jawa cenderung untuk melakukan pengorbanan terhadap kepentingan dan ambisi pribadinya. (Mulder, 1985)

Masyarakat Jawa sangat memegang teguh kerukunan, karena bagi mereka kondisi itu harus terus dipertahankan sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, tentram, aman dan tanpa menimbulkan perselisihan. Setiap orang selalu di ajarkan untuk tidak menghancurkan keseimbangan sosial demi mengejar kepentingan pribadi. Oleh karena itu masyarakat Jawa selalu menekankan sikap *nrimo* atau mempunyai sikap pasrah terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Hal tersebut selalu disadarinya karena merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan hormat adalah nilai yang sangat berhubungan dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan sebuah etika pergaulan dengan orang lain.

Masyarakat Kediri utamanya di wilayah perkotaan, mayoritas penduduknya adalah suku Jawa. Dalam kehidupan keagamaannya pun memang tidak lepas dari pengaruh nilai, norma dan pandangan budaya Jawa, baik dari golongan masyarakat santri maupun yang abangan. Islam Abangan dalam memaknai agama Islam hanya pada aspek ritual tertentu, selebihnya mereka lebih banyak menggunakan pandangan-pandangannya yang bersumber dari kebiasaan dan adat budaya nenek moyang. Kelompok ini memiliki pandangan bahwa untuk urusan dunia sosial, cukup diselesaikan berdasarkan kebiasaan budaya tanpa melibatkan agama, sehingga agama hanya mengurus hal-hal yang bersifat khusus pribadi. Kelompok Islam Abangan sangat percaya pada adat istiadat Jawa. Hingga ada julukan dari pihak lain, mereka merupakan kelompok *kejawen*.

Dari pengamatan penulis kelompok abangan atau *kejawen* ini masih cukup banyak

di Kediri. Meskipun secara ritual mereka tidak lagi melaksanakan tata cara ritual paling tidak secara terang-terangan sebagaimana yang digambarkan Clifford Geertz.(1960). Tetapi mereka masih mempercayai upacara-upacara dalam siklus kehidupan seperti kelahiran; mitoni, selapanan, perkawinan, kematian; mendak 7 hari, 40 hari, 100 hari hingga 1000 hari meninggalnya seseorang, Begitupun juga dalam hal perkawinan masih banyak ditemukan keluarga-keluarga yang menggunakan upacara tradisi temanten yang menggunakan tata cara orang Jawa. Misalnya tradisi lamaran, sisetan, temu manten, pitonan dan lain sebagainya. Meski begitu dalam perkembangannya praktek-praktek ritual tersebut sudah bersifat kolaboratif yaitu bersama-sama dengan kelompok Islam santri.

Kolaborasi antara Islam abangan dan Islam santri dapat berupa do'a bersama atau acara ngirim do'a kepada arwah. Dalam hal acara pengiriman doa arwah tersebut banyak ditemukan dalam keluarga Islam abangan dengan mengundang kelompok yasinan dan tahlil ke rumahnya, minta dido'akan agar hajatnya bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pihak tuan rumah menyediakan hidangan untuk dimakan bersama dan nasi berkat untuk dibawa pulang kelompok Islam santri dengan maksud diberikan kepada keluarganya di rumah.

Disamping itu, ada tradisi kelompok abangan yang sebagian kecil masih dilakukan secara turun temurun yakni memberikan sesaji di pertigaan dan perempatan jalan. Tradisi ini mereka lakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain, bahkan terkesan dilakukan secara diam-diam. Artinya tradisi ini dilakukan oleh masing-masing individu dan tidak secara kolektif sebagaimana upacara yang terkait dengan siklus kehidupan tadi. (Geertz C. , 2013)

Dari gambaran di atas, apabila dikaitkan dengan temuan Clifford Geertz dalam bukunya *Agama Orang Jawa*, maka karakter kelompok abangan maupun santri, atau lebih



tepatnya antara orang Islam abangan dan Islam santri sudah jauh berbeda kondisinya dibandingkan dengan saat penelitian tersebut dilakukan yakni tahun 1960-an. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek ritual dan perilaku keagamaannya saja, tetapi juga terjadi pada wilayah relasi antar keduanya yang tidak lagi bersifat antagonis, tetapi sudah berubah menjadi sinergis bahkan terkesan integral antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu contoh untuk menjelaskan kondisi tersebut antara lain banyak kelompok abangan karena dirasa mampu secara finansial telah melakukan haji. Bahkan mereka yang sudah berhaji tersebut dengan tidak malu-malu menyebutkan titel hajinya di depan namanya. Atau secara lisan mereka bangga jika dipanggil dengan sebutan pak haji. Sebaliknya bagi kelompok santri hubungannya dengan kelompok abangan semakin dekat dan akrab. Hal ini disebabkan kaum abangan lebih dekat dengan tata cara keagamaan yang dimiliki kelompok santri dibandingkan model keagamaan kelompok Islam perkotaan.

Dalam kenyataannya, memang orang-orang Islam abangan ini dalam hal beribadah akhirnya secara alamiah menjadi bagian dari jamaah orang Islam santri. Dimana dalam setiap kegiatan ritual seperti sholat jamaah, pengajian, yasinan dan tahlilan, santrilah yang menjadi pemimpinya. Apalagi dalam banyak tempat ditemukan orang santri tersebut juga sekaligus merupakan pemimpin ormas keagamaan, atau memiliki masjid atau madrasah.

Selanjutnya, masih terkait dengan siklus kehidupan, yang menyangkut tempat tinggal dan mata pencaharian, masyarakat Islam abangan di Kota Kediri setiap tahunnya masih mengadakan ritual bersih desa atau *nyadran*. Ritual ini bertujuan sebagai bentuk syukur terhadap bumi dan alam semesta yang telah memberikan rejeki dan penghidupan pada penduduk di suatu desa. Biasanya kegiatan yang banyak diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat ini dipusatkan di tempat-tempat

yang dianggap keramat, seperti makam, pohon besar, dan sumber mata air atau sendang. Mereka mempercayai bahwa ketika ritual ini dilaksanakan, akan menjadi sarana tolak balak, namun sebaliknya jika tidak dilakukan akan mendatangkan bencana dalam kehidupannya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah seorang warga Blabak, Sukijo (49) sebagai berikut:

“*Nyadran* ini dilakukan secara rutin dan turun-temurun, masyarakat mempercayai bahwa dengan kegiatan ini sebagai cara berterima kasih kepada yang babat alas desa dan kepada Gusti Allah.. *Nyadran* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua hasil panen seperti polo gumantung, polo kependem. Setelah semua itu dido’akan nantinya juga dibagikan kepada mesyarakat juga”. Kata Sholikin warga Kaliombo. (Wawancara, 12 Desember 2020)

Dalam praktiknya pelaksanaan kegiatan *nyadran* atau sedekah bumi, atau secara umum disebut juga bersih desa, dilakukan oleh seluruh warga dusun tanpa pandang bulu. Dalam acara bersih desa yang biasanya telah ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap orang wajib mengagendakan agar pada hari H dapat ikut serta, hadir dan berkumpul dengan warga yang lainnya. Setiap keluarga menyediakan nasi berkat yang akan dibawa saat acara tersebut digelar. Pada hari itu semua warga menyiapkan makanan khas tersebut untuk dibawa dan diberikan kepada warga lain sebagai sedekah setelah sebelumnya dibacakan do’a-do’a oleh tokoh adat dan tokoh agama.

Dalam melakukan ritual bersih desa tersebut, tokoh dusun yang biasanya dituakan dan dihormati, akan memimpin jalannya upacara hingga selesai. Semua warga berkumpul dan secara seksama mendengarkan ijab, atau ikrar yang diucapkan pemimpin desa. Ikrar diucapkan dengan menggunakan bahasa Jawa, tepatnya bahasa Jawa inggil, yang bagi generasi muda belum tentu tahu artinya tersebut, tetapi secara hikmat diikuti oleh semua warga yang hadir. Di akhir acara selanjutnya dilakukan

do'a yang dipimpin oleh salah seorang tokoh agama Islam. Sudah pasti kalau doa tersebut diucapkan dengan menggunakan bahasa arab sebagaimana tuntunan syariat Islam. Setelah do'a dipanjatkan giliran ada sambutan dari pejabat RT atau RW yang menegaskan pentingnya tradisi dan kegiatan tersebut dipertahankan. Bukan hanya karena acara tersebut dilakukan karena setahun sekali, tetapi memiliki pesan khusus bahwa tradisi dan ritual itu sendiri menyangkut keberlangsungan dan keselamatan seluruh warga desa.

Rangkaian paling akhir dari kegiatan ritual bersih desa adalah pembagian berkat dan makan bersama. Dalam acara makan bersama ini sebagian warga ada yang langsung pulang dengan membawa bagian berkatnya, dan sebagian yang lain makan bersama dengan cara *muluk*, yaitu makanan diletakkan di nampan lalu dimakan bersama oleh sejumlah orang. Puncak dari acara bersih desa adalah panggung hiburan rakyat yang dilaksanakan soe hingga malam hari. Biasanya mereka menampilkan kesenian rakyat atau kesenian tradisional yang berupa jaranan atau wayangan. Biaya penyelenggaraan dari rangkaian acara tradisi tersebut dihimpun dari warga masyarakat sendiri dengan cara iuran.

Jika dilihat dari gambaran fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa perasaan senasib dan sepenanggungan antar warga Kota Kediri masih kuat. Ikatan solidaritas sebagai bagian dari keluarga besar masih sangat terasa. Kondisi tersebut hampir sebagaimana besar dilakukan oleh warga Kota Kediri. Utamanya bagi warga kelurahan yang di dalamnya masih terdapat punden atau tempat yang disakralkan, maka kegiatan nyadran atau bersih desa ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Dengan demikian, kemampuan masyarakat dalam membangun solidaritas sosial yang masih tinggi tersebut yang oleh Emil Durkheim disebut solidaritas mekanik, hal tersebut dikarenakan masyarakat masih memiliki rasa kebersamaan yang lebih

besar dibandingkan kepentingan masing-masingarganya. Rasa kebersamaan yang tinggi tersebut biasanya ditandai dengan keharusan untuk hadir dalam setiap acara bersama, termasuk kegiatan bersih desa yang momentumnya dilaksanakan setahun sekali ini - menjadi ukuran tersendiri bagi setiap orang sebagai warga desa bahwa ia masih guyub dan memiliki empati dengan yang lain. Artinya komitmen kebersamaan setiap orang dapat dilihat dari keaktifan yang bersangkutan untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan desa.

Dengan gambaran pelaksanaan ritual bersih desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata bukan hanya didominasi oleh kalangan masyarakat abangan saja. Tetapi dalam penyelenggaraannya telah melibatkan kelompok masyarakat santri untuk ambil bagian di dalamnya. Bahkan dalam perkembangan lima tahun terakhir yang peneliti amati sendiri, ritual *slametan* ini justru banyak dilakukan oleh kelompok santri yang ternyata frekuensinya jauh melampaui apa yang dilakukan oleh kelompok abangan sendiri.

Bedanya, kalau kegiatan *slametan* ini dilakukan dengan mengundang kelompok santri sendiri namanya diganti menjadi acara syukuran atau tasyakuran. Bedanya kalau ritual yang dilakukan oleh kelompok abangan saja biasanya menggunakan mantra-mantra dengan bahasa Jawa dan dilengkapi dengan sesajen, sedangkan jika acara tersebut dilakukan oleh kelompok santri maka dinamakan dengan acara tahlilan, yasinan atau manaqiban. Sedangkan makanan yang disuguhkan pun juga bebas dan tidak ada syarat syarat khusus. Acara ini biasanya diadakan bersamaan dengan momentum kematian atau kelahiran bayi. Bahkan tidak jarang pula dilakukan menjelang acara akad nikah atau perkawinan. Yaitu dengan cara mengundang tetangga sekitar untuk membaca tahlil dan doa bersama di kediaman tuan rumah.

Konsep harmoni sosial yang terkandung dalam tradisi bersih desa dapat dilihat dari makna-makna yang terkandung dalam tradisi bersih desa. Dalam tradisi bersih desa sebagaimana yang telah dijelaskan, selain terdapat unsur harmoni sosial yang dapat dilihat dari prosesi atau pelaksanaan tradisi bersih desa adalah sebagai acara yang menggambarkan falsafah kehidupan orang Jawa yang gotong royong dan kehidupan yang penuh kerukunan dan ketentraman, serta mampu hidup damai ditengah-tengah masyarakat yang pluralis.

Harmoni sosial dalam pelaksanaan *slametan* bersih desa selain disimbolkan dalam beragam tata upacara dan sarana ritual juga diwujudkan dalam bentuk interaksi sosial antar berbagai elemen masyarakat yang berbeda keyakinan, agama, kelas sosial dan kelompok sosial di masyarakat Kota Kediri. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya harmonisasi tersebut adalah masih kentalnya nilai-nilai dan tradisi Jawa dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, meskipun pola kehidupan masyarakat Kota Kediri yang telah mengalami perubahan ke arah masyarakat urban dan mulai berlangsung proses industrialisasi, namun dalam kehidupan ritual dan tradisi Jawa masih dipertahankan dan menjadi cara pandang yang cukup dominan hingga penelitian ini dilakukan.

## **B. Integrasi Sosial dalam Berkesenian**

Salah satu seni tradisi masyarakat Jawa abangan di Kota Kediri adalah jaranan. Salah satu yang menjadi ciri khas dari kesenian yang menggunakan property jaranan kepeng ini adalah adanya ritual sebelum kesenian ini pentas. Ritual yang dimaksud adalah dengan menggunakan mediasi roh-roh atau makhluk halus dengan membakar dupa. Jaranan pada jaman dahulu adalah selalu bersifat sakral. Maksudnya selalu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Selain untuk tontonan, pada jaman dahulu jaranan juga digunakan untuk upacara-upacara resmi yang berhubungan dengan roh-roh leluhur

keraton. Pada jaman kerajaan dahulu jaranan seringkali ditampilkan di keraton.

Dalam kehidupan sehari-harinya para seniman jaranan adalah orang-orang abangan yang masih taat kepada leluhur. Mereka masih menggunakan *danyang* atau *punden* sebagai sesuatu yang dikeramatkan. Artinya mereka masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap roh-roh nenek moyangnya. Sehingga mereka juga masih melaksanakan praktik-praktik slametan seperti halnya dilakukan oleh orang-orang terdahulu.

Sedangkan jika dilihat dari segi starta sosial, seniman jaranan pada umumnya adalah para pekerja kasar. Mereka sebagian besar bermata pencaharian di sektor informal misalnya satpam, pedagang pasar, sopir, tukang becak, buruh bangunan, buruh pabrik, dan tukang kayu dan lain sebagainya. Sebagian yang lain bekerja sebagai penjual makanan ringan di pinggir-pinggir jalan di perkotaan, di pasar, terminal dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Dalam perkembangan zaman yang terus berubah, keberadaan kesenian jaranan juga terus mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan kondisi social masyarakat yang sudah berubah dalam memaknai dan mengembangkan jaranan. Dari tahun-ke tahun jaranan mulai berubah dari yang sifatnya tuntunan menjadi tontonan dan yang paling menarik adalah jaranan sebagai alat untuk menarik simpatisan dan untuk pengembangan pariwisata.

Clifford Gertz mengidentifikasi mereka dengan sebutan abangan. Gertz memberikan penjelasan tentang praktik abangan. Masyarakat abangan adalah suatu sekte politio-religius dimana kepercayaan jawa asli melebur dengan Marxisme yang Nasionalistis yang memungkinkan pemeluknya sekaligus mendukung kebijakan komunis di Indonesia. Sambil memurnikan upacara-upacara abangan dari sisa-sisa Islam (Geertz C., 2013).

Pada masa Orde Baru hubungan kelompok jaranan dengan santri sempat terjadi ketegangan. Namun seiring dengan

perkembangan waktu, apalagi setelah masa reformasi, akhirnya kedua kelompok ini saling memahami satu dengan yang lainnya. Memang keberadaan seni tradisional di Indonesia pada umumnya selama Orde Baru selalu distigma sebagai kesenian rakyat yang pro komunis dan berafiliasi dengan PKI.

Di Kediri yang seni tradisinya adalah jaranan juga menghadapi situasi yang sama, selalu diawasi dan distigma sebagai bekas binaan partai terlarang. Kalaupun diperbolehkan hidup, gerak dan manajemennya selalu dikontrol oleh pemerintah bahkan oleh aparat militer. Saat itu jaranan Kediri diperbolehkan pentas namun harus dipimpin oleh pejabat militer saat itu, yang secara kebetulan orang tersebut juga sedang bertugas di Kediri, namanya Pak Samboyo. Setelah itu nama kelompok jaranan juga diganti sesuai dengan nama pemimpinannya, yakni kelompok jaranan Samboyo Putro.

Bukti dari adanya saling pengertian antara kelompok abangan dan santri ini antara lain, saat datangnya bulan ramadhan, semua kelompok kesenian jaranan di Kota Kediri yang berjumlah tidak kurang dari 70 kelompok ini berhenti pentas. Artinya selama sebulan mereka tidak ada pementasan di Kediri maupun di kota lain. Hal ini dilakukan sebagai wujud menghormati kaum muslim yang sedang berpuasa di bulan ramadhan. Sedangkan dari sisi pesantren memberkan keleluasaan bagi kelompok jaranan untuk pentas asalkan tidak terlalu dekat dengan lokasi pondok pesantren. Dengan kondisi tersebut akhirnya hubungan kelompok santri dengan kelompok abangan di Kota Kediri dapat berjalan dengan damai dan kondusif. Kalaupun ada masalah dalam pementasan jaranan, biasanya berupa perkelahian atau keributan yang terjadi antar penonton jaranan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat dalam setiap pertunjukan jaranan senantiasa dikerumuni massa. Itupun sekarang sudah jarang terjadi, karena adanya tingkat

kesadaran masyarakat dan antisipasi yang dibuat oleh pihak keamanan.

Menurut Clifford Geertz, masyarakat Jawa dalam kehidupan keagamaan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Islam Abangan dan kelompok Islam Santri. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang kelompok Islam Abangan. Berdasarkan analisis Geertz tersebut, peneliti mencoba mengkomparsikan dengan perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat penelitian ini dilakukan. Jaranan yang asal-usulnya sebagai tradisi masyarakat abangan memang benar adanya. Sebab dalam kesenian jaranan ada syarat dan prosedur yang harus dilakukan oleh para pemainnya jika ingin menjadi seorang seniman jaranan sejati. Salah satu syarat ketika akan pentas di suatu tempat, terlebih dahulu harus melakukan ritual sesaji di tempat punden baik itu makam, sendang, atau petilasan di wilayah sekitar tempat pentas. Dalam bahasa jawanya mereka harus *kulo nuwun* terlebih dahulu kepada *danyang* desa. Tujuannya agar dalam pementasan diberikan kelancaran dan keselamatan.

Selain itu, dalam pementasanpun ada adegan yang disebut *ndadi* yaitu kondisi yang sengaja diciptakan agar bisa trance. Lewat kondisi trance inilah para pemain jaranan memanggil makhluk halus untuk bisa membantu dalam pertunjukkan. Bentuknya bisa diberi kekuatan untuk menari hingga durasi yang sangat lama, atau para pemain bisa memeragakan kekuatan diluar kemampuan manusia biasa, misalnya bisa kebal dari senjata tajam, memakan kaca, hingga ada juga yang membunuh ayam dan meminum darahnya. Hal tersebut dilakukan pemain tanpa kesadaran, atau sejenis kesurupan tetapi dikontrol pergerakannya melalui tabuhan gamelan yang menjadi iringannya.

Jika dikaitkan dengan temuan Geertz tersebut memang benar, bahwa salah satu karakter kelompok abangan adalah kebiasaannya dalam melakukan ritual *sesajen* dengan memanggil roh-roh halus nenek

moyang. Jika dilihat dari latar belakang sosial budaya dan kebiasaan hidup sehari-hari, memang semua pemain adalah abangan. Secara formal agama mereka adalah Islam. Sebagaimana kata Geertz, mereka adalah Islam minimalis atau Islam KTP. Yaitu model keberagamaan yang tidak menjalankan tuntunan agama secara menyeluruh sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Tetapi mereka manaka ditanya tentang agamanya, mereka akan menjawab dengan jelas dan tegas bahwa ia adalah orang Islam atau muslim.

Gambaran di atas berbeda dengan kondisi yang terjadi di kalangan penonton jaranan. Jika dilihat dari latar belakang keagamaan - yang ditunjukkan melalui perilaku dan busana yang mereka pakai, bahwa sebagian penonton jaranan hingga penelitian ini dilakukan adalah berasal dari 2 kelompok. Yang pertama adalah berasal dari kalangan muslim abangan, sama dengan kondisi para pemainnya, sebagaimana telah digambarkan sebelumnya. Sedangkan kelompok kedua adalah penonton yang berasal dari kalangan muslim santri. Memang jika diteliti lebih mendalam hanya satu dua orang yang benar-benar berasal dari kaum santri atau pondok pesantren. Tetapi mayoritas dari mereka adalah orang-orang abangan baik secara ideologis maupun sosiologis, meskipun mereka juga menjalankan syariat agama Islam seperti sholat dan puasa. Singkatnya, mereka adalah orang muslim abangan. Bahwa mereka juga sangat senang terhadap kesenian jaranan dan aktif menonton di manapun jaranan dipentaskan, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga menjalankan rukun Islam dalam kehidupannya seperti sholat, puasa, dan membayar zakat pada bulan ramadhan.

Meskipun demikian, hubungan antara komunitas jaranan dan pesantren seringkali pada masa lalu terjadi ketegangan. Kondisi tersebut berjalan fluktuatif. Dalam beberapa hal mereka bersitegang karena perbedaan prinsip. Maka dalam kondisi demikian, antara

jaranan dengan pesantren nampak tidak seiring dan bergerak saling menjauhi. Karena pada umumnya baik santri dan kyai tidak sepakat dengan adanya jaranan. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena penggunaan makhluk halus dalam setiap pementasannya. Mensikapi hal demikian dari para pelaku jaranan juga melakukan pembelaan, sebagai mana pandang Suratin salah seorang pemimpin kelompok jaranan mengatakan demikian:

“Dari kalangan santri kurang sepakat dengan tradisi jaranan. Maka untuk menjaga keselamatan, saya dalam setiap pertunjukan saya harus meminta izin terlebih dahulu dari pihak keamanan setempat. Hal ini kami lakukan agar kami selaku seniman bisa terlindung dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kesenian ini untuk kesenangan dan tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi jangan dicampuradukan dengan agama. Saya berharap harus ada keseimbangan antara seniman dengan pihak pesantren. Dan tidak harus berdebat tentang keberadaan masing-masing.” (Wawancara, 3 September 2019)

Dalam kesempatan yang lain peneliti juga mewawancarai salah seorang pemimpin kelompok jaranan yang berdomisili di Kelurahan Bandarlor. Ia menceritakan bahwa para seniman jaranan jika dimata pengasuh pondok pesantren Wahidiyah cenderung diberi ruang dan tidak memberikan larangan atau mengharamkan. Bahkan dalam banyak kesempatan para seniman jaranan yang bertempat tinggal disekitar pondok bisa berinteraksi dengan baik dengan kiainya. Tidak jarang pertemuan tersebut dilakukan di warung kopi di gang kampung dekat pondok. Dari pertemuan informal tersebut akhirnya terjalin pengertian antara kelompok jaranan dengan pondok pesantren. Ia juga menyadari bahwa hubungan baik tersebut belum tentu berlaku untuk pesantren lain. Pada umumnya hubungan pesantren dengan kesenian jaranan di Kota Kediri tidak ada masalah. Artinya kondusif dan saling menjaga. Meskipun jika

dilihat dari luar, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Tetapi tidak sampai menimbulkan konflik yang serius dan menimbulkan permusuhan.

Dalam pandangan teori struktural fungsional, konflik dan ketegangan harus semaksimal mungkin dihindari. Sebab konflik selain akan merusak tatanan sosial bersama, ia juga akan menimbulkan disharmoni dalam masyarakat. Akibatnya peran dan fungsi dari elemen sosial yang lain tidak dapat terintegrasi menjadi kekuatan yang menyatukan. Sedangkan dalam pandangan struktural fungsional masyarakat adalah kumpulan dari berbagai elemen atau unsur yang ada di dalamnya dan mempunyai keterkaitan dan ketergantungan dengan yang lain. (Ritzer, 2007)

Dengan demikian keberadaan kesenian tradisional jaranan di Kediri merupakan bagian dari sistem pelebagaan sosial. Sehingga secara struktural ia berfungsi dan saling berhubungan dengan sub-sub sistem yang lain. Secara fungsional kesenian tradisional ini berfungsi sebagai simbol untuk membentengi masyarakat desa agar tidak terjerumus pada tindakan yang merusak kerukunan dan kedamaian yang selama ini dirasakan masyarakat. Dalam konsep harmoni sosial sebagaimana yang disampaikan Talcot Parson, selalu berupaya mempertahankan unsur-unsur dalam sistem masyarakat tetap berfungsi. Dengan berfungsinya sistem-sistem tersebut termasuk sistem kesenian dan keyakinan, eksistensi komunitas dalam masyarakat tersebut dapat dipertahankan. (Liliweri, 2016)

### **C. Integrasi Sosial dalam Hubungan Antaragama**

Secara teritorial wilayah Kota Kediri memang tidak dapat dikatakan luas, bila dibandingkan wilayah-wilayah lain di Jawa Timur. Tetapi kondisi riil masyarakat Kota Kediri menunjukkan bahwa keberagaman latar belakang masyarakatnya sangat mencolok. Ada beberapa etnis di kota tahu ini antara lain Jawa, Cina, Madura, Batak, Ambon,

Arab, bugis dan lain sebagainya. Keberadaan etnis-etnis tersebut tidak semuanya mengelompok di suatu tempat, tetapi juga banyak yang menyebar dan membaaur dengan etnis yang lain.

Selain etnisitas, di Kota Kediri juga banyak berkembang faham keagamaan dan kepercayaan. Dalam rumpun Islam saja ada Nahdlatul ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad dan Ahmadiyah. Satu hal lagi yang membedakan Kota Kediri dengan daerah lain yaitu tempat berdirinya organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan organisasi pengamal sholatat Wahidiyah. Kedua organisasi tersebut berpusat di Kediri. Dalam setiap bulan tertentu selalu dibanjiri ribuan anggotanya yang datang kota-kota lain di Indonesia. Selain kedua organisasi sosial keagamaan tersebut di Kediri juga merupakan tempat lahir dan berkembangnya aliran kebatinan atau pengahayat kepercayaan. Beberapa kelompok kebatinan yang dapat disebutkan di sini antara lain Saptadarma, Ngesti Tunggal, Sumarah, dan Budhi Luhur.

Selain Islam yang merupakan agama mayoritas bagi masyarakat di Kota Kediri, terdapat agama lain yang keberadaannya sejak zaman kolonial bahkan pada masa kerajaan Daha Kediri jaman dulu, yaitu Hindu, Budha, Khonghucu, Kristen dan Katholik. Wujud keberadaan umat beragama yang sangat plural ini diperkuat dengan banyaknya tempat peribadatan dan lembaga pendidikan seperti masjid, pondok pesantren, mushola, gereja, pura, wihara dan klenteng.

Meskipun perbedaan agama, etnis dan kepercayaan di Kota Kediri sangat tinggi, tetapi toleransi dan kerukunan tetap terjaga dengan baik. Salah satu buktinya adalah saat terjadinya krisis ekonomi dan politik di Indonesia tahun 1997. Pada awalnya di kota-kota besar terjadi aksi massa menuntut perbaikan sistem ekonomi dan politik. Akibatnya banyak pengusaha melarikan modalnya ke luar negeri. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan rakyat akhirnya merebak di hampir semua kota di Indonesia.

Semula aksi unjuk rasa yang hanya sebatas menyampaikan tuntutan berkembang menjadi kerusuhan dan pembakaran terhadap fasilitas umum, pertokoan, gedung-gedung pemerintahan, rumah, dan kendaraan dinas maupun pribadi. Kekerasan demi kekerasan terus berlanjut hingga jatuhnya korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya.

Di Kediri situasi dan kondisi saat itu juga ikut terdampak, meski tidak sampai menimbulkan kerusuhan dan memakan korban jiwa dan harta benda, namun demonstrasi oleh mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Kediri hampir dilakukan setiap hari, juga seringkali dilakukan.

Menyadari semakin besarnya kekuwatiran masyarakat terjadinya konflik sosial ditambah lagi semakin sulitnya mengendalikan rasa keputusasaan masyarakat yang semakin meluas karena himpitan problem sosial dan ekonomi akibat krisis moneter, maka timbulah kesadaran dalam benak para tokoh agama dan pengusaha yang ada di Kota Kediri untuk melakukan komunikasi sebagai langkah antisipasi agar terhindar dari konflik dan kerusuhan sosial yang menakutkan tersebut.

Dalam kondisi yang penuh dengan kegaduhan tersebut, KH Anwar Iskandar salah seorang tokoh ulama Kediri memanggil beberapa tokoh masyarakat dan pemuda untuk melakukan sharing dan diskusi mensikapi situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Acara pertemuan tersebut diharapkan menjadi pintu awal untuk memahami suasana kebatinan para tokoh agama dan umatnya serta menyusun langkah-langkah ke depannya secara bersama-sama.

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 10 Mei 1998 bertempat di kediaman KH Anwar Iskandar pondok pesantren Ngasinan, Ngronggo Kota Kediri. Adapun yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain KH Imam Yahya Malik (pengasuh pondok pesantren Al Ma'ruf), Amin Djunaidi (pengusaha/Kristen), Budhi Dharma (pengusaha/GKI), Sholahuddin (PMII), Abdul Halim Moestafa dan Ahmad Subakir, keduanya dari NU. Dalam pertemuan

tersebut disepakati untuk mengadakan kegiatan dalam bentuk pawai keliling kota yang diikuti oleh semua tokoh dan pemeluk agama. Dalam pertemuan tersebut juga diharapkan masing-masing tokoh dan umat agama memakai atribut dan pakaian keagamaan. Dengan begitu masyarakat akan mengetahui bahwa antar tokoh agama di Kediri dapat berdampingan hidup rukun dan damai tanpa menimbulkan konflik serta kekerasan. (Subakir, 2003, hal. 86)

Waktu terus berjalan seiring dengan situasi pergolakan di Jakarta semakin hari semakin memanas. Aksi kerusuhan, penjarahan, pembakaran toko-toko dan fasilitas umum, bahkan pemerkosaan terhadap etnis Cina terjadi kian marak di ibu kota. Tanggal 19 Mei 1998 telah terjadi pembakaran Yoga Plasa di kawasan Jatinegara Jakarta hingga merenggut korban jiwa sebanyak 126 orang. Situasi semakin tidak menentu, sementara demonstrasi mahasiswa di seluruh kota di Indonesia sudah sulit untuk dikendalikan. Di Jakarta sendiri demonstrasi tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa tetapi sudah melibatkan masyarakat. Demonstrasi tersebut dilakukan setiap hari tanpa berhenti. Akhirnya tanggal 21 Mei 1998, masyarakat dikejutkan dengan pengunduran Soeharto sebagai presiden RI dan jabatan tersebut diserahkan kepada BJ. Habibie sebagai penggantinya.

Di Kediri para tokoh agama, penghayat kepercayaan dan pengusaha melakukan pertemuan yang dikemas dengan kegiatan Do'a Bersama Komponen Umat Beragama. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan kekuatan moril bangsa Indonesia pada umumnya dalam menghadapi cobaan berat sebagai bangsa yang beragama. Acara tersebut juga sebagai pelipur lara dan dorongan spiritual bagi keluarga korban kerusuhan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia.

Kegiatan do'a bersama akhirnya dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1998 yang bertempat di kampus Universitas Islam

Kadiri. Do'a bersama tersebut dihadiri dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Kediri. Baik pemuka agama maupun umat berdatangan untuk melakukan kegiatan yang sudah disepakati sebelumnya. Jumlah peserta yang hadir dalam acara tersebut sebanyak 2000 orang yang berasal dari umat Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan penghayat kepercayaan.

Setelah acara selesai masing-masing tokoh agama meakukan pembicaraan terkait dengan perkembangan situasi terakhir. Mereka juga sepakat untuk melestarikan dan melanjutkan acara-acara serupa di masa-masa mendatang. Untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi, maka disepaki untuk mendirikan wadah kerukunan tersebut dengan nama Paguyuban Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan. Bentuk dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk piagam kerukunan antar umat beragama yang ditanda tangani oleh tokoh lintas agama dan penghayat kepercayaan di Kediri.

Selain didasari oleh nilai-nilai Jawa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kehidupan keagamaanpun juga mengalami perubahan pola hubungan yang signifikan. Saat awal reformasi banyak terjadi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya kekuatiran bagi kalangan tokoh agama dan pengusaha di Kota Kediri agar kejadian tersebut tidak menjalar ke Kota Kediri.

Dalam hal keagamaan, selain Islam yang merupakan agama mayoritas bagi masyarakat di Kota Kediri, terdapat agama lain yang keberadaanya sejak zaman kolonial bahkan pada masa kerajaan Daha Kediri jaman dulu, yaitu Hindu, Budha, Khonghucu, Kristen dan Katholik. Wujud keberadaan umat beragama yang sangat plural ini diperkuat dengan banyaknya tempat peribadatan dan lembaga pendidikan seperti masjid, pondok pesantren, mushola, gereja, pura, wihara dan klenteng.

Hingga akhirnya dalam rangka untuk mengadakan pertemuan antar tokoh dan masyarakat lintas etnis dan agama diadakan pertemuan awal pada tanggal 10 Mei 1998 yang bertempat di kediaman KH Anwar Iskandar pondok pesantren Ngasinan, Ngronggo Kota Kediri. Dari pertemuan awal tersebut akhirnya melahirkan suatu gagasan untuk mendirikan paguyuban antar umat beragama dan penghayat kepercayaan atau yang disingkat PAUB-PK. Acara tersebut dideklarasikan pada tanggal 28 Juli 1998 di aula Universitas Islam Kadiri (UNISKA).

Menurut KH.Anwar Iskandar, misi dibentuknya wadah paguyuban kerukunan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari keikutsertaan tokoh umat beragama secara aktif dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya kehidupan antarumat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian fungsi paguyuban antar umat adalah sebagai wadah yang menjalankan aktifitasnya berdasarkan nilai-nilai yang substatif dan membantu penanaman nilai etik dan berakibat pada pendidikan masyarakat. Adapun kriteria dari sebuah tata nilai yang dimaksud dapat mewujudkan harapan paguyuban sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan advokasi antar pimpinan dan umat beragama dan penghayat kepercayaan, menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bergerak di bidang sosial dan tidak akan melakukan kegiatan politik praktis dalam berbagai bentuk. (Subakir, 2003, hal. 92)

Dalam perkembangannya, wadah paguyuban antar umat beragama dan penghayat kepercayaan tersebut telah mampu melaksanakan agenda rutin yaitu berupa pertemuan setiap malam jum'at kliwon. Pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh



para pemuka agama dan aliran kepercayaan, namun dihadiri pula para pengusaha, pemimpin pemerintahan yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOMPINDA) seperti Kodim 0809, Polres Kediri Kota, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri. Demikian pula para tokoh pemuda dan anggota dari organisasi sosial kemasyarakatan seperti NU, MUI, Muhammadiyah, LDII, BAMAG, KNPI, WALUBI juga selalu hadir dalam pertemuan tersebut. Sejak berdirinya hingga sekarang, agenda pertemuan PAUB-PK telah menjadi wadah interaksi sosial bagi semua komponen masyarakat yang ada di Kota Kediri, dan telah mampu menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antar unsur masyarakat di Kota Kediri.

Di tingkat elit pemerintahan dan tokoh masyarakat, semenjak Kota Kediri dipimpin walikota Ahmad Maschut, hubungan dengan para tokoh masyarakat, pengusaha dan pemuka agama, dan pengasuh pesantren mulai dibangun. Salah satu bentuknya adalah dilibatkannya tokoh-tokoh masyarakat dalam pemerintahan, misalnya saat pelaksanaan sidang paripurna pemilihan walikota Kediri oleh anggota DPRD Kota Kediri. Adalah suatu yang tidak lazim saat itu, sidang paripurna yang biasanya hanya melibatkan para anggota DPRD, namun saat itu justru mengundang para tokoh masyarakat dan pemuka agama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Halim Moestofa mantan anggota DPRD Kota Kediri sebagai berikut:

“Sejak periode lima tahun pertama, walikota pak Maschut memang berhasil melakukan pendekatan dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Banyak pendekatan yang beliau lakukan terbukti berhasil dan diakui sebagai pemimpin yang mengayomi masyarakat. Untuk pemuda dan olah raga beliau berhasil memajukan Persik. Karena melihat pola kepemimpinan pak Maschut bisa diterima oleh banyak kalangan, maka untuk periode lima tahun berikutnya para tokoh dan elit agama sepakat mendukung beliaunya maju lagi sebagai walikota untuk kedua kalinya. Dan sebagai apresiasi terhadap dukungan

tersebut para tokoh tersebut dundang dalam sidang paripurna pemilihan walikota Kediri. Kami saat itu sebagai anggota dewan menyetujuinya. Meskipun keberadaannya saat itu hanya sebatas menyaksikan.”

Gambaran sebagaimana yang telah disampaikan Halim Moestofa tersebut menjadi salah satu bukti bahwa interaksi dan hubungan sosial antar tokoh dan pemimpin di Kota Kediri sudah berjalan dengan baik. Pola hubungan tersebut senantiasa terus dijaga dan dilakukan secara terus menerus. Pola interaksi tersebut berlanjut hingga pemerintahan walikota berganti ke Samsul Ashar selama lima tahun, dan terus dilanjutkan ke walikota Abdullah Abu Bakar hingga sekarang. Dengan demikian hubungan segi tiga antara pemerintah/elit politik, pengusaha dan para tokoh agama dan masyarakat telah memberi dampak pada terciptanya situasi dan kondisi sosial dan politik di Kota Kediri dapat berjalan dengan stabil dan kondusif.

Wadah interaksi sosial yang lain di tingkat masyarakat bawah sejak pasca reformasi juga berjalan semakin intensif. Hal tersebut dapat dilihat melalui aktifitas keagamaan masyarakat dan pelestarian kesenian tradisional. Dengan demikian keberadaan kesenian tradisional jaranan di Kediri merupakan bagian dari sistem pelebagaan sosial. Sehingga secara struktural ia berfungsi dan saling berhubungan dengan sub-sub sistem yang lain. Secara fungsional kesenian tradisional ini berfungsi sebagai simbol untuk membentengi masyarakat desa agar tidak terjerumus pada tindakan yang merusak kerukunan dan kedamaian yang selama ini dirasakan masyarakat.

#### **D. Model Integrasi Sosial Masyarakat Mataraman**

Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat tersebut. Demikian pula dalam konteks masyarakat Kota Kediri,

proses intergrasi sosial tersebut setidaknya terjadi pada tiga wilayah yakni ritual kepercayaan, berkesenian dan hubungan antaragama. Dari ketiga wilayah tersebut model integrasi sosial selalu mengandalkan faktor struktural maupun kultural.

Mencermati fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Kediri, integrasi sosial dapat terbentuk dengan baik karena warganya bersepakat mengenai struktur kemasyarakatan, nilai-nilai, dan norma serta pranata sosial di perlukan agar masyarakat tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Hal tersebut tampaknya berlaku terutama dalam konteks kehidupan ritual slametan, berkesenian tradisonal dan hubungan antaragama.

Dalam kaitanya dengan ritual slametan, berkesenian tradisonal dan hubungan antaragama yang ada di masyarakat Kota Kediri ternyata mampu melahirkan kondisi harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Harmoni sosial yang dimaksud adalah suatu keadaan yang menggambarkan keseimbangan dalam kehidupan. Keharmonisan dalam masyarakat tersebut dapat terwujud karena masing-masing orang saling menghargai, saling menyayangi diantara anggota keluarga dan masyarakat.

Kondisi tersebut dapat diciptakan di tengah masyarakat, terutama disebabkan masyarakat Jawa menempatkan harmoni sosial sebagai cita-cita tertinggi dalam menata kehidupannya, baik di keluarga maupun di masyarakat. Artinya suatu harmoni tidak akan tercapai jika rasa cinta dan kedamaian serta rasa saling menghargai tidak tertanam dalam diri manusia.

Jika dikaitkan dengan model integrasi sosial menurut Parekh, maka masyarakat di Kota Kediri lebih cenderung menggunakan model proseduralis dan asimilasionis. Hal tersebut tidak lepas dari sikap pemerintah daerah dan nilai-nilai yang dimiliki oleh

orang Jawa sebagai masyarakat dominan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat Kota Kediri sangat dipengaruhi oleh pandangan dan nilai-nilai budaya Jawa. Salah satu contohnya, banyak perkumpulan dan ikatan sosial maupun agama menggunakan istilah *paguyuban*. Kata *paguyuban* berasal dari kata *guyub*. Kata *guyub* ini mengacu pada salah satu ciri khas masyarakat yang mementingkan semangat kebersamaan (Koentjaraningrat, 1984).

Dalam konteks masyarakat mataraman di Kota Kediri, integrasi sosial model proseduralis diterapkan dalam kehidupan hubungan antaragama. Selain prinsip kerukunan atau harmoni dalam masyarakat sendiri telah tercipta, peran pemerintah daerah yang bersifat mengatur dan melindungi juga sangat tampak dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang diadakan. Melalui wadah Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (PAUB-PK) pemerintah kota Kediri selalu melibatkannya dalam setiap program yang dicanangkan. Hubungan antar agama yang harmonis tersebut bahkan dijadikan dasar dalam membangun citra kota dengan nama "Kediri Harmoni". Sebaliknya, bagi komunitas antar agama, kehadiran pemerintah tersebut juga sangat dibutuhkan sebagai pegangan, sehingga dengan peran tersebut pemerintah dapat menciptakan aturan dalam membentuk perilaku umum bagi setiap individu dan kelompok sehingga dapat secara leluasa menjalankan aktifitasnya dengan leluasa dan aman.

Masih terkait dengan model integrasi proseduralis, pemerintah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah memberikan kewenangan berupa rekomendasi ketika ada permintaan pendirian rumah ibadah baru. Berlandaskan aturan yang bersumber dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri tersebut, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap komunitas umat beragama jika mau mendirikan tempat ibadah baru, baik berupa masjid, gereja,

klenteng, pura dan wihara. Dengan posisi tersebut pemerintah harus memperlakukan secara adil dan memberikan hak yang sama bagi setiap pemeluk agama yang ada di Kota Kediri untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Sedangkan integrasi sosial model asimilasionis dalam konteks masyarakat mataram di Kota Kediri diterapkan melalui praktek kesenian tradisional dan ritual slametan. Dua kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan baik karena masing-masing kelompok lebih menekankan adanya persamaan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam pandangan model asimilasionis ini kesatuan dalam masyarakat akan tercipta jika ada kemauan dari setiap kelompok sosial dalam membangun pola kehidupan bersama berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Biasanya kesepakatan tersebut muncul sebagai hasil dari proses interaksi dan dialog yang intensif sehingga menghasilkan pengertian bersama sebagai dasar dalam bersikap dan berperilaku.

Prinsip kerukunan tersebut terlihat dari pelaksanaan ritual slametan maupun dalam pelaksanaan pentas kesenian tradisional. Jika dalam ritual slametan, terjadi proses kebersamaan dalam pelaksanaan ritualnya, yakni dilibatkannya do'a-doa dari para tokoh agama sekitar desa untuk memimpin do'a, namun dalam pementasan kesenian tradisional proses kebersamaan dilakukan di luar acara pementasan, misalnya saat bulan ramadhan pentas kesenian jaranan diliburkan dengan alasan menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain itu secara individu para pelaku kesenian tradisional jaranan berhubungan dengan baik dengan para tokoh dan komunitas pesantren melalui pertemuan-pertemuan informal maupun pertemuan sehari-hari dalam masyarakat.

Dengan menggunakan dua kegiatan tersebut, secara umum masyarakat Kota Kediri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Prinsip tersebut oleh masyarakat

dijaga dengan baik. Akan tetapi, apa saja yang akan mengganggu kerukunan diatasi segera oleh seluruh warga masyarakat sehingga terhindar dari adanya konflik. Hal lain yang tampak menonjol dari pelaksanaan prinsip kerukunan itu ialah kemampuan menguasai emosi supaya tetap terkendali dan tidak mengganggu kerukunan masyarakat. Meskipun dari prinsip kerukunan itu sering timbul sikap berpura-pura yang mungkin merugikan diri sendiri meskipun kerugian tersebut juga tidak diperhitungkan.

Jika dicermati lebih mendalam, prinsip kerukunan oleh masyarakat Jawa selalu ditanamkan secara terus-menerus dan dijaga dengan baik. Akan tetapi, jika ada pihak-pihak yang akan mengganggu kerukunan segera diatasi oleh seluruh warga masyarakat sehingga terhindar dari adanya konflik. Hal lain yang tampak menonjol dari pelaksanaan prinsip kerukunan itu ialah kemampuan menguasai emosi supaya tetap terkendali dan tidak mengganggu kerukunan masyarakat. Dari prinsip kerukunan itu sering timbul sikap berpura-pura yang mungkin merugikan diri sendiri meskipun kerugian tersebut tidak diperhitungkan.

Selain prinsip kerukunan, nilai dasar yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Jawa di Kota Kediri adalah prinsip hormat. Prinsip ini mengatur hubungan anggota-anggota masyarakat Jawa secara hirarkis. Setiap orang Jawa akan segera tahu di mana ia harus berada pada waktu dan situasi tersebut, penggunaan bahasa Jawa yang bagaimana yang digunakan, bagaimana sikap yang harus diambil dalam menghadapi lawan bicaranya, dan lain sebagainya yang terkait dengan prinsip ini (Mulder N. , 1985).

Sikap hormat kepada yang lebih tua, baik karena umur maupun karena silsilah kekerabatan atau karena kedudukan yang lebih tinggi itu akhirnya membentuk struktur sosial masyarakat Jawa yang paternalistik. Artinya, melakukan atasan dengan sendirinya dianggap benar dan dengan demikian

menjadi standar moral yang akan ditiru oleh bawahannya.

Demikian kedua prinsip pokok yang menjadi sumber moral masyarakat Mataraman di Kota Kediri yang terlihat pada semua tatanan, kebiasaan, perbuatan, dan tingkah lakunya dalam hidup sehari-hari. Hal tersebut masih dipegang teguh dan dijaga kelangsungan hidupnya hingga sekarang.

Menurut Mulder, lahinya kultur harmoni sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Mataraman di Kota Kediri tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan mereka yang hidup sebagai petani. Kultur agraris tersebut lahir sebagai akibat dari kebiasaan mereka mengolah tanah dan menanamnya hingga suatu saat akan memanennya. Tidak jarang selama mereka melakukan hal tersebut terjadi komunikasi batin antara petani dengan tanaman dan tanah yang diolahnya. Salah satu cara melakukan komunikasi dengan tanah dan tanaman tersebut diwujudkan dalam bentuk ritual upacara tradisional, saat ingin memulai cocok tanam dan saat panen tiba. Dalam skala yang lebih luas lagi masyarakat Jawa secara kolektif juga melakukan ritual yang dilakukan secara rutin setahun sekali terhadap bumi, tanah air kelahirannya yang bernama upacara bersih desa. (Mulder N. , 1985)

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka model integrasi sosial yang diterapkan oleh masyarakat Kota Kediri menggunakan model proseduralis dan Asimilasionis. Model integrasi sosial proseduralis dapat ditemukan pada hubungan antaragama, sedangkan model integrasi asimilasionis terdapat pada praktik budaya ritual slametan dan pentas kesenian tradisional. Keduanya berjalan serasi sesuai dengan dinamika masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan. Sehingga dalam konteks sosial budaya ketiga kegiatan tersebut terus dilestarikan sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan baik antar kelompok di masyarakat, sehingga tercipta suasana yang damai dan harmonis.

Hal tersebut selaras dengan pandangan hidup orang Jawa, bahwa harmoni sosial adalah suatu tugas yang harus dipahami oleh setiap orang Jawa untuk selalu menjaga kehidupan sosial selalu dalam keselarasan dan keseimbangan. Dalam menjaga kehidupan sosial dapat dilakukan dengan melakukan interaksi sosial berjalan dengan wajar tanpa ada tekanan-tekanan dan pemaksaan yang dapat menghambat kebebasan seseorang.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Parson, bahwa sistem kultur yang ada dalam masyarakat Kota Kediri yang dalam konteks penelitian ini meliputi kultur harmoni dalam kehidupan ritual slametan, kesenian tradisional dan hubungan antar agama, ternyata mampu mengikat sistem sosial lainnya. Bahkan kultur tersebut telah menjadi jembatan interaksi antar aktor dan menyatukannya dalam sistem sosial bersama. Dengan demikian kultur mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan sistem tindakan yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, N. S. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Astrid S. Susanto (1979) *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta
- Ayu Soetarto, 2004, Pendekatan kebudayaan dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur, Jember, Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jawa Timur.
- Bikhu Parekh, (2008) *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya, dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius
- Chalik, Abdul. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Geertz, Clifford. (2013). *Agama Jawa Abangan dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Geertz, H. (1983). *Keluarga Jawa*. Jakarta: Graffiti Pers.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Liliwari, A. (2016). *Konfigurasi Dasar Teori-Teori Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Nusa Media.
- Mulder, N. (1985). *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan
- Mulder, N. (2001). *Mistisisme Jawa, Ideologi di Indonesia*. (N. Cholis, Penerj.) Yogyakarta: LKiS.
- R.Anderson, B. (2000). *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa*. Yogyakarta: Qalam.
- Ritzer, G. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Roqib, M. (2007). *Harmoni dalam kebudayaan Jawa: dimensi edukasi dan keadilan gender*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press .
- Subair. (2015). *Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa*. Dialektika.
- Subakir, A. (2003). *Merajut Persaudaraan Sejati Antar Umat Beragam, 5 Tahun PKUB Kota Kediri*. Kediri: Sosekumdik dan Litbang PKUB Kota Kediri.
- Suseno, M. (1985). *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.



# Persepsi Masyarakat Tentang Kiprah Kiai dalam Kancah Politik

Heri Fadli Wahyudi

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Madura

fadliwahyudi37@gmail.com

## ABSTRACT

The legitimacy authority of kiai's diversity it's nothing for the Indonesian muslim communities. even for some people, the figure of kiai gets the title as a holy person, wise along with other attributes that are embedded to the kiai. Whereas lately, the picture of politics continues to be torn apart and degenerates so that you are in an uncomfortable zone, thas is a negative view of dirty world. So is there a synergistic meeting point between these two poles ? so that both of them can be in tune to become a single. This study aims to determine the publics of kiai, by using the type field qualitative reasearch when the reasearcher conducts reseacrh in the Somber Bentong hamlet, Karang Cempaka Village, Bluto District, Sumenep regency. to get understanding description, public percepstion and dakwah from political kiai. The techniques used in this research are observation, interview and documentation which are then analyzed by data reduction, data presentation and data verification. The conclusion of this study is that the term kiai undergoes a transformation of function that is only intended for a person with religious understanding who is considered capable. While public perception of kiai figures involved in politics practically does not result in a shift in community compliance. As well as the public's view of da'wah kiai politics remains in the optimistic space of healthy and clean politics.

**Keywords:** Perseption, Public, Kiai, Politics.

## I. PENDAHULUAN

Kiai dalam tradisi nusantara menjadi elemen sentral dalam dinamika kehidupan masyarakat (*society*), kondisi ini menjadi realitas sosial dan fakta sejarah yang tidak bisa diganggu gugat apalagi dibantahkan, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang notabena berpenduduk mayoritas islam.

Pengkultusan pada kiai didasari oleh beberapa faktor, diantaranya karena keyakinan penuh bahwa kiai adalah salah satu kunci menuju pemahaman ajaran islam. Pemahaman tentang islam tidaklah tunggal pada ranah aqidah semata, namun juga terintegrasi pada beberapa aspek kehidupan, termasuk pula dalam dunia politik itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekularisasi antara islam dengan politik ataupun sebaliknya merupakan sebuah penyelewengan dari pemahaman ajaran islam itu sendiri (Mul Khan 2009, 232).

Contoh sederhana, dapat terlihat di hampir semua sektor kehidupan masyarakat muslim, bagaimana seorang kiai menjadi pembimbing (*guide*) terkait penyelesaian problematika hidup (*Problem Solving*) masyarakat muslim, Seperti; permasalahan ekonomi, medis dan rumah tangga atau bahkan masalah politik. Keberadaan kiai di tengah komunitas masyarakat ini, tampil sebagai sosok dengan keistimewaan dan dianggap sebagai sumber keberkahan bagi masyarakat (Zamroni 2007, 274).

Berangkat dari eksistensi seorang kiai ditengah-tengah masyarakat, sosok kiai menyandang dua fungsi utama, yakni sebagai agamawan sekaligus sebagai pelayan sosial. Sebagai agamawan sudah menjadi barang tentu jika seseorang menyandang gelar tersebut memiliki tingkat pemahaman seputar keagamaan yang mumpuni, ini bisa terlihat dari bagaimana para kiai menjadi *leader* (pemimpin) dalam upacara keagamaan

yang dilaksanakan bersama masyarakat. Sedangkah sebagai pelayan sosial, terlihat dalam peran kiai dalam upaya pemecahan persoalan masyarakat, seperti sebagai tempat untuk berkonsultasi maupun sebagai sosok yang dimintai petunjuk terkait masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut, kiai mendapat kepercayaan dan perlakuan yang istimewa. Dalam sudut pandang sosiologi, kepercayaan serta kepatuhan terhadap sosok kiai (ulama), rupanya berada jauh diatas kepatuhan terhadap pejabat-pejabat formal (Kamilah and Oksiana Jatiningasih 2017, 740). Maka dengan bermodalkan dua otoritas di atas, para Kiai memfungsikan dirinya sebagai sarana untuk mendakwahkan islam di tengah-tengah masyarakat, dan memimpin mereka kearah yang tepat sesuai dengan garis-garis ketentuan ajaran syariat islam.

Posisi kiai sebagai teladan serta sebagai rujukan keagamaan bagi masyarakat dan juga santri-santrinya tentu menjadikan sosok kiai berada dalam zona yang strategis dan berperan besar bagi pengembangan masyarakat, karena tatanan sosial masyarakat yang terbentuk masih berpegang teguh pada nilai kepatuhan dan ketundukan pada kiai, sehingga perilaku yang ditunjukkan kiai senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat (*mauizah al hasanah*) (Azizzah 2003, 61).

Keterkaitan persoalan seputar agama dan politik, sudah sangat lama terjadi dan tercatat dalam sejarah islam, mengingat bahwa segala aspek yang ada, baik dari aspek kehidupan di dunia ataupun aspek kehidupan akhirat telah diatur oleh islam, sehingga dapat diyakini kebenarannya bahwa islam sebagai ideologi suatu Negara, walaupun konsep Negara islam itu sendiri tidak ada bentuk pastinya (Suhelmi 2002, 112). Maka keterlibatan seorang kiai dalam penerintahan diyakini sebagai bagian dari bentuk dakwah islamiyah.

Dalam persoalan politik, karisma kiai merupakan suatu yang menggoda bagi siapapun yang hendak berkuasa, akibatnya sering kali kiai didekati oleh para pejabat

untuk meraih simpati masyarakat. Untuk terus menerus menyambung keharmonisan kiai dan pejabat itu, para kiai sering menjadi mediator pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pemerintah (Haedari 2006, 22).

Namun dewasa ini, pandangan yang berkembang di tengah masyarakat politik diidentikkan dengan dunia kotor, sebagaimana yang selalu disosialisasikan secara massif oleh dunia massa, anggapan tersebut kini sudah menjadi persepsi umum yang hampir diimani & dikonfirmasi oleh semua lapisan masyarakat. Hal itu terjadi akibat perilaku oknum politik yang melakukan hal-hal yang bukan untuk kepentingan rakyat (bersama), melainkan lebih mementingkan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan pribadi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, pada akhirnya membuat banyak orang bersikap antipati terhadap politik dan beranggapan seolah-olah semua orang yang aktif dalam politik itu kotor (Dhakiri 2013, 2).

Melihat pandangan masyarakat tentang politik di atas, tampak bagaimana antara Kiai dan politik mengalami sebuah "crash (benturan)". Kiai dengan identitas kesakralannya yang penuh akan dimensi moral serta nilai keikhlasan, tanpa tendensi maupun ambisi. Sedangkan politik menjadi identik dengan hal yang profan, adanya kepamrihan, siasat hitam serta bermuatan politis dan tendensius. Sehingga terjadi sebuah kekhawatiran tersendiri akan sosok kiai menjadi alat politik, pemanis kelompok-kelompok tertentu akan berakibat pada dekadensi keistimewaan kiai seperti moralitas, ketulusan dan pengabdian pada masyarakat menjadi tereduksi atau bahkan hilang karena terkalahkan oleh kekuasaan (Ja'far 2009, 30).

Lantas bagaimana dengan kiai yang dianggap sebagai manusia suci jika terlibat dalam kancah perpolitikan yang belakangan dianggap kotor. Hal inilah yang kemudian menarik peneliti untuk mengetahui tentang bagaimana persepsi masyarakat akan



fenomena keterlibatan kiai dalam kancah berpolitikan, dimana kiai sering kali tampil & terlibat dalam kontestasi pemilihan umum, baik secara independen maupun diusung oleh kelompok tertentu, dalam hal ini khususnya persepsi masyarakat Dusun Karang Bentong, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, karena masyarakat di desa ini merupakan masyarakat yang masih berpegang pada nilai-nilai religius serta agamis, namun demikian juga dibarengi dengan munculnya kiai-kiai dari kampung tersebut yang terlibat dalam kancah berpolitikan praktis.

Penelitian lain seputar tentang Kiai dan Politik juga pernah dilakukan oleh Imam Suprayogo dengan judul *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*, penelitian ini memfokuskan diri pada sosok Kiai dalam mengemban peran-peran sosialnya, serta menelusuri jejak-jejak keterlibatan Kiai dalam politik. Penelitian lain yang serupa dengan pembahasan kiai politik juga dilakukan oleh Abdurrahman Jo, pada tahun 2010 yang dilakukan di Al-amien Prenduan, yang berjudul *Sikap dan Pandangan Para Kiai Al-amien Tentang Politik Praktis (studi fenomenologi tentang makna)*, yang menekankan pada pandangan para kiai al-amein tentang politik praktis (Jo 2008).

Perosalan kiai politik juga pernah dibahas oleh Zainuddin Syarif dalam penelitian yang berjudul *Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura*, dengan hasil penelitiannya yang berupa; pertama, Formula politik seorang kiai digunakan dalam upaya mempertahankan otoritas kepemimpinannya berdasarkan karakteristik tradisional serta karakteristik karismatik religius (Syarif 2016, 294). Dalam penelitian lain yang berjudul *Gerakan Politik Kiai dan Dakwah Islam: Membaca Aktivitas Dakwah Dan Politik Kiai Pada Momentum Pemilu*, yang ditulis oleh Fathor Rosi, dimana dalam hasil penelitiannya menyampaikan bahwa antara dakwah seorang kiai dan politik dapat dijadikan sebagai satu kesatuan, dan sebagai

wasilah dalam penyampaian ajaran islam, karena otoritas politik dapat mempengaruhi ruang gerak dakwah islamiyah (Rosi 2020, 233).

Orisinilitas dalam penelitian ini terletak pada masalah pemusatan persepsi atau anggapan masyarakat Dusun Sumber Bentong, Desa Karang Cempaka, tentang kiai politik yang berhubungan dengan peran dan dakwah kiai politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang tercermin dalam ungkapan madura; *Bhuppa' Bhappu', Ghuru, Rato* yang berarti Ibu, Ayah, Guru, & Penguasa. maka dari adagium tersebut tampak jelas terlihat bagaimana kepercayaan dan ketaatan masyarakat pada pemuka agama (kiai) menjadi poros yang tetap dijunjung tinggi.

## II. METODOLOGI

Dari judul dan permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, yakni dengan prosedur penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk memperjelas kesesuaian terkait teori-teori yang digunakan dengan praktek maupun perilaku yang ada di lapangan (Suginono 2008, 3).

Subjek penelitian dalam penelitian ini beberapa penduduk Dusun Sumber Bentong Karang Cempaka Kec. Bluto yang terdiri beberapa tokoh dan masyarakat setempat di Dusun Sumber Bentong ini.

Prosedur pengumpulan data lapangan yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, seperti observasi lapangan, wawancara (interview), serta Dokumentasi.

Setelah proses pengumpulan data dilakukan dan data terkumpul, dalam proses berikutnya peneliti melakukan Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dan sebagai langkah langkah penunjang dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan uji keabsahan data dengan cara penggunaan triangulasi, baik berupa

triangulasi sumber, maupun triangulasi teknik.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Pengertian kiai politik dalam masyarakat Dusun Sumber Bentong

Istilah kiai ataupun ulama merupakan pewaris para nabi serta mereka memiliki fungsi sebagai pemimpin, selain itu keberadaan kiai di tengah-tengah masyarakat pada umumnya kiai memiliki banyak peran, yaitu sebagai pemuka agama, dan pelayan sosial.

Sementara itu politik sendiri memiliki arti interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di dalam wilayah tertentu (Dhakiri 2013, 33). Artinya politik adalah dimensi kekuasaan yang mendapat legalitas publik, yang dalam hal ini berhubungan dengan pemerintahan, bagaimana sebuah pemerintahan itu berjalan dengan baik sesuai dengan koridor-koridor yang disepakati bersama.

*“Kiai politik sebagai kiai yang terjun dalam kancah politik praktis; artinya ada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan predikat kiai politik jika terlibat secara praktis pada salah satu level tersesbut”* (Fikri 2019)

Sedangkan sosok ataupun figur seorang kiai dalam politik mereka menjalankan perannya yang terkait dengan kepentingan umum melalui dunia politik secara langsung. Yang mana politik dijadikan sebagai salah satu wadah atau sarana dalam pengembangan dan penyebaran dakwah islam.

Pemahaman masyarakat Dusun Sumber Berntong tentang kiai politik adalah sebagai seorang tokoh agama, atau pemuka agama yang dianggap alim serta menjadi panutan bagi segenap masyarakat dalam praktek-praktek keagamaan, yang kemudian meneruskan kancah dakwahnya dengan melalui cara masuk dalam dunia pemerintahan (kekuasaan) melalui politik itu sendiri, mereka dianggap kapabel dan mampu untuk memimpin dan

mengurus sebuah kekuasaan, dengan tujuan politik sebagai sarana jembatan dalam dakwah islamiyah yang diembannya.

#### B. Persepsi atau pandangan masyarakat terhadap kiai yang terjun dalam politik

Perkembangan arus peran politik dalam dunia masyarakat paling tidak berhasil memunculkan dua pandangan sikap yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. *Pertama*, pandangan bahwa kiai tidak perlu terlibat dalam masalah politik, kiai adalah seorang penjaga rohani umat, karena itu seharusnya tidak memihak terhadap partai tertentu. Pandangan ini didasari pemikiran bahwasanya pondok pesantren adalah tempat mengaji ilmu agama dan sebagai sosialisasi dan pengejawantahan ajaran islam. pandangan *Kedua*, kiai sah dan boleh perpolitik, pandangan semacam ini berkeyakinan bahwa berpolitik tidak harus dihindari, sebab politik merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan itu sendiri dan ajaran islam memiliki kandungan menyeluruh dalam kehidupan, karenanya partisipasi kiai dalam politik selalu menjadi relevan (Suprayogo 2009, 43). Dan dianggap sebagai salah satu bentuk dakwah islamiyah, karena dakwah tidak selamanya harus di pondok pesantren dan dalam bentuk pengajian saja.

Ketika orang menyebut istilah politik, maka pengertiannya sering dikaitkan dengan masalah pemerintahan, kekuasaan, partai politik atau upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan warga Negara. Istilah politik sebenarnya memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan dan sebagai kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kiai sebagai elit agama selalu terlibat dalam kegiatan politik sebab kiai sebagai pemimpin masyarakat memerlukan otoritas, dan terlibat dalam peran sosial untuk kepentingan masyarakat.

*“Sangat setuju, asalkan kiai yang berpolitik itu jangan menghilangkan tugas pokoknya yaitu dakwah, politik hanyalah sarana dan jembatan*

untuk berdakwah, dan itu bagus” (Muzayyadi 2019).

Begitupun dengan pandangan dari beberapa informan lainnya, yang secara umum persepsi masyarakat Dusun Sumber Bentong terhadap kiai yang terjun dalam politik sangat baik dan mereka menganggap kiai itu sangat diperlukan kehadirannya dalam dunia politik, agar mampu menghilangkan stigma politik kotor, serta mampu mewarnai dunia perpolitikan menjadi politik yang bersih, kehadiran kiai diharapkan memberikan angin segar dan warna dengan kekuatan mental untuk menjaga integritasnya, tanpa harus menghilangkan tugas pokok utamanya yaitu dakwah, artinya kiai menjadikan politik sebagai jembatan untuk dakwah islam.

Sedangkan bentuk keterlibatan kiai dalam politik bisa bersifat ekspresif atau instrumental, ekspresif artinya apabila aktivitas yang di ambil oleh kiai cenderung mengeksploitasi dan memanipulasi simbol-simbol keagamaan maupun penggalangan massa. Sedangkan politik instrumental adalah politik yang menekankan efektivitas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik secara langsung (Suprayogo 2009, 47).

Disamping sosok kiai yang terjun ke dalam politik, diharapkan mampu menjadi pencerah bagi masyarakat dalam menentukan sikap dan pandangan masyarakat dalam hal berpolitik. Sehingga menjadi cerminan dan contoh bagi elit-elit politisi lainnya, sehingga dunia perpolitikan kembali kepada jalurnya. Sebagaimana dicontohkan dalam kisah nabi Muhammad dimana dukungan politik yang beliau peroleh dari segenap masyarakat Madinah yang dicontohkan oleh nabi dengan nabi berusaha untuk berdiri dan tampil di tengah-tengah masyarakat dengan peran mempersatukan mereka yang terlibat dalam konflik pada masa itu. Nabi Muhammad SAW mampu membuktikan dengan menyelesaikan segala konflik yang itu secara arif dan bijaksana sehingga semua pihak mendapat kepuasan (Amin 2015, 4).

Namun demikian, keterlibatan para kiai dalam politik praktik tentu akan melahirkan konsekuensi baru bagi masyarakat khususnya umat islam, hal tersebut dapat terlihat dari banyak dan bermunculannya partai, ormas dan kelompok berbasis islam dengan keterlibatan serta peran aktif kiai di dalamnya hal tersebut tentu menimbulkan permasalahan baru yaitu tereduksi dan terpecah-pecahnya suara masyarakat muslim yang berakibat pada kegagalan kiai dalam proses dakwah dalam pemerintahan (Qadir 2012, 288).

### **C. Pandangan masyarakat terhadap dakwah kiai politik di tengah-tengah masyarakat**

Secara etimologis dakwah berasal dari bahasa arab yang berarti panggilan, ajakan, seruan, atau ajakan, secara terminologis dakwah merupakan kegiatan menyeru maupun mengajak sesama umat islam, baik secara individu maupun kolektif, dengan tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam rangka mentaati dan mengikuti perintah allah SWT serta meningkatkan keimanan setiap individu agar mendapatkan ridha allah SWT (Moedjiono 2007, 6).

*“Bagi saya positif saja, jika hal itu menganjurkan pada kebaikan, dan selama tidak mencampur adukkan anatar jabatan politis yang dipegangnya dengan masalah keagamaan”*( Subaidi 2019).

Penyampaian dakwah dapat menggunakan beberapa di tengah-tengah masyarakat. Pertama, menggunakan metode *bil-khitobah* yakni proses dakwah yang menggunakan *al-ittisholatul lisaniah* dan *al-ittisholatul isyariayah* (komunikasi verbal dan non verbal). Kedua menggunakan metode *bil-kitabah* atau proses dakwah yang menggunakan sarana tulisan. Sedangkan yang ketiga menggunakan metode *bil-hal* atau proses dakwah melalui tindakan langsung sesuai kapasitas, dan kemampuan masing-masing.

Posisi kiai sebagai elit agama yang berpengaruh, menjadikan mereka terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, kepemimpinan, penyelesaian

problem-problem sosial, dan pengembangan masyarakat (Suprayogo 2009, 4), lebih jauh dari itu kiai yang terjun pada dunia politik dalam pandangan masyarakat Dusun Sumber Bentong Desa Karang Cempaka, beranggapan bahwa pengembangan dakwah bisa dilakukan dalam kekuasaan pemerintahan, karena dakwah akan lebih mudah dan berhasil jika didukung dengan kekuasaan dan politik menjadi jembatan dakwah kiai artinya keterlibatan kiai dalam politik merupakan dalam rangka kegiatan dakwah islamiyah.

Tiga metode dakwah yang dapat digunakan ditengah-tengah masyarakat. Pertama, menggunakan metode *bil-khitobah* yakni proses dakwah yang menggunakan *al-ittisholatul lisaniah* dan *al-ittisholatul isyariayah*. Kedua menggunakan metode *bil-kitabah* atau proses dakwah yang menggunakan sarana tulisan. Sedangkan yang ketiga menggunakan metode *bil-hal* atau proses dakwah melalui tindakan langsung sesuai kapasitas, dan kemampuan masing-masing.

Dusun Sumber Bentong Desa Karang Cempaka masih termasuk dari masyarakat pedesaan, dan dalam masyarakat pedesaan dakwah yang paling efektif untuk dilakukan ditengah-tengah masyarakat dengan menggunakan metode *bil-lishan* serta *bil-hal*, dalam prakteknya kiai politik tetap menggunakan metode dakwah tersebut ditengah masyarakat karena konsep "*samikna wa atoknah*" masih melekat pada masyarakat Dusun Sumber Bentong, sehingga masyarakat dapat menerima dakwah yang disampaikan oleh kiai politik selama kontennya tentang agama dan tidak melanggar norma agama dan Negara.

Sebagai salah satu contoh dari dakwah seorang Kiai politik, sebagai orang yang menjadi panutan masyarakat dengan menjalankan fungsi ganda, yaitu fungsi agamawan *ulama'* dan fungsi pemimpin *umara'*, mestinya menjadi pengawal melanjutkan pemberantasan "*money politics*", bukan malah melegalkan "*money politics*" tersebut, mengingat salah satu kewajiban dari seorang

kiai ialah penegakan "*amar ma'ruf nahi mungkar*" (Suharto 2011, 95). Maka dengan demikian tindakan dari seorang kiai tersebut dalam dunia politik merupakan salah satu bentuk dakwal, berupa pengajaran dan wujud aplikatif dari kampanye penegakan politik moral.

#### IV. PENUTUP

Pemaknaan istilah kiai yang menjadi tanda dan tersemat pada sosok tertentu mengalami sirkulasi penyempitan sehingga dalam kondisi sekarang sebutan atau istilah kiai hanya menjadi gelar tunggal bagi sosok yang agamawan muslim saja dengan segala keistimewannya. Begitu pula dengan pemaknaan istilah tersebut di tengah-tengah kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Dusun Sumber Bentong, Desa Karangcempaka Sumenep, tetap dan selalu menduduki singgasana keistimewaan bagi segenap penduduk di sana, yakni seorang tokoh agama yang mumpuni keilmuannya dan menjadi pemimpin dalam upacara-upacara keagamaan yang berlangsung

Kehadiran sosok kiai dalam kancah perpolitikan disambut positif dengan keantusiasan masyarakat Dusun Sumber Bentong terhadap kiai yang terjun dalam politik serta menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka dengan harapan keberadaan kiai itu sangat diperlukan kehadirannya dalam dunia politik, agar mampu menghilangkan segala persepsi ataupun stigma negative yang melekat, dan menjadikan warna dunia perpolitikan menjadi politik yang ideal.

Keterlibatan kiai dalam dunia politik bukanlah sebuah fenomena baru, sebab dalam ajaran dan sejarah keislaman itu pembahsan seputar perpolitikan itu sendiri memang dibahas baik secara implisif ataupun ekplisit, karena memang dengan jalan itulah penyebaran dakwah islamiyah tetap dapat terjaga keberlangsungannya dan memperoleh kemudahan dalam implementasi dakwah islamiyah. Maka walaupun dalam keabuan, dunia politik tetaplah harus menjadi

jalan dan lahan yang diperjuangkan oleh para kiai sebagai sosok yang mendapat legitimasi otoritas keagamaan dari masyarakat dalam pengembangan sayap dakwah islamiyah

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Nasihun. 2015. *Paradigma Teologi Politik Sunni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizzah, Nurul. 2003. *Artikulasi Politik Santri Dari Kyai Menjadi Bupati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhakiri, Moh. Hanif. 2013. *Pedoman Berpolitik Warga NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fikri, Ali. 2019. *Dalam Wawancara Dengan Peneliti*. Dusun Sumber Bentong.
- Haedari, Amien. 2006. *Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modern*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Ja'far, Suhermanto. 2009. *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Jo, Abdurrahman. 2008. "Sikap Dan Pandangan Para Kiai Al-Amien Tentang Politik Praktis (Studi Fenomenologi Tentang Makna)." Prenduan: Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan.
- Kamilah, and Oksiana Jatiningsih. 2017. "Sosok Kiai Dalam Konstruksi Intelektual Muda Bangkalan." *Kajian Moral & Kewarganegaraan* 5 No. 3 Jilid 1.
- Moedjiono, Imam. 2007. *Metode Dakwah Praktis*. Yogyakarta: As-Salam Press.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2009. *Politik Santri, Cara Menang Merebut Hati Rakyat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Muzayyadi. 2019. *Dalam Wawancara Dengan Peneliti*. Dusun Sumber Bentong.
- Qadir, Zuly. 2012. *Sosiologi Politik Isla, Konsetstasi Islam Politik & Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosi, Fathor. 2020. "Gerakan Politik Kiai Dan Dakwah Islam: Membaca Aktivitas Dakwah Dan Politik Pada Momentum Pemilu." *At-Thurost: Journal of Islamic Studies* 07 & No. 02.
- Subaidi, Ahmad. 2019. *Dalam Wawancara Dengan Peneliti*. Dusun Sumber Bentong.
- Suginono. 2008. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Babun. 2011. *Dari Pesantren Untuk Ummat, Eksistensi Pesantren Di Era Globalisasi*. Surabaya: IMTIYAZ.
- Suhelmi, Ahmad. 2002. *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Nasir*. Jakarta Selatan: Penerbit Teraju.
- Suprayogo, Imam. 2009. *Kiai & Politik, Membaca Citra Politik Kiai*. Malang: UIN-Malang Press.
- Syarif, Zainuddin. 2016. "Pergeseran Perilaku Politik Kiai Dan Santri Di Pamekasan Madura." *At-Thahir* 16 No. 2 (November): 294-312.
- Zamroni, Imam. 2007. "Juraga, Kiai Dan Politik Di Madura." *UNISIA* 30 No. 65 (September).



# Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Nihayatus Sholichah, Charity Oktoliya

Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
ninis.fadillah@gmail.com

## ABSTRACT

Community empowerment through the management of dairy cattle is one of the flagship programs of the Magetan Regency Government which aims to improving the economy of the people of Kampung Susu Lawu who incidentally are dairy farmers so that farmers can spread their wings in marketing the livestock products they have managed through this empowerment after that. This paper means to reveal and analyze data: 1) the process of community empowerment through the management of dairy farms in the Susu Lawu village, Sarangan sub-district, Plaosan sub-district, Magetan district, and 2) community empowerment evaluation through the management of dairy farms in the Susu Lawu village, Sarangan sub-district, Plaosan sub-district. magnet district. This paper was conducted using a qualitative case study approach. Data collection techniques used are: (1) observation, (2) interviews, and (3) documentation. This paper had result that indicate if: (1) The process of Community Empowerment through the management of dairy farms in the Susu Lawu Village, Sarangan Sub-district, Plaosan District, Magetan Regency is generally quite mature in terms of planning by selecting activities based on the priority needs of community groups. In general, its implementation can support the success of the Empowerment Program through the management of dairy farms and improve the community's economy. (2) Evaluation through the management of dairy farms in the Susu Lawu Village, Sarangan Sub-district, Plaosan District, Magetan Regency is quite successful in developing skills and increasing the income of community groups.

**Keywords :** *Community Empowerment, Dairy Farm Management*

## I. PENDAHULUAN

Virus corona sudah memberikan perubahan pada bermacam-macam segi kehidupan bermasyarakat termasuk pada negara Indonesia, bermula dari tingkatan nasional sampai dengan tingkat desa. Desa sendiri adalah sebagai gerbang depan untuk menyalurkan bantuan dari pemerintahan untuk masyarakat di desa ketika pandemic berikut berlangsung, berdasarkan hal tersebut maka adanya pengalaman dari desa mampu menjadi sebuah studi pembelajaran untuk kita. Seperti yang kita ketahui di tanggal 31 Desember 2019, *World Health Organization* pada Negara China membuat sebuah laporan akan kasus pneumonia yang tak diketahui etiologi dari kasus itu sendiri pada Kota Wuhan, Provinsi Hubei China, dan di tanggal 7 Januari 2020, Cina memberikan identifikasi

pneumonia yang tak diketahui etiologi dari hal itu sendiri selaku jenis baru corona virus, dan akhirnya do tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* melakukan penetapan pada virus corona selaku kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadikan resah di seluruh belahan bumi. Penambahan jumlah kasus virus corona terselenggara pada periode waktu yang cukup cepat serta telah tersebar antar negara mencakup pada negara Indonesia, di Indonesia kasus virus corona terus bertambah secara cepat dari suatu tempat kepada tempat lainnya yang menjadikan masyarakat harus membatasi aktivitas diluar rumah akibatnya penyebaran virus corona bisa memberikan penekanan pada tingkatan kesejahteraan warga desa seperti keluarga pelaku serta pekerja Usaha Kecil dan Menengah, serta pekerja yang bergaji rendah dalam usaha skala besar atau menengah kepada tingkatan

yang lebih rendah, bahkan ke tingkat dibawah garis kemiskinan. Banyaknya keluarga yang hampir jatuh miskin, dan sangat miskin sebab pengaruh dari virus corona pada kegiatan operasional dari usaha kecil ataupun mikro, serta pekerja yang dirumahkan dalam bermacam-macam sektor ekonomi formal serta informal (Budastra, 2020:48-57).

Kemiskinan ialah sebuah permasalahan pada bidang sosial yang tak bisa terlepas dari kehidupan bangsa Indonesia. Kemiskinan menjadi sebuah permasalahan yang kronis yang memiliki keterkaitan pada permasalahan pengangguran serta kesenjangan sosial yang mampu memunculkan sebuah masalah sosial. Upaya guna menanggulangi permasalahan pada bidang kemiskinan ialah tugas dari pemerintah baik pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Maka dari persoalan tersebut, diperlukanterdapatnyaseluruhpihak yang mendukung ketika memberjalankan program penanggulangan kemiskinan. Program-program penanggulangan kemiskinan itu sendiri sudah dilakukan pengaturannya pada PerDa Kota Magetan No. 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Magetan. Berdasarkan Laporan Bappeda Kota Magetan tentang Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Magetan Pemerintah Kota Magetan melakukan upaya untuk mempercepat upaya untuk menanggulangi kemiskinan menengok tinggi angka kemiskinan pada Kota Magetan. Di tahun 2018 – sekarang Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sudah memberjalankan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin pada Dusun Singolangu atau sekarang disebut dengan Kampung Susu Lawu itu sendiri. Ketika melaksanakan program itu sendiri tak seluruh warga menghadiri penyelenggaraan program sebab profesi masyarakat dominan pada profesi itu petani dan buruh tani namun sebagian masyarakatnya juga berprofesi sebagai peternak sapi perah. Berdasarkan hal tersebut menjadikan pola pikir warga yang miskin yang tak turut serta pada

program untuk menanggulangi kemiskinan itu sendiri implikasi dari program itu kurang mempengaruhi ketika memberikan solusi agar masyarakat terbebas dari kemiskinan. Selain hal tersebut, masyarakat miskin pada Dusun Singolangu mempunyai tingkatan pendidikan masihlah rendah. Modal berapapun besarnya dapat habis sebab masyarakat tak pintar untuk melakukan pengelolaan akan keuangan. Begitupun pada program yang sudah dilakukan pada Kampung Susu Lawu aktivitas yang sudah dilakukan tak terdapat sebuah sinkronisasi di antaranya terdapat pada aktivitas untuk mengolah makanan dimana terdapat masyarakat miskin yang memperoleh bantuan tak diberi suatu pelatihan guna melakukan pemasaran ataupun promosi pada produknya. Di samping hal tersebut produk yang dibuat oleh masyarakat tak memiliki sebuah merek dagang. Ketidak mampuan melakukan persaingan menggunakan produk yang sudah semenjak lama teredar di masyarakat dikarenakan pangsa pasar yang belumlah kuat. Di samping hal tersebut, masyarakat pun belumlah mengetahui bagaimanakah metode guna mengembangkan produknya. Masyarakat miskin belumlah sanggup melakukan inovasi pada produk yang sudah dibuat.

Evaluasi ialah sebuah usaha guna melakukan penentuan akan manfaat ataupun kegunaan sosial dari sebuah kebijakan ataupun program. Maka dari hal tersebut, ketepatan tujuan serta target dari sebuah kebijakan bisa selalu dipertanyakan, sehingga kegiatan mengevaluasi pun berkenaan bersama prosedur guna memberikan evaluasi tujuan serta target kebijakan. Kedua, interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi bergantung pada fakta dan nilai. Guna memastikan bahwasanya kebijakan ataupun program sudah meraih kinerja yang paling tinggi, dibutuhkan tak hanya hasil-hasil kebijakan berharga untuk beberapa individu, kelompok, ataupun masyarakat; tetapi juga hendaknya ditunjang oleh sejumlah bukti bahwasanya dengan aktual ialah sebuah



konsekuensi dari aksi yang dilaksanakan guna melakukan pemecahan akan permasalahan tertentu. Ketiga, orientasi saat ini juga masa lalu..

Tuntutan evaluatif memiliki perbedaan jika dilakukan perbandingannya bersama tuntutan advokatif. Evaluasi lebih ditujukan kepada hasil saat ini serta pada masa lalu daripada hasil di masa mendatang. Evaluasi memiliki sifat yang retrospektif serta sesudah aktivitas ataupun kegiatan tersebut dilaksanakan. Keempat, dualitas nilai. Nilai-nilai yang menjadi dasar dari tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda. Nilai dianggap memiliki tujuan sekaligus metodenya. Dalam hal ini, evaluasi serupa bersama rekomendasi sejauh berkaitan bersama nilai yang terdapat bisa dirasa selaku sesuatu yang intrinsik ataupun ekstrinsik. Nilai-nilai dilakukan penataannya pada sebuah hierarki yang melakukan refleksi akan kepentingan relatif dan saling bergantung antara tujuandan sasaran.

Fungsi evaluasi kebijakan publik berdasar dari opini Dwijowijoto (2011: 463) mempunyai 4 fungsi, ialah “eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting”. Dengan melaksanakan upaya mengevaluasi bisa digambarkan sebuah realita penyelenggaraan program serta generalisasi mengenai pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang dilakukan pengamarannya. (1) Eksplanasi, evaluator mampu memberikan indentifikasi akan permasalahan, keadaan, serta aktor yang menunjang kesuksesan maupun gagalnya dari sebuah kebijakan; (2) Kepatuhan, dengan melaksanakan upaya mengevaluasi bisa mengerti apa tindakan para pelaku, baik birokrasi ataupun pelaku yang lain, disesuaikan bersama standar prosedur yang dilakukan penetapannya oleh kebijakan; (3) Audit, dengan melaksanakan upaya mengevaluasi bisa mengerti, apa *output* sungguh-sungguh tersampaikan pada kelompok saran kebijakan, ataupun terdapat sebuah penyimpangan maupun kebocoran; (4) Akunting, dengan melaksanakan upaya

mengevaluasi bisa mengerti apakah akibat ekonomi dari kebijakan itu sendiri.

Evaluasi kinerja kebijakan dilaksanakan guna memberikan penilaian akan hasil yang diraih oleh sebuah kebijakan sesudah kebijakan tersebut dilaksanakan penyelenggaraannya. Hasil yang diraih bisa dilakukan pengukurannya pada ukuran jangka pendek ataupun output, jangka panjang ataupun *out come*. Evaluasi kinerja kebijakan melalui melaksanakan penilaian komprehensif pada:

- 1) Mencapai target (output)
- 2) Mencapai tujuan kebijakan (outcome)
- 3) Kesenjangan (gap) antar target serta tujuan bersama pencapaian
- 4) Perbandingan (benchmarking) menggunakan kebijakan yang serupa pada lokasi lainnya yang sukses menerapkan kebijakan tersebut.
- 5) Identifikasi faktor penunjang kesuksesan ataupun ketidakberhasilan yang menjadi penyebab adanya kesenjangan, serta memberi rekomendasi guna memberikan penanggulangan akan kesenjangan.

Tiga fungsi itu sendiri memperlihatkan sebuah peran penting dari mengevaluasi suatu kebijakan yang dilaksanakan supaya tahapan kebijakan dengan menyeluruh bisa terlaksana dengan baik. Berdasar dari Lester & Stewart dalam Winarno (2008: 227), evaluasi kebijakan bisa dilakukan pembedaannya pada 2 dua tugas yang tidak sama. Tugas pertama ialah guna melakukan penentuan akan konsekuensi-konsekuensi apakah yang diciptakan oleh sebuah kebijakan melalui metode memberikan gambaran pada dampak. Sementara itu, tugas kedua ialah guna memberikan penilaian akan kesuksesan ataupun gagalnya sebuah kebijakan menurut standar ataupun kriteria yang sudah ditentukan terdahulu.

Tugas pertama tertuju dalam usaha guna mengamati apa program kebijakan publik meraih tujuan ataupun pengaruh yang dikehendaki maupun tak dikehendaki. Jika tidak, faktor apakah yang mempengaruhinya.

Contohnya, apa disebabkan adanya kasalahan ketika melakukan perumusan akan permasalahan ataupun disebabkan oleh beberapa faktor lainnya. Tugas kedua pada evaluasi kebijakan secara mendasar memiliki keterkaitan yang sangat rekat bersama tugas pertama. Sesudah diketahui beberapa konsekuensi dari adanya kebijakan dengan menggambarkan pengaruh dari kebijakan publik, kemudian dapat diketahui apa program kebijakan yang diselenggarakan sesuai ataupun tak sesuai pada pengaruh yang dikehendaki. Berdasarkan hal tersebut dapat dinilai apa program yang dilaksanakan mengalami kesuksesan ataupun kegagalan. Melalui hal tersebut, tugas kedua pada kegiatan mengevaluasi kebijakan yakni memberikan penilaian apa sebuah kebijakan sukses ataupun gagal ketika mencapai pengaruh yang dikehendaki. Berdasarkan dua persoalan yang dijabarkan, kemudian bisa menyimpulkan tentang makna penting dari kegiatan mengevaluasi pada kebijakan publik. Pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya sebuah kebijakan untuk mencapai pengaruh yang dikehendaki bisa menjadi pedoman guna melakukan perubahan ataupun memberikan perbaikan pada kebijakan pada masa mendatang. Ada berbagai alasan guna memberikan jawaban kenapa diperlukan adanya aktivitas mengevaluasi kebijakan. Alasan itu sendiri bisa digolongkan jadi 2 dimensi, internal serta eksternal. Yang memiliki sifat internal, di antaranya:

- 1) Guna tahu akan kesuksesan dari sebuah kebijakan. Melalui terdapatnya evaluasi kebijakan bisa ditemui sebuah informasi apa sebuah kebijakan berhasil maupun tak berhasil.
- 2) Guna tahu akan tingkat keefektivitasan dari sebuah kebijakan. Aktivitas mengevaluasi suatu kebijakan bisa menilai apa sebuah kebijakan meraih tujuan ataupun kebalikannya.
- 3) Guna memberikan jaminan akan menghindari mengulangi kesalahan

(*guarantee to non recurrence*). Informasi yang mencukupi mengenai nilai suatu hasil kebijakan secara otomatis dapat memberi rambu supaya tak mengulang kesalahan yang serupa pada proses mengimplementasikan kebijakan yang sama ataupun kebijakan lainnya di masa mendatang.

Sementara itu, alasan yang mempunyai sifat eksternal setidaknya bagi 2 kepentingan:

- 1) Guna memberikan pemenuhan akan prinsip akuntabilitas publik. Aktivitas penilaian pada kinerja kebijakan yang sudah dilakukan pengambilannya ialah satu di antara beberapa wujud dari pertanggungjawaban pembuat kebijakan pada publik, baik yang berkaitan dengan langsung ataupun tak langsung menggunakan implementasi tindakan kebijakan.
- 2) Guna mensosialisasikan manfaat dari adanya suatu kebijakan. Melalui terdapatnya aktivitas mengevaluasi kebijakan, masyarakat luas, terkhusus kelompok sasaran serta penerima, bisa tahu akan manfaat dari adanya suatu kebijakan dengan lebih terukur.

William N. Dunn (2003: 609) mencetuskan kriteria-kriteria rekomendasi kebijakan yang serupa bersama kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan meliputi:

- 1) Efektifitas (*effectiveness*). Berkaitan bersama apa sebuah alternatif meraih hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
- 2) Efisiensi (*efficiency*). Berkaitan bersama jumlah usaha yang digunakan menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha,

yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

- 3) Kecukupan (adequacy). Berkaitan bersama seberapa jauhnya sebuah tingkatan keefektifitasan memberikan pemuasan akan kebutuhan, nilai, ataupun peluang terciptanya sebuah permasalahan. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- 4) Perataan (equity). Berkaitan bersama rasionalitas legal serta sosial juga mengarah pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.
- 5) Responsivitas (responsiveness) berkaitan bersama seberapa jauhnya sebuah kebijakan mampu memberikan kepuasan akan kebutuhan, preferensi, ataupun nilai dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Karakteristik responsivitas memiliki peran penting sebab analisis yang bisa memberikan kepuasan pada seluruh kriteria yang lain seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masihlah mengalami kegagalan apabila belumlah memenuhi kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya memperoleh keuntungan yang disebabkan oleh keberadaan dari sebuah kebijakan.
- 6) Ketepatan (appropriateness). Kriteria ketepatan dengan dekat memiliki

hubungan bersama rasionalitas, substantif, sebab pertanyaan mengenai ketepatan kebijakan tak berkenaan bersama satuan kriteria perorangan namun 2 ataupun lebih karakteristik dengan bersama-sama. Ketepatan tertuju kepada nilai ataupun harga dari tujuan program serta pada kekuatan atas asumsi yang menjadi landasan dari beberapa tujuan itu sendiri.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan memiliki tahapan-tahapan serta berkesinambungan sudah sukses dalam memberikan perbaikan pada keadaan perekonomian baik pada skala regional atau kerjasama antara suatu daerah dengan daerah lain maupun nasional atau kerjasama ditingkat nasional. Perbaikan keadaan perekonomian itu sendiri bisa dijalani melalui melakukan pemanfaatan pada SDA ataupun SDM. SDM ialah persoalan yang penting pada pembangunan, sebab SDM yang rendah membuat keadaan masyarakat kurang sanggup untuk mengamati dan juga memberikan solusi pada permasalahan pada kehidupan yang selanjutnya dapat membuat sebuah dampak kepada bidang pengangguran, maka berdasar dari hal tersebut, pengembangan ataupun pemberdayaan manusia ialah persoalan yang wajib erta hendaknya dilaksanakan.

Pembangunan ialah sebuah serangkaian usaha memberikan perwujudan akan pertumbuhan serta perubahan dengan terencana serta sadar yang ditempuh oleh sebuah negara bangsa menuju ke modernitas dengan tujuan membina bangsa. Serta pada bermacam-macam bidang mencakup pembangunan pada bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan juga pertahanan serta keamanan. Pada keterkaitannya bersama pembangunan ekonomi, dalam era otonomi daerah layaknya sekarang, melakukan perwujudan pada pembangunan nasional kepada bidang ekonomi tak hanya menjadi pertanggungjawaban dari pemerintahan pusat namun juga daerah, persoalan berikut menjadi akibat terdapatnya desentralisasi

yang menjadikannya menuntut kepada pemerintahan pusat memberi sebagian wewenang pada Pemerintahan daerah ketika melakukan pengaturan serta pembangunan pada potensi setiap daerah.

Akan tetapi pemerintahan daerah belumlah dengan optimal melakukan usaha guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebuah daerah hendaknya dilakukan perencanaan dengan matang serta optimal bersama beberapa program yang bisa dipakai guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang menjadikannya disesuaikan bersama tujuan pembangunan daerah yaitu guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Pembangunan yang dilakukan tak hanya bertujuan guna melakukan pengejaran pada pertumbuhan ekonomi akan tetapi pun hendaknya ditujukan supaya perkembangan itu sendiri bisa diperoleh hasil dengan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukan perencanaan dari sebuah daerah, namun perencanaan bagi sebuah daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta secara bertanggung jawab.

“Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. (Kuncoro, 2004:46). dan diperlukan berbagai upaya inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Diantara yang dapat dilakukan, yaitu dengan program pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:74) menjelaskan, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan

*community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat).”

“Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks atau sering terjadi, seperti masalah perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang selalu terjadi saat menjalankan sebuah organisasi. Dan pembangunan juga memiliki banyak aspek misalnya aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Pada masa orde baru pembangunan masyarakat dilakukan dengan menggunakan program dari negara yang di fokuskan atau di sentralkan. Dimana pembangunan masyarakat dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri baik dengan dukungan dalam negeri (kemampuan) maupun dukungan dari negara - negara maju ataupun organisasi internasional.”

“Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku yang dimulai dari mengubah mindset individu dan masyarakat. Pengetasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat karena masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak diatas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.”

“Untuk itu pemberdayaan tidak lepas dari beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat oleh karena itu pemerintah harus benar-benar mempersiapkan dengan matang semua kegiatan pemberdayaan masyarakat sebelum dimulai.”

“Menurut Chambers dalam (Kartasasmita, 1996:142) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable”. Lebih jauh Chambers menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat saja tetapi

lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekomoni lokal.”

Menurut Kuncoro (2004:38) “Dengan otonomi daerah, ada tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Otonomi kemudian diidentikkan dengan *automoney*. Artinya, otonomi diterjemahkan semata-mata dari upaya meningkatkan proporsi PAD terhadap APBD. Dalam praktek, otonomi berarti upaya penggalakan, penggalangan, dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dengan cara apapun.”

“Alasan memilih Kabupaten Magetan sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Magetan adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang banyak memiliki sumber daya yang cukup melimpah. Kabupaten Magetan mempunyai 19 kecamatan yang terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Dengan ibu kota Kabupaten. yang terletak di kecamatan Magetan. Secara geografis kabupaten Magetan terletak di bagian Barat Provinsi Jawa Timur. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi., bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magetan pada tahun 2018 mencapai 64,860 jiwa. Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa penduduk miskin di kabupaten Magetan masih dalam tingkatan yang tinggi, maka dalam desa Magetan dapat juga menerapkan program dari pemerintah. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat maka akan dapat mengurangi kemiskinan terutama pada pedesaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan program yang dapat dibuat pemerintah untuk bisa membangun suatu daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemberdayaan suatu daerah bisa di lakukan dengan memfasilitasi permodalan bagi Usaha

Mikro kecil dan Menengah di pedesaan, meningkatkan juga partisipasi masyarakat guna membangun desa,dll.”

“Magetan juga memiliki banyak potensi alam yang belum diketahui masyarakat luas khususnya masyarakat pedesaan. Salah satu kawasan yang mempunyai potensi dan dapat dikembangkan menjadi kawasan wira usaha yaitu masyarakat di dusun singolangu atau sekarang lebih dikenal dengan kampung susu lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan. Dusun ini memiliki potensi yaitu sebagai tempat yang menghasilkan banyak sekali sumber daya alam yaitu sayur-sayuran san sebagainya. Namun yang menarik dari dusun ini yaitu mayoritas penduduknya menekuni bidang peternakan sapi perah yang selanjutnya di produksi dalam berbagai macam olahan susu, misalnya permen susu.”

“Potensi kampung susu ini dapat dilihat dari segi fisik dan non fisik. Potensi fisik meliputi, tanah, air, iklim, flora, dan fauna. Potensi non fisik pada kampung susu ini adalah lembaga-lembaga sosial desa dan aparatur desa, begitu banyak potensi di kampung susu dusun singolangu ini. Potensi tersebut dapat di kembangkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya dengan mengembangkan potensi peternakan yang ada di kampung susu lawu tersebut dan potensi lainnya.”

“Pembangunan ekonomi masyarakat kabupaten Magetan terkait dengan pengelolaan peternakan sapi perah, diharapkan pembangunan sektor usaha ini menunjukkan adanya peningkatan dari jumlah unit usaha, tenaga kerja dan nilai investasi. Peningkatan jumlah usaha ini dibarengi dengan perhatian dan pembinaan yang cukup dari pemerintah kabupaten terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya maupun kemampuan pendanaan usahanya.”

Penelitian ini di fokuskan kedalam Evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah di kampung susu lawu. Karena ingin mengetahui

bagaimana tindakan pemerintah serta bagaimana evaluasi terhadap program ini selain itu warga dusun Singolangu banyak bermata pencaharian sebagai petani dan peternak sapi perah, disini pemerintah lebih bisa meningkatkan kualitas penduduk/warga dusun singolangu melalui pemberdayaan pengelolaan peternakan. Sehingga dari pemberdayaan tersebut bisa menghasilkan skill atau keterampilan baru serta bisa memperluas pengetahuan para peternak sapi perah agar kualitas susu dari peternakan tersebut bagus. Selain itu agar Kampung Susu Lawu bisa menjadi tempat wisata pendamping dari wisata Telaga Sarangan yang letaknya tidak jauh dari lokasi Kampung Susu Lawu. Konsep pemberdayaan hampir menjadi agenda kerja tiap pemerintahan. Baik dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan desa yang memberikan naungan pada satuan kerja masyarakat paling kecil. Adanya konsep pemberdayaan berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah dikeluarkan sebagai umpan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari konsep yang ditawarkan masyarakat mampu mandiri serta menyesuaikan dengan potensi yang dipunya oleh masyarakat.

## II. METODOLOGI

Penelitian berikut menerapkan metode kualitatif “dalam penelitiannya. Adapun alasan kenapa dipilih metode kualitatif adalah, karena masalah penelitian ini masih belum jelas atau atau belum ada data yang cocok tentang masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan eksplorasi terhadap objek penelitian. Dengan memfokuskan pada tujuan mengenai yakni mafaat, serta faktor yang mempengaruhi dari objek penelitian, dimana objek dari penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat.”

“Berdasarkan hal tersebut, tentu kurang pas jika diterapkan pada metode kuantitatif yang mana lebih menekan pada pembuktian

hipotesis dengan menggambarkan fenomena melalui angka dan statistika. Penelitian ini menetapkan posisinya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif yang dilakukan pada situasi sosial (*social situation*) yang mana melibatkan tempat, pelaku, dan aktivitas (*place, actor, activities*) yang berinteraksi secara sinergis dari objek penelitian. Sehingga akan ditemukan data yang murni dari apa yang terjadi dilapangan.”

Fokus kajian penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan. Serta Bagaimana evaluasi terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan. Pada fokus tersebut akan diteliti menggunakan teori William N. Dunn yang memiliki enam variabel yaitu Efisiensi, Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan yang terakhir adalah Ketepatan. Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena teori tersebut relevan dengan variabel yang dipakai serta permasalahan yang ada dari sasaran penelitian ini. digunakan. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara, Teknik Dokumentasi dan Teknik Observasi.

## III. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

“Dalam Studi analisis kebijakan publik, maka salah satu cabang bidang kajiannya adalah Evaluasi Kebijakan. Mengapa Evaluasi Kebijakan dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (*public policy*) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan direncanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan kependudukan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya: pelaksanaannya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri itu memang jelek (bad policy) atau kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik (bad luck). Adapun telaah mengenai dampak atau evaluasi kebijakan adalah dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada "implementasi kebijakan".

"Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya."

"Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang." Sinyal tersebut lebih diperjelas oleh Dolbeare (1975: 95) dijelaskan bahwa: "Policy impact analysis entails an extension of this research area while, at the same time, shifting attention toward the measurement of the consequences of public policy. In other words,

as opposed to the study of what policy causes". Dengan demikian yang didefinisikan oleh Dye (1981: 366), secara singkat analisis dampak kebijakan "menggaris bawahi" pada masalah what policy causes sebagai lawan dari kajian what causes policy.

Konsep evaluasi dampak yang mempunyai arti sama dengan konsep kebijakan. "Policy evaluation is learning about the consequences of public policy". Adapun definisi yang lebih kompleks oleh Wholey dalam Dye (1981: 366) adalah sebagai berikut: "Policy evaluation is the assesment of the overall effectiveness of a national program in meeting its objectives, or assesment of the relative effectiveness of two or more programs in meeting common objectives" Evaluasi Kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara "policy impact/outcome dan policy output. "Policy Impact/outcome" adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan melalui pelaksanaan sebuah kebijakan.

## **B. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan**

"James Anderson dalam Winarno (2008: 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:"

- a. "Tipe Pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri."
- b. "Tipe Kedua Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program."
- c. "Tipe Ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat

secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.”

“Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah dengan cara melihat hasil pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2015 Menurut Edi Suharto (2012:61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial selalu berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.”

Menurut Edi Suharto (2012: 86), model-mod dalam analisis kebijakan publik adalah:

- a. “Model Prospektif ialah wujud kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif.”
- b. “Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampakdampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.”
- c. “Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik

sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan Berdasarkan pada ketiga tipe evaluasi kebijakan diatas maka nantinya peneliti akan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan.”

### C. Dimensi Evaluasi Kebijakan

“Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2002: 171- 174) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: ”

- a. “Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
- b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaankeadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaankeadaan sekarang dan yang akan datang
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai programprogram kebijakan publik
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.”

“Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu: ”

- a. “Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan



menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.

- b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
- c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakandiupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.”

“Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.”

#### **D. Pemberdayaan Masyarakat**

“Pemberdayaan menurut Webster dalam *Oxford English Dictionary* (Sedarmayanti, 2000: 78) adalah terjemahan dari kata empowerment yang mengandung dua pengertian : (1) to give power to (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain), (2) to give ability, to enable (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya di suatu kondisi

atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.”

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang - orang yang kurang beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana manusia menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana masyarakat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya.

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi (2007:42) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata.

Menurut Widjaja (2002:77) pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawaran bawah yang intinya pemberdayaan upaya membnagkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta mandirian, maksudnya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai

masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurut Soeharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Widjaja.2003:169).

“Menurut Eko (2004:11) Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat. Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat. Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan dan program serta kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.”

“Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat berkemampuan dan

berkekuatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat.”

Menurut Soeharto (2006:61) peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan social ekonomi harus menganut beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*).
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*).
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*).
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*).
5. Pengelola dan pelestarian hasil dapat dengan mudah dan digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise dalam (Sutrisno,2005:18) ada lima macam yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) pada kondisi ini pengelola dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan dirumuskan sebelumnya.

2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap actor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep berkelanjutan :merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonom.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal,ragional dan nasional.

“Oleh karena itu agar dapat memahami secara mendalam pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat dari ilmuan, salah satu diantaranya adalah menurut Mubarak (2010:34) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya selaku anggota masyarakat. Lalu pada pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggungjawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo,2006).”

#### **E. Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Suharto (2005:60) Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang

mengalami masalah kemiskinan. Cara-cara Motivasi, Pelatihan, Pembinaan dan evaluasi:

##### 1) Cara melakukan Motivasi

Motivasi dapat ditimbulkan dengan cara membuat rancangan kerja yang memungkinkan seorang pegawai bersedia melakukan ke arah itu. Maka dari itu rancangan kerja harus memuat simpilikasi, standarisasi, dan spesialisasi.Rancangan pegawai memiliki ciri-ciri tersebut bisa meningkatkan motivasi pegawai.Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa motivasi bisa ditimbulkan melalui rancangan kerja. Ciri-ciri rancangan kerja yang baik adalah yang bersifat simplikasi maksudnya adalah rancangan kerja harus mempunyai nilai pelaksanaan (implikasi) yang mendekati keadaan kerja yang sebenarnya. Rancangan kerja juga harus mempunyai standarisasi, maksudnya ada nilai standar yang ditetapkan.

##### 2) Cara - cara melakukan pelatihan dan pembinaan

Program latihan mempunyai 3 tahapan yaitu :

- a. Penilaian kebutuhan pelatihan (*need assesment*), yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi agar bisa menentukan dibutuhkannya atau tidak program pelatihan.
- b. Pengembangan program pelatihan (*development*), memiliki tujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode - metode pelatihan yang dibutuhkan agar bisa mencapai tujuan pelatihan
- c. Evaluasi program pelatihan (*evaluation*), yang tujuannya untuk menguji dan menilai apakah program-program pelatihan yang telah dijalani secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **F. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan Program Pemberdayaan merupakan serangkaian perencanaan yang sudah dirancang masyarakat dan pemerintah terkait yang diawali dengan seleksi lokasi/

wilayah kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat dilanjutkan dengan proses pemberdayaan masyarakat dan akan di akhiri dengan kemandirian masyarakat dalam tahap pelaksanaan program ini sangat diuntungkan karna dari pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi para peternak sapi perah di kampung susu lawu ini. Selain itu masyarakat sendiri juga bisa lebih memahami dan mengerti bagaimana mengelola peternakan secara baik, selain mengelola peternakan sapi perah pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan juga memberikan cara bagaimana hasil dari sapi perah tersebut diolah menjadi berbagai macam produk contohnya seperti dodol susu, permen susu, susu segar siap minum dan masih banyak lagi. Dalam tahap pelaksanaan ini juga Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan juga menyediakan Omah susu agar peternak sapi perah bisa langsung menjual hasil peternakannya kepada pengepul dari berbagai macam kota. Selain itu tahap pelaksanaan ini juga mengarahkan masyarakat Kampung Susu Lawu untuk merawat dan mengelola peternakan dengan baik.

Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Evaluasi sangatlah penting karena masyarakat adalah penggerak program pemberdayaan masyarakat maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam hal evaluasi program pemberdayaan yang bertujuan agar program pemberdayaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tapi juga diperlukan umpan balik tentang masalah dan kendala yang terjadi saat program pemberdayaan tersebut berlangsung serta mencari solusi atau pemecahan masalah dalam setiap permasalahan terkait program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

Untuk melakukan evaluasi maka perlu melewati beberapa tahapan evaluasi yaitu: (1) Menetapkan apa yang harus dievaluasi; (2) Menyusun rencana evaluasi; (3) Pengumpulan data; (4) Analisis dan Presentasi data; (5)

Pengambilan Keputusan. Pada Tahap evaluasi in masyarakat diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam mengevaluasi Program Pemberdayaan tersebut. Kita yang kita tahu bahwa partisipasi masyarakat adalah hal yang penting untuk berjalannya sebuah kebijakan maupun program-program yang dilakukan oleh pemerintah.

Efektivitas adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kebijakan semakin mendekati sasaran, berarti mungkin tinggi efektivitasnya. Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/ tujuan kebijakan. Efektivitas pada evaluasi kebijakan yang dimaksud yaitu pencapaian hasil dari program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah yang dilihat dari ketepatan waktu kesesuaian hasil dengan tujuan yang diinginkan. Peneliti berpendapat agar program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah dapat mencapai hasil yang efektif maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya :

1. penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah
2. Perlunya pemahaman masyarakat dan pihak pelaksana program pemberdayaan secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan.

Efektivitas program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung susu Lawu sudah sangat efisien karena dengan adanya program pemberdayaan ini mampu membantu perekonomian masyarakat Kampung Susu Lawu dapat dilihat dari penjualan yang meningkat dari harga susu yang mulanya Rp. 5.200 per liter sekarang sudah meningkat

menjadi Rp. 8.000 per liter. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah di Kampung sudah berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi peternak sapi perah. Selain itu para peternak juga sangat menyambut dengan baik saat program pemberdayaan itu dilaksanakan.

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil Penerapan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Peternakan sapi perah di Kampung Susu Lawu berdasarkan hasil penelitian di atas ternyata sudah efisien, karena kurang didukung dengan ketersediaan sumber daya dan yang memadai. Peneliti berpendapat bahwa untuk melaksanakan kegiatan apapun agar tercapai hasil yang diharapkan maka harus didukung dana yang memadai. Demikian pula halnya dalam penerapan Program Pemberdayaan Masyarakat ini. Karena dana merupakan salah satu sumber daya yang harus ada dalam penerapan manajemen. Tanpa ada dukungan dana maka kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan optimal.

Selain itu efisiensi dari program pemberdayaan ini juga sudah sangat bagus disamping untuk membantu perekonomian pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan juga telah menyiapkan program KSL yang membantu untuk memberdayakan para peternak sapi perah di Dusun Singolangu yang sekarang ini menjadi program unggulan atau prioritas Kabupaten Magetan, selain sapi perah yang menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Magetan juga mempunyai 3 agro yang menjadi prioritas saat yaitu : (1) Agro Industri, (2) Agro Wisata, dan (3) Agro Bisnis. Dari situ bisa dilihat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Sangat Mengedepankan Program Pemberdayaan ini. Masyarakat Kampung Susu juga sangat berpartisipasi untuk memajukan dusunnya.

Program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini sudah dilakukan cukup adil dan merata sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini juga mengatakan bahwa mendapatkan banyak fasilitas, modal, dan ilmu yang dimana kegiatan tersebut tidak hanya menguntungkan para peternak sapi perah namun juga menguntungkan semua lapisan masyarakat. Pemerataan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah di kampung susu lawu sudah sangat berhasil dan sangat sesuai dengan prosedur yang ada. Pemerataan ini memang ditujukan agar masyarakat yang tidak beternak sapi perah juga bisa merasakan imbas yang baik karena adanya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini dan khususnya agar peternak sapi perah di Kampung Susu Lawu ini bisa mengelola peternakan sapi perah dengan baik dan benar

Respon yang dikeluhkan oleh masyarakat dari program pemberdayaan ini adalah kelanjutan dari program pemberdayaan tersebut dan juga solusi mengurangi limbah yang sekarang menumpuk di Dusun Singolangu yang sampai sekarang belum diatasi dan mengganggu masyarakat sekitarnya. Dari respon masyarakat merupakan sebuah kesesuaian yang didapat dari lapangan dan berharap ada feedback atau umpan balik dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dan langsung bisa diatasi ataupun di perbaiki secara baik.

Namun dari dari pihak Dinas juga sudah merespon keluhan dari masyarakat Kampung susu dengan cara mengagendakan pengembangan program pemberdayaan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan KSL yang dilakukan pada tahun 2019 itu perencanaan lalu tahun 2020 pembangunan tahap 1 lalu pada tahun 2021 pembangunan tahap 2 atau finishing. Lalu mengawal dengan biaya operasional dana pembangunan KSL

berasal dari APBD Kab. Magetan, melakukan kajian dan koordinasi dengan dinas lain untuk mengembangkan titik kunjung wisata KSL lebih ke profesional dengan cara di branding, pelayanan yang memuaskan atau berstandart titik pariwisata selalu di akomodir. Selanjutnya disnakan kab. Magetan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk berusaha meningkatkan populasi sapi perah di kampung susu lawu dan populasi lahan hijau di kampung susu lawu.

Program pemberdayaan melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini dianggap sudah tepat karena didukung oleh potensi yang ada di dusun singolangu dan juga masyarakat singolangu sangat mendukung dan menerima program pemberdayaan masyarakat ini karena dulu yang berternak sapi penggemuk/potong yang notabennya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali baru panen dan menjual ternaknya sekarang dengan sapi perah setiap hari mereka bisa mendapatkan pemasukan atau omset lebih dinamis termasuk masyarakat sekitar yang menerima susu segar dari singolangu ini di terima oleh pasar dan publik. Program pemberdayaan masyarakat ini sudah sangat tepat walaupun ada sedikit kendala yang belum bisa ditanggulangi oleh pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten magetan namun mereka sudah sangat banyak merasakan hal - hal positif yang disebabkan oleh adanya pemberdayaan ini. Dengan begitu banyaknya potensi alam yang ada di Dusun Singolangu semakin memudahkan para peternak sapi perah untuk merawat ternaknya.

Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini juga sudah tercapai dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Dusun Singolangu yang selama ini masih banyak yang berprofesi menjadi petani atau pekebun sekarang sudah banyak beralihkebidangpeternakansapiperah karena masyarakat di penuhi permodalannya dan fasilitasnya oleh pemerintah sehingga

masyarakat mampu bergerak secara mandiri dalam mengelola peternakannya. Program pemberdayaan ini sudah mumpuni mulai dari segi modal, fasilitas dan pembinaanya. Dalam kasus ini juga Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan membuat Koperasi Desa khusus untuk transaksi jual beli susu segar dan olahannya yang di olah oleh ibu - ibu PKK Dusun singolangu.

#### **G. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat**

1. Faktor Penghambat Sebelum Adanya Program Pemberdayaan melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah  
Banyak masalah atau kendala yang terjadi saat program pemberdayaan ini berlangsung salah satunya adalah karena tidak semua masyarakat Dusun Singolangu berprofesi sebagai peternak sapi perah banyak yang menolak adanya pemberdayaan masyarakat ini sehingga Masyarakat Dusun Singolangu masih terpecah belah antara Peternak sapi Penggemuk dengan peternak sapi perah karna disamping modal untuk sapi perah sendiri cukup mahal, maka pola pikir warga dusun singolangu masih sangat kurang mumpuni dan kurang adanya niat. Kemudian banyak Masyarakat masih takut untuk beranjak dari pekerjaan mereka yang penghasilannya masih sangat rendah dan juga Ada satu atau dua warga yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk beternak sapi perah jadi sebagai pionir yang menimbulkan sebagian masyarakat yang sudah ada niat menjadi ragu. Selain itu dilihat dari letak lokasi atau Geografis tanah yang dibutuhkan sangat terbatas dan juga menimbulkan pencemaran atau gangguan lingkungan solusinya membuat IPAL di sebelah Timur Kampung susu Lawu tetapi saat ini masih dikaji dan dicarikan dana.
2. Faktor Pendukung Setelah Adanya Program Pemberdayaan melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah

Banyak juga faktor pendukung program pemberdayaan ini selain Sumberdaya yang sudah memadai dan cocok untuk beternak sapi perah banyak juga dinas di kabupaten magetan yang mendukung program pemberdayaan ini seperti Dompot Duafa, Bank Jatim kabupaten Magetan dan khususnya Pemkab Megetan Sendiri yang menjadikan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu ini sebagai program unggulan kabupaten magetan dan juga setelah adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan ini juga mengalami Peningkatan perekonomian masyarakat Kampung Susu Lawu meningkat pesat walaupun belum bisa dimasukkan dalam kategori pengetasan kemiskinan namun dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini sudah mampu mengurangi kemiskinan yang ada dan juga Membuka peluang usaha untuk semua masyarakat yang ada di kampung susu, dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat kampung susu lebih berani untuk melangkah dan mencoba hal baru dalam dunia bisnis sehingga Kreatifitas dan juga kemampuan masyarakat Dusun Singolangu meningkat pesat daripada sebelumnya hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat mengelola peternakan dan juga hasil peternakan yang ada sekarang Selain pengelolaan susu itu juga ada sayuran lalu tanaman hias, pengunjung dari luar selain menikmati olahan susu juga banyak yang membeli atau tertarik pada bunga dan sayur, sehingga yang tidak berprofesi sebagai peternak sapi masyarakat bisa menjual sayuran dan tanaman hias.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu

Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan

##### a. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan wadah yang ada seperti musyawarah dan pertemuan tingkat RT, RW, dan PKK merupakan sarana yang efektif mengingat dana operasional yang ada juga terbatas. Sehingga masyarakat miskin merasakan keterbukaan informasi hal itu berdampak adanya kesamaan pemahaman antar peternak sapi perah dengan pemerintah pelaksana program pemberdayaan masyarakat.

##### a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di Kampung Susu Lawu dapat dikatakan sudah cukup tinggi. Dapat dilihat dari masyarakat yang berperan aktif dalam rebug warga untuk menggali potensi / keterampilan apa yang dapat dikembangkan yang nantinya akan dimasukan kedalam musrenbang.

##### b. Program Pemerintah

Yang Harus Dilaksanakan Adanya program ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Kota Magetan dalam menjamin, menghormati, dan melindungi dalam pemenuhan hakhak dasar warga miskin.

##### c. Program Pelatihan

Yang Diberikan Sesuai Dengan Kapasitas dan Dapat Diterima Masyarakat Program pelatihan keterampilan ini sesuai dengan kapasitas masyarakat miskin karena kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut sesuai dari rekomendasi dari masyarakat miskin dan para peternak sapi perah. kegiatan tersebut melihat potensi masyarakat miskin dan peternak sapi perah yang dapat dikembangkan.

d. Modal  
Masyarakat yang sudah mendapat bekal keterampilan sering kali terkendala dengan masalah permodalan awal dalam membuka suatu usaha. Dalam pemenuhan kebutuhannya saja masyarakat dapat dikatakan masih terbatas sehingga masyarakat tidak jarang setelah pelaksanaan pelatihan berhenti karena terbatas dari segi permodalan.

e. Program Yang Dilaksanakan Tidak Berkelanjutan untuk membuat IPAL ini tidak Selesai dari jadwal yang telah direncanakan tidak ada keberlanjutan bagaimana masyarakat menanggulangi masalah limbah peternakan sapi perah. Jadi masyarakat malah terganggu dengan limbah yang dihasilkan karena tidak ada tindakan lanjut

2) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

a. Efektivitas  
Penanggulangan kemiskinan melalui program Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan menyatakan bahwa tujuan dari program ini sudah tercapai. Tercapainya tujuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat diukur dengan warga miskin menjadi terentaskan dengan penurunan angka kemiskinan di Kampung Susu Lawu dari tahun 2018- sekarang. Selain penurunan angka kemiskinan, partisipasi masyarakat miskin dirasakan meningkat di Kampung Susu Lawu seperti dalam Musyawarah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang di adakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Target sasaran program keterampilan

merupakan masyarakat miskin yang sesuai dengan klasifikasi warga miskin Kampung Susu Lawu dan juga terfokus pada peternak sapi perah. Walaupun pada pelaksanaan sasaran program ini belum menyasar 100 % pada masyarakat miskin tetapi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan telah berusaha sesuai dengan database yang ada.

b. Efisiensi  
Program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini sudah sangat efisien dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat selama program pemberdayaan masyarakat itu berlangsung, selain itu efisiensi dari program ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan program yang memberikan sejuta manfaat untuk masyarakat Dusun Singolangu selain untuk peternak sapi perah manfaat itu juga dirasakan oleh banyak masyarakat lainnya.

c. Kecukupan  
“Perbaikan ekonomi masyarakat miskin sudah dapat dirasakan oleh warga miskin yang mengikuti Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan belum maksimal. Program pelatihan ini belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan. Hanya segelintir masyarakat yang merasakan perbaikan ekonomi karena melanjutkan bekal pelatihan tersebut untuk membuka suatu usaha. Dari sisi lain seperti perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir dengan program pelatihan keterampilan ini memberikan perubahan. Masyarakat lebih proaktif dalam mengakses program-program penanggulangan kemiskinan, masyarakat miskin dari perilaku konsumtif berubah menjadi lebih produktif, dan dari pola pikir masyarakat tidak maju sudah mengarah pada lebih maju.”



- d. Pemerataan  
 “Pendistribusian dana yang dilakukan pelaksana sudah merata dan wajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung Susu Lawu. Dana yang ada langsung ditransfer ke kelompok yang ikut dalam program pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari fasilitas yang diberikan masyarakat dikatakan sudah memadai. Hal itu dibuktikan dengan pembelian peralatan yang masih baru dan tempat pelaksanaan pelatihan yang memadai yang dilaksanakan di Kampung Susu Lawu.”
- e. Responsivitas  
 “Program pelatihan keterampilan yang dilaksanakan di Kampung Susu Lawu sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat dituangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Dengan demikian pelatihan keterampilan tersebut disesuaikan dengan potensi masyarakat peternak sapi perah. Potensi tersebut berdasarkan musyawarah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya selanjutnya naik ke tingkat kelurahan untuk menetapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan, sehingga dari kegiatan yang sudah ditetapkan pemerintah pelaksana akan memfasilitasi kegiatan tersebut.”
- f. Ketepatan  
 Pengaruh positif dari program berikut bisa dirasa dengan meluas. Bisa dirasa masyarakat memiliki motivasi menjadi peternak sapi perah meskipun masyarakat kerap terhalangi oleh modal. Masyarakat pun diajak guna berkreatifitas dengan bekal yang diterimanya untuk membuka suatu usaha dan menghilangkan pikiran bahwa yang mempunyai pendidikan tinggi secara formal biasanya dapat membuka usaha. peran ibu untuk anak-anaknya dirasakan berkurang karena

mengalami kesibukan-kesibukan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya.

## B. Saran

1. Perlunya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti penanganan pembuangan limbah atau IPAL yang saat ini sangat di keluhkan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk keterampilan yang mulai jalan seperti permen susu, stik susu, dan dodol susu perlu diadakannya pelatihan mengenai penjualan hasil produksi ataupun memfasilitasi masyarakat dengan membuka stand penjualan pada saat ada acara Kantor Pemerintahan di Kota Magetan ataupun kerjasama pemerintah dengan usaha menengah dengan cara penitipan produk yang dihasilkan ke toko-toko yang ada di Kota Magetan dengan sistem bagi hasil dan memperluas pasar bagi masyarakat Dusun Singolangu.
2. “Mengajak masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke atas untuk berpartisipasi dalam peminjaman modal, dengan cara pembuatan aplikasi start-up investasi. Jadi, masyarakat menengah ke atas menginvestasikan sejumlah modal dengan nominal Rp 50.000,00 melalui aplikasi start-up tersebut dengan ketentuan bagi hasil seperti 25% bagi pemilik modal dan 75% bagi pelaku usaha. Selain itu, memaksimalkan staf-staf Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pelatihan keterampilan dilaksanakan misalnya dua kali dalam setahun karena kebanyakan masyarakat penerima program pelatihan keterampilan tidak mempunyai bekal sama sekali. Disamping itu, memaksimalkan monitoring dan evaluasi SKPD sesudah program pelatihan dilaksanakan sampai dengan masyarakat miskin tersebut mendirikan suatu usaha dari bekal yang diterima. Didukung dengan memaksimalkan peran pendamping seperti Perguruan Tinggi dan CSR dengan cara memberikan seminar ke masyarakat

miskin ataupun memberi pelatihan pembukuan tentang laporan keuangan agar masyarakat mampu menghitung output dan income dari penjualan susu segar.”

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media Asep Saefuddin, dkk. (2003).
- A. W. Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Edi Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eko, Sutoro. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Samarinda.
- Kartasmita Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mubarak, Zaki, 2010, *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di D e s a Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sedarmayanti, 2000, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Bandung; Penerbit Mandar Maju 427.
- Sutrisno, D. (2005) “Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya d a l a m Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang.” Tugas Akhir tidak diterbitkan, Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Undang-undang No 57 tahun 2005 tentang desa.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hlm 42.

#### Jurnal :

- Munawar Noor (2011). *Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosisal Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011.

**Website:**

[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_tim/buku-tim-public-24.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-24.pdf)

[http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf)

<https://prafapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>



# Pergeseran Mata Pencaharian Pada Generasi Muda Petani Di Desa Selopanggung Kabupaten Kediri

Trimurti Ningtyas<sup>1</sup>, Aminatul Kurnia<sup>2</sup>

Prodi Sosiologi Agama, IAIN Kediri

tyas03@iainkediri.ac.id<sup>1</sup>, Kurnia368855@gmail.com<sup>2</sup>

## ABSTRACT

Indonesia as an agrarian country because most of the Indonesian people make a living as farmers. In Selopanggung Village, located on the slopes of Mount Wilis, the younger generation has also experienced a decline in interest in farming. This study aims to describe how the shift in people's livelihoods from farmers to other livelihoods. This study uses a qualitative method with descriptive analysis. The theory used is social action from Max Weber as an analysis of actions that affect the shift in the livelihoods of the younger generation of farmers in Selopanggung Village. The results in this study describe how the actions of the younger generation choose not to become farmers, so that it can be identified what factors can influence these actions. The findings are that there are four actions that can be identified in shifting livelihoods, as well as four factors that can support these actions.

**Keywords:** Shifting Livelihoods, Young Generation, Farmers, Social Action

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sering dijuluki sebagai negara agraris karena kebanyakan penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Indonesia yang beriklim tropis dan tanahnya yang subur dapat dimaknai sebagai keuntungan karena petani Indonesia dapat menanam sepanjang tahun. Sehingga dapat dikatakan sector pertanian juga berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan perekonomian sehari-hari para petani. Apabila dikelola dengan optimal kemudian petani dibekali manajemen bisnis yang mumpuni. Sector pertanian akan dapat berkembang dan berdampak pada ketahanan pangan Indonesia dan memungkinkan mengeksport hasil pertaniannya. Yang pastinya akan berdampak pada kesejahteraan petani.

Keuntungan diberkahi kondisi alam yang mendukung ini nyatanya tidak mudah dapat menarik minat generasi muda untuk bergelut di sektor pertanian. Saat ini jumlah petani Indonesia sekitar 33,4 juta orang, sebagian besar petani masuk dalam kategori usia tua. Sedangkan 70 % petani berpendidikan hanya setingkat sekolah dasar

dan jumlah petani milenial kurang dari 30 % dari 33,4 juta petani tersebut hanya 3 % yang merupakan lulusan perguruan tinggi. (Grehenson, 2020). Fakta tersebut membuat harapan pembangunan nasional seakan sulit untuk diwujudkan dengan kondisi dominasi petani berpendidikan rendah. Sedangkan tingkat pendidikan petani di Indonesia sangat beragam. pada gambar 1 di bawah ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan petani di Indonesia pada Tahun 2020.

Gambar 1  
Tingkat Pendidikan Petani di Indonesia



Sumber : BPS, 2021

Gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan petani didominasi pada

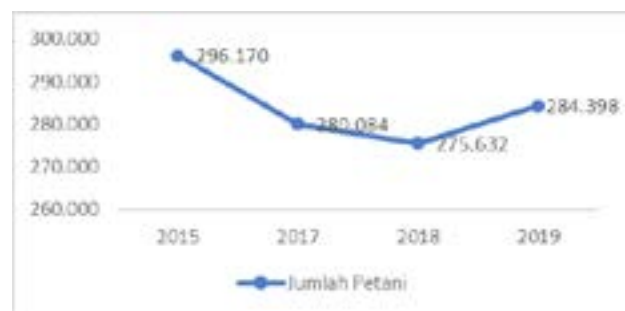
tingkat Sekolah Dasar (SD). Pendidikan yang rendah tentunya menjadi catatan penting dalam perkembangan bidang tersebut. Sebagian besar usia petani didominasi oleh angkatan tua dengan tingkat pendidikan rendah, artinya generasi muda minim minat untuk melanjutkan perjuangan sebagai petani. Sedangkan berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 usia angkatan kerja pertanian mencapai 34 % kemudian turun menjadi 31,9 % di tahun 2017 dan 29,5 % pada tahun 2019. (Grehenson, 2020). Mengajak generasi muda masuk dalam sektor pertanian merupakan tantangan terbesar karena pertanian dianggap belum menjajikan kesejahteraan.

Pergeseran mata pencaharian merupakan sesuatu yang tidak bisa terbantahkan akibat dari perkembangan lingkungan. Munculnya sektor industry di pedesaan merupakan salah satu yang menyebabkan adanya pergeseran matapencaharian penduduk pedesaan. (Faida, 2019). Selain itu, matapencaharian juga dimungkinkan berubah apabila kondisi ekonomi memang sangat berpotensi untuk membuat perubahan dalam kehidupan masyarakat. Beralihnya mata pencaharian dengan alasan untuk bertahan hidup juga menjadi bagian haln yang umum di masyarakat pedesaan. (Yuwono, 2019). Terdapat bagian yang mendasari pergeseran tersebut adalah peran dari perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya juga di bidang pertanian. Misalnya saja yang sebelumnya menjadi petani, berubah dengan mengelola pertanian sebagai bagian dari agroindustry. Agroindustry adalah salah satu sub pertanian yang mulai diminati sebagai bagian dari perkembangan pengetahuan pertanian. (Fatturrahman, 2013).

Sejalan dengan data tersebut ternyata regenerasi petani di Desa Selopanggung juga mengalami penurunan minat dan menjadi pekerjaan sampingan. Desa Selopanggung sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Semen dengan kondisi alam yang subur dan merupakan lereng gunung wilis dengan sistem persawahan terasering

dengan suplai air yang melimpah. Membuat sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah bertani. Sseiring dengan ini Soekanto mengatakan bahwa masyarakat desa umumnya hidup dari pertanian. (Soekanto, 2010). Gambar 2 di bawah ini disajikan perkembangan jumlah petani di Kabupaten Kediri.

Gambar 2  
Perkembangan Jumlah Petani  
di Kabupaten Kediri



Sumber : BPS Kab.Kediri, 2015-2020

Jumlah petani yang mempunyai trend menurun dari Tahun 2015 sampai tahun 2019 seperti pada gambar 2 di atas, dapat digambarkan terdapat suatu masalah tentang fenomena tersebut. Menurunnya jumlah petani pedesaan dari tahun ke tahun adalah suatu bentuk perubahan dalam lingkungan, tentunya perubahan tersebut mempunyai sebab dan dampak yang ditimbulkannya. Menurunnya jumlah petani menjadi gambaran bahwa semakin banyaknya masyarakat yang memilih profesi yang lain untuk kehidupannya. Pergeseran atau perubahan itu sendiri bisa terjadi karena adanya penemuan baru (*invention*), pertumbuhan penduduk dan kebudayaan (*culture*) dan adaptasi teknologi yang muncul ditengah masyarakat. (Suyitno, 2012). Adanya pembangunan potensi pariwisata di Desa Selopanggung sehingga beberapa generasi muda terserap pada sector pariwisata. Penambahan penduduk juga berimbas pada persaingan, serta adanya kebudayaan dari kota yang masuk membuat perubahan cara berpikir. Dinamika pergeseran mata pencaharian memang tidak bisa teralakan dizaman sekarang teknologi

memudahkan mobilitas aktivitas masyarakat. Budaya-budaya baru yang masuk ke pedesaan. Banyaknya informasi yang masuk dari internet menyebabkan akses untuk mendapat pekerjaan diluar desa terbuka sangat lebar.

Sehingga mempengaruhi menurunnya minat generasi muda untuk bertani di Desa Selopanggung. Tindakan pergeseran mata pencaharian ini dilakukan oleh generasi muda adalah dengan motif untuk mendapat penghasilan yang cukup dan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup keluarga. Mendapat penghasilan setiap bulan yang menentu juga dianggap sebagai bentuk keamanan yang ingin mereka perlihatkan kepada orang lain. Menurut Weber tidak semua tindakan yang dilakukan merupakan tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang mempertimbangkan perilaku yang berorientasi kepada orang lain. Ada empat tipe tindakan sosial menurut Weber, yaitu tipe pertama tindakan rasional instrumental (*zwerk rational*), kedua tindakan rasional nilai (*werktrational action*), ketiga tindakan afektif (*affectual action*) dan keempat tindakan tradisional (*traditional action*). (Ritzer, 2001). Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pergeseran mata pencaharian tersebut terjadi dan factor apa yang mempengaruhi generasi muda petani di Desa Selopanggung sehingga menurun minatnya berkerja sebagai petani.

## II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan mendasarkan pada paradigma definisi sosial. Definisi sosial berarti sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial intinya adalah tindakan yang penuh arti dari individu. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif deskriptif biasanya digunakan dalam penelitian yang bersifat obyektif dan alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci. (Sugiyono, 2008). Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah menurunnya minat generasi muda untuk

bekerja sebagai petani yang mempengaruhi tindakan pergeseran mata pencaharian generasi muda di Desa Selopanggung. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan yaitu di Desa Selopanggung dengan berinteraksi dengan para pemuda dan pemudi desa untuk memahami tingkah laku dari subyek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati pemuda dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari terutama terkait mata pencahariannya. Selain itu juga mengamati kondisi petani yang ada di Desa Selopanggung untuk dalam menjalankan pekerjaannya.

Teknik wawancara menekankan pada pemaknaan atas individu kepada tindakanya. Wawancara dilakukan secara kelompok maupun perorangan. Wawancara kelompok dilakukan pada saat pemuda mengadakan kegiatan desa sehingga peneliti lebih banyak mendapat informan dengan data yang beragam sedangkan wawancara perorangan dilakukan secara bertatap mata langsung sehingga peneliti dapat mengamati ekspresi informan. Kemudian data yang di peroleh selanjutnya dianalisis dengan cara seperti mereduksi data dengan merangkum memilih hal-hal pokok agar memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dilanjutkan penyajian data dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, terakhir adalah mengambil kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan 2 September – 30 September 2020.

## III. PEMBAHASAN

### A. Tipe Tindakan Generasi Muda Dalam Pergeseran Mata Pencaharian Perpektif Tindakan Sosial Weber

Tindakan menjadi bagian penting bagaimana seseorang dapat menjalankan perannya sebagai seorang manusia di bumi ini. Apapun yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh alasan-alasan

tertentu sehingga mereka dapat bertindak. Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku untuk memahami perilaku setiap individu bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu, dengan memahami perilaku setiap individu sama dengan kita telah menghargai dan memahami alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami adalah menghargai tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak. (Jones, 2003).

Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: Tindakan rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, tindakan tradisional dan tindakan afektif. Keempat klasifikasi tindakan tersebut, selanjutnya akan peneliti gunakan untuk menganalisis fenomena pergeseran mata pencaharian generasi muda petani di Desa Selopanggung akibat dari menurunnya minat menjadi petani muda, untuk memahami motif dan tujuannya.

Adapun penjelasan mengenai keempat klasifikasi tipe tindakan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Rasionalitas Instrumental, adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. *Kedua*, Rasionalitas Nilai, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuantujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. *Tindakan. Ketiga*, Afektif, merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional individu, *Keempat*, Tindakan Tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan

oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turunturun. (Turner, 2012)

#### 1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (Zwerk Rational)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Dapat dilihat keinginan generasi muda untuk meningkatkan taraf hidup dari segi ekonomi sehingga alat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu adalah bekerja di Kota atau di tempat pariwisata seperti kedai 66 kawasan hutan pinus. Berdagang dengan cara membangun warung kopi atau toko kelontong untuk memanfaatkan banyaknya pengunjung yang melewati jalan menuju tempat wisata. Tindakan ini didasarkan atas tujuan ekonomi yang jelas dan menggunakan suatu cara untuk mencapainya. Adanya perhitungan secara ekonomi dan keinginan untuk membangun perekonomian keluarga menjadi alasan bagaimana pemuda di Desa Selopanggung memilih untuk menjadi pedagang atau bahkan menjadi perantau di Kota lain untuk memperbaiki ekonominya. Hal ini menggambarkan bahwa menjadi petani di Desa Selopanggung tidak lantas dapat mengubah kondisi perekonomiannya sesuai dengan harapan kedepannya. Selain itu juga menjadi petani bukan menjadi cita-cita mereka sebagai seorang pemuda karena dianggap sesuai yang kurang modern dan tidak memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Sehingga bekerja di tempat lain atau memilih bekerja tidak sebagai petani adalah alat untuk mereka dapat mencapai kondisi ekonomi yang diharapkan.

#### 2. Tindakan Rasional Nilai (Werk Rational)

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-



nilai individu yang bersifat absolut. Dapat dilihat tindakan pemuda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup keluarga adanya nilai-nilai berbakti kepada orang tua untuk membantu karena apabila semua anggota keluarga bekerja sebagai petani pasti susah memenuhi kebutuhan keluarga karena masa panen yang 3 – 4 bulan baru mendapat penghasilan. Nilai yang digunakan disini adalah nilai yang dapat dihargai oleh keluarganya. Pemuda di Desa Selopanggung tumbuh dengan banyak perubahan lingkungan sehingga gambaran tentang kebahagiaan dan kecukupan tentang kebutuhan hidup bisa dengan mudah berubah karena pengaruh lingkungan. Hal ini yang menjadi dasar mengapa mereka memilih tidak bekerja sebagai petani. Bahwa mencukupi kebutuhan orang tua dan membahagiakan dengan berpenghasilan yang lebih baik dari petani adalah bentuk pencapaian dari nilai yang lebih tersebut. Sehingga salah satu alasan mereka bergeser mata pencahariannya adalah tentang nilai yang dibentuk oleh keluarga, tidak hanya pemuda tetapi juga orang tua.

### 3. Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (Affectual Action)

Tindakan ini berbeda dengan tindakan rasional instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai, karena tindakan afektif tidak melalui pertimbangan yang sadar tindakan ini tercipta dengan spontan karena pengaruh emosi dan perasaan seseorang. Dapat dilihat karena pertumbuhan penduduk membuat generasi muda saling nerlomba untuk mengenyam pendidikan yang tinggi atau mengasah skillnya agar mampu masuk dunia kerja dan terlihat mapan karena mendapat gaji setiap bulan. Tidak terlepas dari ekonomi, bahwa salah satu alasan utama mengapa tidak ingin menjadi petani adalah ingin merubah hidup sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasi tersebut lahir dari hal-hal yang erat kaitannya dengan emosional. Misalnya saja tentang standar kehidupan yang tidak sama antara teman

yang satu dengan yang lain, keluarga yang satu dengan yang lain, tetangga yang satu dengan yang lain. Budaya dari masyarakat yang terus mengalami perubahan ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang sehingga mereka menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang telah didapatkannya sekarang. Menjadi petani dianggap telah dibawah standar yang telah ada di masyarakat, sehingga mereka memutuskan untuk berpindah pekerjaan.

### 4. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (Traditional action)

Tindakan sosial ini dilakukan oleh individu karena mengikuti kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dan telah baku dan tidak dapat diubah. Jadi tindakan ini tidak melalui perencanaan yang sadar terlebih dahulu, baik dari caranya maupun tujuannya, karena mereka mengulangnya dari kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Dapat dilihat dari generasi muda petani di Desa Selopanggung yang masih berkerja sebagai petani namun dalam menunggu masa panen tiba mereka beralih kepekerjaan lain seperti industri gaplek (ketela kering) dan teh rosela. Tindakan mereka tetap mengikuti kebiasaan turun temurun sebagai petani namun beralih mata pencaharian sembari menunggu panen. Jadi tindakan mereka merupakan tindakan tradisional, karena memang sudah dari kebiasaannya ketika menunggu masa panen bahwa terdapat kebiasaan untuk menjalankan pekerjaan sampingan. Kebiasaan ini tentunya akan berdampak pada generasi muda, karena apabila dirasa memberatkan salah satunya akan bergeser ke satu yang lebih menjanjikan walaupun mereka tidak berniat untuk meninggalkan.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pegereran Mata Pencaharian Generasi Muda di Desa Selopanggung**

Desa Selopanggung adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di lereng gunung Wilis Desa Selopanggung juga

terkenal oleh potensi pariwisatanya. Seperti kebanyakan desa di lereng gunung mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Namun saat ini dikarenakan beberapa faktor membuat masyarakat Desa Selopanggung mulai beralih mata pencaharian. Khususnya generasi muda atau yang sering disebut sebagai generasi milenial. Menurutnya minat generasi muda terhadap pertanian ini disebabkan beberapa factor seperti berkembangnya pariwisata, ekonomi, persaingan, pemanfaatan waktu yang mempengaruhi tindakan pergeseran mata pencaharian yang secara turun-temurun dari dahulu bermata pencaharian sebagai petani.

Perkembangan pariwisata sendiri menjadi bagian penting dalam proses perubahan minat remaja dalam pertanian itu sendiri. Dibukanya sektor pariwisata oleh pemerintah baik Kabupaten maupun Desa menjadikan banyak pilihan tentang pekerjaan. Hal ini memberikan gambaran pada remaja untuk bisa mempertimbangkan jenis pekerjaan lain yang dianggap lebih layak dan menghasilkan baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Pertimbangan non ekonomi ini salah satunya adalah sikap gengsi yang ditunjukkan oleh remaja bahwa mejadi petani adalah bukan pilihan baik di masa kini (Shafaruddin, A., 2020).

Generasi milenial ini lahir pada kisaran tahun 1980-2000 an yang berarti saat ini berusia antara 17 - 37 tahun dan masuk dalam usia angkatan kerja. Ada pula perbedaan lain yang muncul antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya, kemajuan teknologi yang pesat, kehidupan yang super dinamis, dan perkembangan alat telekomunikasi telah membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sering tidak kita sadari bahwa dunia ini semakin kejam dan penuh dengan tantangan baru yang harus dihadapi yaitu pekerjaan. Ada beberapa factor yang mempengaruhi pergeseran mata pencaharian generasi muda petani antara lain:

#### 1. Factor Ekonomi

Factor ekonomi yang mempengaruhi pergeseran mata pencaharian generasi muda adalah pertanian mempunyai penghasilan tidak menentu setiap bulan. Karena bertani butuh 3 - 4 bulan untuk mendapat penghasilan dari hasil panennya sehingga generasi muda memilih bekerja di kota sebagai karyawan toko dan sebagainya dan membantu orang tua ketika panen saja. Sehingga pertanian dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga dan pergeseran mata pencaharian merupakan upaya untuk memperbaiki taraf hidup keluarga. Ditunjang juga kemajuan teknologi yang pesat dengan teknologi mereka dengan mudah mengakses lowongan pekerjaan di Kota melalui internet sekaligus adanya transportasi pribadi seperti sepeda motor dan ditunjang jalan yang bagus beraspal mempermudah mobilisasi ketika bekerja di Kota.

Penghasilan ini menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam memilih suatu bentuk mata pencaharian. Bagaimanapun juga kebutuhan menjadi bagian utama seseorang dalam menentukan apakah mereka ingin melakukan sesuatu atau bukan. Seperti yang diungkapkan oleh Maslow dalam McLeod, S. (2007) bahwa kebutuhan seseorang yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik seperti makan, minum, sandang, papan. Hal ini yang mendasari bahwa seseorang melakukan sesuatu atas dasar kebutuhan fisiknya. Penghasilan mereka yang akan menentukan apakah kebutuhannya fisik mereka terpenuhi atau tidak. Faktor ekonomi inilah yang memberikan pertimbangan mereka untuk memilih tidak menjadi petani tetapi memilih pekerjaan lainnya yang mereka anggap dapat mencukupi kebutuhannya yang dasar.

Seperti yang diungkapkan oleh Shafaruddin, A. (2020) dari hasil penelitiannya mengapa pemuda tidak memilih menjadi petani salah satunya karena tidak sebandingnya proses dengan hasil yang didapatkan. Hasil penelitian sekarang menunjukkan hal yang serupa bahwa mereka menganggap menjadi

petani tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar mereka, mereka tidak bisa mendapatkan hasil sesuai yang diharapkannya. Hal ini menjadi suatu tantangan yang serius bagaimana permasalahan pendapatan petani bisa setara dengan pekerjaan yang lainnya dan dianggap menjanjikan. Jika menjadi pelayanan warung dalam perkembangan pariwisata di Desa Selopanggung adalah pilihan yang menari, maka pekerjaan petani setidaknya harus memberikan nilai yang berimbang dengan apa yang dapat dihasilkan oleh seorang pelayan di sebuah warung.

## 2. Factor persaingan dan perkembangan lingkungan yang dinamis

Factor Persaingan adalah proses sosial ketika dua pihak atau lebih saling berlomba untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Faktor lain pendidikan yang tinggi dan pertumbuhan penduduk seperti yang diungkapkan Emile Durkheim, akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk setiap individu berusaha memenangkan persaingan tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan mengambil spesialisasi tertentu. (Sasmita, 2020). Sehingga generasi muda Desa Selopanggung yang mempunyai pendidikan yang tinggi seperti sarjana akan lebih memilih bekerja sebagai pegawai pemerintahan atau guru sekolah dibanding menjadi petani. sehingga generasi muda berlomba untuk mendapat pengakuan mapan dengan cara bekerja dengan penghasilan setiap bulan.

Selain itu lingkungan yang sangat berpengaruh ini adalah bagian dari penerimaan atas pekerjaan itu sendiri. Minimnya dukungan keluarga dan lingkungan terhadap pilihan kerja sebagai petani menjadikan pekerjaan petani tidak banyak diminati. Dukungan ini seharusnya menjadi bagian penting bagaimana sektor pertanian ini dapat tumbuh dengan baik. Dukungan seharusnya tidak hanya datang dari keluarga tetapi dari pemerintah yang mempunyai tanggung jawab besar untuk keberlanjutannya

dan keseimbangan sektor pertanian ini. Adapun bisa menjalin kerjasama dengan sektor pendidikan dalam setiap proses pembelajarannya terdapat sosialisasi bahwa sektor pertanian itu penting untuk dibangun dan peran serta masyarakat khususnya pemuda sangatlah diharapkan. Tidak hanya sektor pariwisata yang perlu diperhatikan pemerintah tetapi sektor pertanian sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan kebutuhan utama masyarakat yaitu pangan.

## 3. Factor pariwisata dan industrialisasi

Factor pariwisata disini menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata juga berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat sekitar seperti sector pariwisata juga menyerap beberapa pekerja generasi muda contohnya wisata kuliner Kedai 66 yang berada di kawasan hutan pinus. Jenis pekerjaan yang terserap antara lain waiters, bartender dan tukang parkir. Generasi muda juga mulai mencoba berdagang sebagai bentuk pemanfaatan karena perkembangan pariwisata jalanan menuju objek wisatayang sering dilewati pengunjung ketika berwisata dengan mendirikan warung kopi atau toko kelontong. Industrialisasi di sini lebih pada perkembangan industry pariwisata yang berkembang pesat dalam kurung waktu 5 Tahun ke belakang di Desa Selopanggung.

Perkembangan industri pariwisata yang ada di Desa Selopanggung memang memberikan dampak yang luar bisa dalam perkembangan sosial budaya di desa tersebut. Salah satu dampaknya adalah kemajuan secara ekonomi yang dipilih dan diharapkan oleh masyarakat desa. Alhasil, banyak tenaga kerja dari berbagai usia termasuk remaja dan usia produktif yang tertarik untuk beralih menjadi pekerja di sektor pariwisata. Adanya banyak pilihan pekerjaan ini menjadi salah satu faktor penghambat mengapa tidak banyak memilih untuk menjadi petani lagi, tentunya dengan berbagai keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan lain tersebut salah satunya adalah penghasilan.

#### 4. Factor peluang usaha yang lain

Terdapat fakta lain bahwa terdapat peluang usaha yang baru selain pariwisata di Desa selopanggung. Beberapa generasi muda yang mempunyai pekerjaan sampingan juga bergelut dalam industri gablek (singkong kering) dan teh rosela untuk mensiasati menunggu waktu panen tiba. Pekerjaan sampingan ini tidak menjadikan petani meninggalkan pekerjaan mereka sebagai petani. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat terutama pemuda di Desa Selopanggung untuk menyeimbangkan proses menjadi petani dengan apa yang didapatkan adalah dengan menekui juga pekerjaan sampingan. Jadi pekerjaan ini berlaku untuk generasi muda yang masih bertani namun memanfaatkan waktunya selama menunggu masa panen.

Faktor peluang yang lain ini menjadi faktor sekunder yang mendukung adanya pergeseran mata pencaharian, artinya apabila dimungkinkan dan menarik akan berdampak pada pergeseran mata pencaharian tetapi apabila dianggap kurang menarik akan dijadikan pekerjaan sampingan tanpa meninggalkan sektor pertaniannya. Tetapi, pada kenyataannya kelompok petani ini memilih untuk menjadikan usaha ini menjadi usaha sampingan dan tetap menjadi petani. Selain masih dibebani tanggung jawab mengolah lahan (baik milik orang tua ataupun sewa) mereka merasa menjadi petani dan mempertahankan budaya pekerjaan itu adalah bagian dari tanggung jawab pribadi kepada keluarga mereka.

#### IV. PENUTUP

Pemuda di Desa Selopanggung telah menurun minat mereka untuk menjadi petani sehingga mengakibatkan bergesernya mata pencaharian. Terdapat empat deskripsi dari tindakan untuk memilih pekerjaan lainnya, pertama Tindakan Rasionalitas Instrumental bertujuan untuk pemenuhan ekonomi karena bekerja sebagai petani tidak menjamin kesejahteraan dan beralih

pekerjaan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Tindakan Rasional Nilai bertujuan untuk berbakti dan membantu orang tua dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi bertujuan untuk lebih unggul dengan pendidikan tinggi atau skill tertentu. Generasi muda dengan gelar sarjana cenderung memilih bekerja sebagai pegawai pemerintahan atau guru. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan bertujuan untuk tetap melakukan kebiasaan menjadi seorang petani namun beralih mata pencaharian sembari menunggu masa panen tiba.

Factor atau tujuan yang mempengaruhi generasi muda petani beralih mata pencaharian adalah factor ekonomi, Karena bertani butuh 3 - 4 bulan untuk mendapat penghasilan dari hasil panenanya sehingga generasi muda memilih bekerja di kota sebagai karyawan toko dan sebagainya dan membantu orang tua ketika panen saja. factor persaingan, generasi muda Desa Selopanggung yang mempunyai pendidikan yang tinggi seperti sarjana akan lebih memilih bekerja sebagai pegawai pemerintahan atau guru sekolah dibanding menjadi petani. sehingga generasi muda berlomba untuk mendapat pengakuan mapan. Factor pariwisata pariwisata juga menyerap beberapa pekerja generasi muda contohnya wisata kuliner Kedai 66 yang berada di kawasan hutan pinus. Jenis pekerjaan yang terserap antara lain waiters, bartender dan tukang parkir, dan juga membangun warung kopi dan toko kelontong. Factor waktu, Beberapa generasi muda yang mempunyai pekerjaan sampingan juga bergelut dalam industry gablek (singkong kering) dan teh rosela untuk mensiasati menunggu waktu panen tiba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2019. Laporan Kediri Dalam Angka 2018. <https://kedirikab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2020. Laporan Kediri Dalam Angka 2019. <https://kedirikab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2021. Laporan Kediri Dalam Angka 2020. <https://kedirikab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik, 2021. Publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2021 <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Y2NmNWIZNTJkN2Y0MmI5NzE4YjZjQ0&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxyY2F0aW9uLzlwMjEvMDYvMDgvY2NmNWIZNTJkN2Y0MmI5NzE4YjZjQ0L2tlyWRhYW4tcGVrZXJqYS1kaS1pbmRvbmVzaWETZmVicnVhcmktMjAyMS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0wNi0wOCAXMjoyOToyNg%3D%3D>
- Faida, U. L. (2019). *Pergeseran orientasi mata pencaharian hidup masyarakat Desa Karang Kedawang, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto (1984-2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Fathurrahman, M. A. (2013). *Keberadaan Agroindustri Kacang Koro (Vicia faba L.) Dalam Pergeseran Mata Pencaharian (Studi Kasus di Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka)* (Doctoral dissertation).
- Grehenson, Gusti. "Regenerasi Petani Kian Mengkhawatirkan" *Universitas Gadjah Mada On Line*, <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/20243-Regenerasi-Petani-Kian-Mengkhawatirkan>, 21 Oktober 2020, Diakses Tanggal 29 Oktober 2020
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga PostModernisme*, (trj.) Saifuddin Jakarta: Pustaka Obor, 2003.
- McLeod, S. (2007). Maslow's hierarchy of needs. *Simply psychology*, 1(1-18).
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2001.
- Sasmita, Hari. "Teori Kependudukan" <https://Pt.Slideshare.Net/Mobile/Hasrisasmita/2-Teori-Kependudukan>, Di Akses 30 Oktober 2020
- Shafaruddin, A. (2020). *Hilangnya ketertarikan remaja akan profesi petani dalam tinjauan teori perubahan Sosial Emile Durkheim di Desa Jolotundo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suyitno, Imam. "Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Local" *Jurnal Pendidikan*, 1 (Februari 2012).
- Turner S Bryan *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012
- Yuwono, D. B. (2019). PERGESERAN MATA PENCAHARIAN DAN PUDARNYA RITUAL SYUKUR LAUT PADA MASYARAKAT NELAYAN BUGIS DI SUNGAILIAT BANGKA. *Al-Qalam*, 25(2), 441-454.



# Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan

M. Daimul Abror<sup>1</sup>, Roudotul Jannah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Administrasi Publik Universitas Kadiri, <sup>2</sup>Administrasi Publik Universitas Yudharta Pasuruan

<sup>1</sup>daimabrор@unik-kediri.ac.id, <sup>2</sup>aikooana71@gmail.com

## ABSTRACT

Kalipucang Village as one of the tourist village areas has tremendous potential in tourism development. However, the socio-economic conditions of the community tend to be relatively simple, so it is necessary to carry out an in-depth analysis related to the Implementation of Tourism Policy in Kalipucang Village, Tukur District, Pasuruan Regency. The purpose of this study is to describe, analyze, and interpret the form of Tourism Policy Implementation in Kalipucang Village by referring to George and Edward III's implementation process model theory. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, with the Village Government, Pokdarwis and local communities as well as documentation. The results showed that the implementation of the tourism policy in Kalipucang Village had been implemented well. communication made by Policy Actors (Village Government) with the community is quite good with the openness of the problems faced. Natural resources are so abundant that the people of Kalipucang Village are enthusiastic in developing the Tourism Village so that it is more famous and visited by many domestic and foreign tourists. The problem faced by the people of Kalipucang Village is that the performance of each field, especially the tourism sector, is not optimal due to limited capital, inadequate tourism supporting facilities and infrastructure, and tourism destinations that are not well organized. Existing supporting factors include the variety of available tourism potential, support from local community leaders and administrators, collaboration between community members and the attitude of kinship and mutual cooperation which is still very strong. Meanwhile, from the practical implications of implementing tourism policies in Kalipucang Village, it shows positive economic and social changes, both from the aspect of tourism destinations, aspects of local icons, aspects of brotherhood and friendship and aspects of community welfare.

**Keywords :** Policy Implementation, Tourism Village, Community Welfare.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar didunia dan Negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya hingga seni budaya dan adat istiadatnya. Indonesia juga terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini ditunjang oleh sektor-sektor unggulan yang sangat berperan untuk pembangunan ekonomi, salah satunya pada sektor pariwisata.

Kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah menitikberatkan pada adanya kolaborasi lintas actor baik antar jenjang pemerintahan maupun antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Bahkan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan beberapa paket regulasi sebagai *breakdown* dari Undang-Undang tersebut, yakni Peraturan Menteri Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahkan secara khusus pengembangan Kawasan Strategis Nasional Bromo Tengger Semeru (KSNBTS) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan, Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 mengamanatkan adanya proses pembangunan yang terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kawasan. Dengan demikian arah pembangunan kepariwisataan yang dimaksud akan berada dalam lingkup: 1) industri pariwisata, 2) destinasi pariwisata, 3) pemasaran dan 4) kelembagaan kepariwisataan dengan mengutamakan karakter lokal yang telah dimiliki. Kabupaten Pasuruan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 yang kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2021 tentang Desa Wisata yang menekankan adanya kawasan pembangunan pariwisata dan wisata pedesaan yang telah memiliki daya tarik. Seperti diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut, terdapat kelompok daya tarik wisata yang menjadi kekuatan Kabupaten Pasuruan yakni: a) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah barat yaitu Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen dan Gempol sebagai kawasan pusat wisata alam, budaya, buatan, religi, edukasi, belanja dan kuliner; b) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah tengah, yaitu Kecamatan Rembang, Wonorejo, Kejayan, Pohjentrek, Gondangwetan, sebagai kawasan industri, agro dan minat khusus; c) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah timur, yaitu Kecamatan Grati, Lumbang, Winongan,

Gondang wetan sebagai kawasan wisata alam, industri mebel dan religi; d) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah utara yaitu Kecamatan Beji, Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok dan Nguling sebagai kawasan wisata budaya, belanja, kuliner, bahari dan religi; e) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah selatan, yaitu Kecamatan Purwosari, Purwodadi, Tuttur, Tosari, Puspo dan Pasrepan sebagai kawasan wisata alam, budaya, agro, kuliner, belanja dan edukasi. Dengan demikian, melalui arah pembangunan yang telah ditetapkan, pembangunan kawasan dapat terwujud dengan memosisikan Bromo Tengger Semeru (BTS) sebagai daya tarik utama. Adapun ke-lima kawasan yang telah ditetapkan merupakan pionir dalam merespon daya tarik BTS dengan memanfaatkan daya tarik lokal yang tersedia. Setidaknya ada tiga peranan pariwisata di kawasan BTS yaitu peranan ekonomi, peranan sosial dan kebudayaan. Peranan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja yaitu membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya. Salah satu permasalahan utama masih terbatasnya pengembangan BTS adalah terbatasnya koordinasi dan pengelolaan terpadu Kawasan BTS secara professional. Hal ini, salah satunya dikarenakan keterlibatan berbagai pihak baik dari pemerintah pusat melalui Kementrian kehutan, dan juga beberapa daerah sekitar BTS dalam pengelolaan Kawasan BTS yang belum



bersinergi. Selain meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat berkepentingan dalam upaya pengembangan Kawasan di sekitar BTS. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian secara mendalam mengenai potensi dan pengembangan pariwisata khusus wilayah BTS. Dimana salah satu tujuannya adalah peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan juga perekonomian Kabupaten Pasuruan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016 – 2025. Oleh karena itu, kajian mengenai Pengembangan pariwisata khusus wilayah Bromo Tengger Semeru sangat penting dan perlu untuk dilakukan

Sektor pariwisata telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui branding "Wonderful Indonesia" atau "Pesona Indonesia" diharapkan perkembangan pariwisata akan terus dapat meningkatkan kunjungan para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk mengunjungi destinasi wisata yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga pariwisata di Indonesia dapat berpotensi sebagai penyumbang devisa Negara terbesar di Indonesia dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pasuruan yang berada dijalur strategis Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa Timur yang memiliki kekayaan alam beraneka ragam. Berbagai jenis wisata mulai dari wisata pegunungan, wisata alam, wisata danau, dan wisata pantai siap menyambut kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk menyambut para wisatawan, sejumlah hotel berbintang, villa, penginapan dan homestay tersedia sebagai tempat istirahat yang nyaman.

Pesona Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu daerah yang berada di Kawasan Strategis

Nasional Bromo Tengger Semeru (KSNBTS) menjanjikan beragam daya tarik wisata baik wisata alam, wisata minat khusus, wisata religi, wisata budaya, wisata buatan, maupun agrowisata. Secara umum, potensi ekonomi kecamatan tutur ditandai oleh keberadaan komoditas unggulan pertanian pada setiap destinasi wisatanya. Fakta tersebut semakin memperkuat bahwa potensi kecamatan tutur merupakan kecamatan dengan konsep dan brand pusat agrowisata yang tepat. Beberapa komoditas unggulan yang sudah siap dalam bentuk kemasan kegiatan pariwisata diantaranya adalah durian, kopi, bunga Krisan, sayur – sayuran, aneka buah – buahan, serta komoditas peternakan berupa aneka produk olahan susu. Kemudian terdapat potensi desa wisata Kalipucang yang menjanjikan sebagai destinasi agrowisata. Pada desa tersebut, telah terdapat beberapa atraksi wisata yang disediakan untuk wisatawan seperti di mana keseluruhan berbasis alam dan hasil produksi pertanian desa. Ditunjang oleh keberadaan homestay dan pusat oleh – oleh membuat Desa ini semakin menjadi destinasi wisata potensial untuk lebih dikembangkan lagi di mana yang akan datang.

Kecamatan Tosari merupakan salah satu wilayah yang sangat dekat dengan BTS. Potensi ekonomi yang dimiliki adalah berbagai macam produk hasil pertanian khususnya sayur – sayuran. Tidak hanya itu, kecamatan tosari memiliki potensi ekonomi kreatif dalam bentuk usaha – usaha kerajinan, pahat dan seni ukir. Sejauh ini, meskipun belum di produksi dalam skala yang besar, potensi ekonomi kreatif ini sudah disandingkan Bersama aktivitas kepariwisataan sehingga menjadi daya tarik yang memiliki nilai tambah bagi destinasi wisata. Potensi lainnya adalah keberadaan homestay dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) lokal yang dapat dikembangkan agar menjadipusat oleh – oleh bagi wisatawan. Di masa yang akan datang potensi ini bisa diperkuat dengan kerja sama antar UMKM dan komunitas seperti Pasuruan Creative Network (PANCENE) ataupun

UMKM SMART yang sudah sedemikian maju sehingga mampu menghimpun produk secara terkoordinir melalui anggota komunitas yang dimaksud.

Kecamatan Puspo memiliki potensi yang cukup banyak namun belum kembangkan secara optimal. Sebagaimana kecamatan Tuter dan Puspo, Kecamatan Puspo memiliki kelimpahan produk pertanian khususnya sayur dan buah – buahan. Meskipun belum menjadikan kegiatan pertanian sebagai bagian dari pariwisata, secara ekonomi, Kecamatan Puspo dapat menjadi wilayah penopang yang berkontribusi menjadi pemasok komoditas oleh – oleh hasil pertanian derta olahannya. Adapun potensi lainnya adalah di beberapa titik destinasi wisata, terdapat kelompok pengusaha kecil menjual berbagai macam produk. Saat ini UMKM tersebut melakukan aktivitas usaha secara terpisah, namun demikian di masa yang akan datang, UMKM tersebut dapat menjadi penunjang bagi wilayah pariwisata Puspo maupun kecamatan lain disekitarnya.

Kecamatan Purwodadi menyimpan potensi ekonomi berupa pertanian serta olahannya turunannya khususnya yang berasal dari Desa Tambaksari. Secara spesifik, Desa tersebut menjadi pusat budidaya tanaman apukat sehingga tidak hanya dapat dapat dikembangkan sebagai agrowisata tetapi juga wisata edukasi. Adapun kebun Raya Purwodadi saat ini masih fokus pada fungsi konservasi tanaman sehingga belum menonjolkan hasil pertanian sebagai produk komersial.

Kecamatan Purwosari menyimpan potensi ekonomi berupa produk hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. Keberadaan UPTD Budidaya Ternak, Desa Kertosari, Eduwisata Kembang Kuning dan Wisata Edukasi dan Resort Kebun Pak Budi memegang peranan penting bagi kekuatan pariwisata kecamatan Purwosari di bidang ekonomi. Hal tersebut ditambah dengan keberadaan Saygon Park dan Rafting Kali Jempingan yang memberikan fasilitas wahana hiburan buatan dan akomodasi bagi wisatawan.

Kecamatan Sukorejo memiliki potensi ekonomi yang sangat khas yakni komoditas Matoa dan Kurma yang akan dibalut dalam tema agrowisata. Meskipun terbilang baru sebagai pelaku wisata, Kecamatan Sukorejo khususnya melalui Desa Wonokerto mempersiapkan diri untuk menjadi the city of matoa. Selain itu, produk kurma beserta komoditas olahannya juga sudah disiapkan sehingga satu – satunya pilihan untuk agrowisata Kurma adalah di wilayah Kecamatan Sukorejo

Adapun desa Kalipucang yang terletak 28 kilometer arah Selatan dari pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Wilayah Desa Kalipucang berada di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 500-1500 mdpl. Desa Kalipucang ini masuk dalam wilayah teritorial Kecamatan Tuter dan tentunya masuk pada KSNBTS. Sebagian besar masyarakat Desa Kalipucang berprofesi sebagai peternak sapi perah. Akhir tahun 2016 silam jumlah peternak sapi 997 orang, dan populasi sapi perah sebanyak 2.613 ekor yang diakomodir melalui 7 kelompok ternak. Desa Kalipucang juga memiliki potensi sumberdaya alam lainnya, seperti perkebunan kopi, durian, air terjun Sumber Nyonya, 7 Sumber Telogo, Kebun Krisan, dan Bukit Tumang siap memanjakan pengunjung. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan pada awal 2017 berupaya merespon beberapa potensi alam dan sektor unggulan desa sebagai kawasan wisata potensial dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). (Nuzil, 2020)

Tabel 1. Potensi Daya Tarik Wisata di Kawasan TNBTS dan Kawasan SNBTS Kabupaten Pasuruan

Jenis Destinasi Wisata	No	Nama Destinasi Wisata	Lokasi
Wisata Alam	1	Gunung Bromo	Desa Wonokitri, Kec Tosari
	2	Air Terjun Coban Jala	Desa Cowek, Kec. Puwodadi
	3	Air Terjun Rambut Moyo	Dusun Krajan, Desa
	4	Air Terjun Coban Waru	Dusun Kayubebek, Desa Wonosari, Kec.Tutur
	5	Air Terjun Sumber Nyonya	Dusun Gunungsari, Kec. Tutur
	6	Air Terjun Coban Cemoro Gading	Desa Ngadirejo, Kec. Tutur
	7	Air Terjun Lebak Rejo	Desa Lebak Rejo, Kec. Purwodadi
Wisata Minat Khusus	1	Desa Wisata Puspo	Kecamatan Puspo
	2	Desa Wisata Tambaksari	Desa Tambaksari, Kec. Purwodadi
	3	Desa Wisata Wonokitri	Desa Wonokitri, Kec. Tosari
	4	Desa Wisata Ngadiwono	Desa Ngadiwono, Kec. Tosari
	5	Desa Wisata Mororejo	Desa Mororejo, Kec. Tosari
	6	Desa Wisata Baledono	Desa Baledono, Kec. Tosari
	7	Desa Wisata Wonosari	Desa Wonosari, Kec. Tutur
	8	Desa Wisata Ngembal	Desa Ngembal, Kec. Tutur
	9	Desa Wisata Tlogosari	Desa Tlogosari, Kec. Tutur
	10	Desa Wisata Andonosari	Desa Andonosari, Kec. Tutur
	11	Desa Wisata Tutur	Desa Tutur, Kec. Tutur
	12	Desa Wisata Kalipucang	Desa Kalipucang, Kec. Tutur
	13	Desa Wisata Blarang	Desa Blarang, Kec. Tutur
	14	Desa Wisata Ngadirejo	Desa Ngadirejo, Kec. Tutur
	15	Desa Wisata Cowek	Desa Cowek, Kec. Purwodadi
	16	Desa Wisata Dawuhan Sengon	Desa Dawuhan Sengon, Kec.Purwosari
	17	Desa Wisata Palangsari	Desa Palangsari, Kec. Puspo
	18	Desa Wisata Kertosari	Desa Kertosari, Kec. Purwosari
Wisata Religi	1	Pertapaan Abiyoso	Desa Tambaksari, Purwoadi
Wisata Budaya	1	Candi Sepilar	Desa Tambaksari, Purwoadi
	2	Candi Makutoromo	Desa Tambaksari, Purwoadi
	3	Candi Wesi	Dusun Tambakwatu, Desa Tambaksari, Kec. Purwoadi
	4	Candi Gong	Dusun Tambakwatu, Desa Tambaksari, Kec. Purwoadi
Wisata Buatan	1	Kebun Raya	Purwodadi
	2	Saygon Waterpark	Sengon, Kec. Purwosari
	3	Kolam Renang Taman Ria Suropati	Desa Ranggeh, Kec. Gondang Wetan
Agrowisata	1	Bhakti Alam	Dusun Ngembal, Kec. Tutur
	2	Agrowisata Apel	Desa Andosari, Kec. Tutur
	3	Agro Bunga Krisan dan Paprika	Desa Telogosari, Kec. Tutur
	4	Wisata Peternak Sapi Perah	Desa Wonosari, Kec. Tutur
	5	Agro Jamur	Desa Ngadirejo, Kec. Tutur
	6	Bukit Flora	Dusun Ngembal, Kec. Tutur
	7	Kebun Kurma	Dusun Canggih, Desa Sekar Mojo, Kec. Purwosari

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2021

Sebagai salah satu kawasan industri pariwisata yang cukup menarik banyak wisatawan lokal maupun asing, kawasan Pasuruan diharapkan dapat mensejahterakan

masyarakat desa tertinggal dengan memaksimalkan potensi desa tersebut. Namun banyaknya potensi yang dimiliki oleh desa-desa terpencil Kabupaten Pasuruan

tidak berimbang dengan sumber daya manusia setempat sehingga potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Minimnya biaya operasional juga merupakan salah satu faktor penghambat sehingga potensi tersebut tidak dapat dioptimalkan. Karena hal inilah peranan pemerintah Kabupaten Pasuruan sangatlah penting. Untuk itu pemerintah harus memiliki strategi untuk meningkatkan potensi lokal desa di Kabupaten Pasuruan.

## II. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata daripada deretan angka-angka. Metode kualitatif ini senantiasa menjadi bahan utama bagi ilmu-ilmu sosial tertentu, terutama dalam bidang antropologi, sejarah, dan ilmu politik. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data-data mengenai Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini di fokuskan pada proses Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan berdasarkan pendekatan yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Lokus penelitian yang dilakukan ini di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Peneliti tertarik mengambil tempat ini karena Implementasi Kebijakan Pariwisata yang berupa Desa Wisata sudah di tetapkan dan dilaksanakan di lapangan.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan kelompok peternak sapi desa, maupun observasi langsung dilapangan. Sedang data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari informan dilapangan. Sumber data sekunder ini bisa berupa dokumen, artikel, maupun arsip-arsip yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Data

yang diperoleh berasal dari beberapa artikel yang terkait Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan sehingga banyak menjadi referensi kami dalam melakukan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 cara yaitu :

- a) Wawancara. Moleong (2010:186) mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dengan dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan per-tanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas per-tanyaan itu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Pemerintah Desa Kalipucang berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
- b) Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian. Dengan cara mempelajari buku-buku, teori-teori, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang diperlukan dan berkaitan dengan masalah yang di teliti.
- c) Observasi. Nasution (Sugiyono, 2010:310) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di Desa Kalipucang.

Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui Reduksi Data (Data Reduction), Display Data (Data Display), dan Penggambaran Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) (Miles, 2014).

## III. PEMBAHASAN

### A. Profil Desa Kalipucang

Wilayah Desa Kalipucang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 840 meter dpl dan luas 671,178 Hektar, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sumberpitu.
- b. Sebelah Timur : Desa Jajangwulung dan Desa Andonosari.
- c. Sebelah Selatan : Desa Tuter dan Desa Pungging
- d. Sebelah Barat : Desa Tuter dan Desa Dawuhan Sengon.

Desa Kalipucang terdiri dari 6 Dusun, 7 RW (Rukun Warga) dan 26 RT (Rukun Tetangga). Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dusun Kuntul Selatan : 1 RW dan 5 RT
- b. Dusun Kuntul Utara : 2 RW dan 6 RT
- c. Dusun Dodogan : 1 RW dan 4 RT
- d. Dusun Mucangan : 1 RW dan 4 RT
- e. Dusun Cikur : 1 RW dan 4 RT
- f. Dusun Jelak : 1 RW dan 3 RT

Jumlah penduduk Desa Kalipucang sebanyak 4.272 jiwa yang tersebar di 6 Dusun, 7 RW dan 26 RT, dari jumlah tersebut terdiri dari penduduk laki-laki 2.311 jiwa dan penduduk perempuan 1.961 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 5 (Lima) tahun terakhir 0.5 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 342,70 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Pusat pemerintahan Desa Kalipucang terletak di Dusun Dodogan dengan menempati areal lahan seluas 1.000 m<sup>2</sup>. Jarak Desa Kalipucang dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Tuter ± 4 Km.

Tabel 2. Penggunaan Lahan di Desa Kalipucang

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	120,78
2	Tegal/ Ladang	399
3	Hutan	5
4	Perkebunan	4,56
5	Kuburan	2,5
6	Pekarangan	2
7	Taman	-
8	Perkantoran	0,5
9	Prasarana Umum Lainnya	1
	Luas Wilayah	535,34

## B. Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang

Pengertian pariwisata menurut A.J Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan

diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta peninggalan sejarah, seni, dan juga budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Desa Wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada, akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur-unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya Tarik maupun sebagai fasilitas pendukung. (Muljadi, 2012).

Pengembangan pariwisata merupakan peran yang sangat penting bagi pembangunan suatu wilayah dan tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Hal tersebut akan menjadi acuan untuk pengembangan pariwisata kedepan supaya pembangunan dan pengembangan pariwisata bisa berjalan terarah dan sesuai dengan rencana. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaannya sudah menitikberatkan pada kolaborasi actor lintas sector baik antar jenjang pemerintah maupun antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pembangunan pariwisata di Indonesia maupun di

mancanegara menunjukkan kecenderungan terus meningkat.

Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan serta kelautan. Desa Kalipucang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan berada di kawasan lereng gunung bromo. Dengan jumlah penduduk 4.272 jiwa, 90 persen merupakan peternak sapi. Tersebar di Dusun Kuntul Selatan, Kuntul Utara, Dodogan, Cikur, Mucangan dan Jelag. Populasi sapi mencapai 2 ribu ekor dengan total produksi susu per hari 12 ribu ekor dengan total produksi susu per hari 12 ribu liter. Kekayaan alam tak bisa dilepaskan dari kondisi alam yang eksotik dan campur tangan penjajah Belanda saat masuk kawasan Nongkojajar pada tahun 1911.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implemetasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. (Yulianto, 2015).

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan

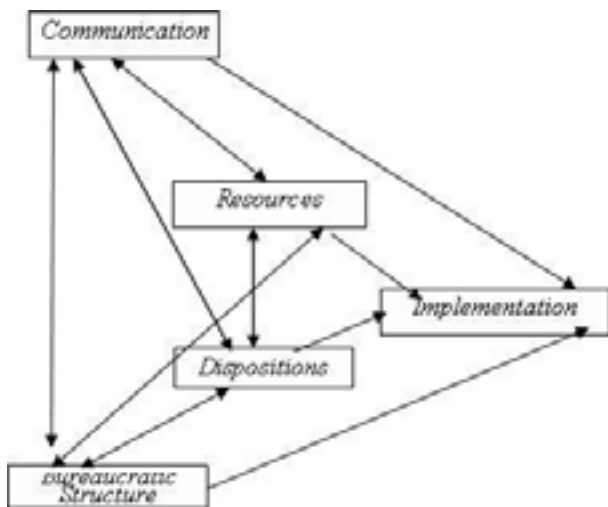
oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. (Hayat, 2018)

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George dan Edward III menunjuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut diantaranya :

- a) Komunikasi. Yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).
- b) Sumber Daya. Yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c) Disposisi. Yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
- d) Struktur Birokrasi. Yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh George Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. (Indiahono, 2009).

**Gambar 1 : Implementasi Kebijakan Publik Model George Edward III**



Sumber : Budi Winarno, 2004

Desa Kalipucang memiliki segudang potensi unggulan desa seperti Budaya, Wisata, Paket Tracking Bromo, dan Agrobisnis. Terhitung mulai 2015 hingga saat ini, Desa Wisata Kalipucang dijadikan sebagai Kampung Susu oleh pemerintah. Kampung susu memfokuskan pada edukasi sapi perah dari hulu ke hilir. Berbagai edukasi mulai dari perawatan sapi, pemerahan susu, pengolahan susu hingga menikmati susu segar, dijadikan sebagai destinasi wisata edukatif untuk disajikan kepada wisatawan.

Awal 2017 dirancangkan sebagai desa wisata. Untuk menggali potensi desa, mereka di damping avveroes. Lantas dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kalipucang Alam Lestari. Awalnya, warga bergotong royong membersihkan obyek wisata dan swadaya mengelolanya. Mulai 2018 dianggarkan masing-masing Rp. 1 Juta di setiap obyek wisata. Dana tersebut dialokasikan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kalipucang total sebesar Rp 1,2 Miliar. Dalam pengelolaannya Pokdarwis Alam Lestari bekerjasama dengan berbagai pihak. Pengelolaan Bukit Tumang bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kampung Susu dengan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dan Omah Kopi dengan kelompok tani. Kemudian pada tahun 2019 dalam SK Bupati Pasuruan

meresmikan Desa Kalipucang sebagai Desa Wisata.

Berangkat dari fokus permasalahan yang telah dirumuskan di atas mengenai proses Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang dengan menggunakan Teori George Edward III diantaranya sebagai berikut :

a) Komunikasi.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang dilakukan antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Dilihat dari komunikasi antar aktor kebijakan pariwisata di Desa Kalipucang sudah cukup baik. Adanya saling keterbukaan antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Kalipucang. Begitu juga dengan masyarakat Desa Kalipucang, mereka tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka, dan Pemerintah Desa sangat responsif akan keluhan atau kebutuhan masyarakat sehingga adanya kemudahan dalam mengembangkan potensi wisata yang ada.

b) Sumber Daya

Organisasi atau orang yang menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan pariwisata misalnya di tempat kerja disebut sebagai operator (tenaga kerja) pariwisata menggunakan sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan (sumber daya fisik), menyediakan atraksi budaya sebagai daya Tarik wisatawan (sumber daya budaya), dan menjual pemandangan alam sebagai atraksi wisata (sumber daya alam). Majunya suatu wisata tentu tidak lepas dari sumber daya yang sangat berkompeten di dalamnya seperti yang tercantum dalam teori George Edward III.

Desa Kalipucang merupakan Desa Wisata, dimana Desa Kalipucang dikatakan Desa yang sangat pesat perkembangannya. Hal tersebut di dukung oleh Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup melimpah meliputi pohon cengkeh, pohon kopi, pohon durian, pohon pisang, pohon sengon dan masih banyak lagi hasil perkebunan di desa Kalipucang. Jika dilihat

dalam atraksi budayanya, di Desa Kalipucang memiliki budaya diantaranya kesenian pencak silat, ojung, tari remo, dan rampok kentongan.

**Tabel 3. Sumber Daya Alam di Desa Kalipucang**

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Sungai	5000	Meter
2	Sumber Air	33	Titik
3	Air Terjun	2	Buah
4	Kebun Tanaman Pertanian:		
	Apel	-	Hektar
	Paprika	-	Hektar
	Bunga Krisan		Hektar
	Kentang	-	Hektar
	Kobis	-	Hektar
	Kembang Kol	-	Hektar
	Bawang	-	Hektar
	Wortel	-	Hektar
	Jagung	2	Hektar
	Cemara	-	Hektar
	Kopi	32	Hektar
	Durian	1,5	Hektar
	Sengon Laut	-	Hektar
	Rumput Gajah	54	Hektar
	Cengkeh	6	Hektar
	Lombok	1	Hektar
	Tomat	-	Hektar
5	Ternak Sapi Perah	27000	Ekor
6	Hutan Pinus	-	Hektar
7	Wisata Alam	3	Tempat

**Tabel 4. Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Kalipucang**

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1	Seni Hadrah	-	Grup
2	Albanjari	4	Grup
3	Jami'yah Tahlil	26	Kelmp
4	Jam'iyah Dibak	12	Kelmp
5	Terbang Jidor	-	Kelmp
6	Kuda Lumping/ Jaranan	1	Grup
7	Reog	-	Grup
8	Pencak Silat	3	Grup
9	Selamatan Desa	1	Kali/tahun
10	Ludruk	-	Grup
11	Wayang Kulit	-	Grup

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
12	Mocopat	-	Grup
13	Barik'an	-	Kali/tahun
14	Pethik	-	Kali/tahun
15	Kegiatan Adat	-	Kali/tahun
16	Pokdarwis	1	Kelmp
17	Kelompok Tani	5	Kelmp
18	Gapoktan	-	Kelmp
19	HIPPAM	3	Kelmp
20	Sepakbola	2	Klub
21	Bulutangkis	-	Klub
22	Bola Volley	3	Klub
23	Sepeda	1	Klub

#### c) Disposisi

Kecenderungan atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pariwisata berperan penting dalam sukses tidaknya suatu kebijakan. Karena sudut pandang seseorang berbeda dalam suatu hal. Dalam hal disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang sudah seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik. Namun dalam hal pengembangan destinasi wisata yang dijalankan oleh Pemerintah Desa masih banyak hambatan-hambatan yang menjadi tugas rumah Pemerintah Desa seperti fasilitas yang belum memadai, pendanaan hanya bersumber dari APBDes, kurangnya promosi serta belum ada investor yang ikut bergabung dalam pengembangan objek wisata di Desa Kalipucang. Semua gejala-gejala ini menjadi faktor kurang maksimalnya pengembangan destinasi wisata di Desa Kalipucang terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### d) Struktur Birokrasi

Agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Struktur birokrasi dibagi menjadi 2 yaitu : Standar Operasi Prosedur (SOP) dan penyebaran tanggung jawab. Dalam konteks implementasi kebijakan pariwisata yang



ada di Desa Kalipucang, SOP dan tanggung jawab mengatur destinasi wisata yang ada di Desa Kalipucang sudah berjalan dengan baik. Mereka berpedoman berdasarkan tugas pokok dan fungsi sehingga mereka membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan di dalam Pokdarwis tersebut juga memiliki sub-sub bidang yang lebih terinci yang memiliki tugas dalam mengembangkan pariwisata di Desa Kalipucang. Termasuk Pemerintah Desa juga ikut andil dalam mendukung pengembangan destinasi wisata di Desa Kalipucang.

### C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana terdapat faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukungnya adalah :

- a. Keindahan alam yang dimiliki. Hamparan lahan perkebunan yang luas serta udara yang sejuk. Mayoritas penduduk yang bermatapencaharian bertani dan beternak sapi juga memberikan daya Tarik tersendiri.
- b. Kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata (pemerintah, pihak swasta dan masyarakat) sudah siap menerima perkembangan desanya sebagai kawasan wisata. Responsif dan dukungan penuh dari masyarakat Desa Kalipucang dalam mengembangkan wisata menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan berkunjung atau menarik pengusaha dan investor.
- c. Adanya persaingan yang sehat antar petani dan peternak sapi berakibat pemerataan pendapatan. Masyarakat akan berlomba-lomba berinovasi menciptakan produk-produk dari hasil pertanian atau perkebunan mereka yang nantinya akan berdampak pada persaingan usaha yang sehat,

Sedangkan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang adalah :

a. K u r a n g n y a kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang belum diperbaikinya menuju wisata air terjun Sumber Nyonya, 7 (tujuh) Sumber Telogo, Bukit Tumang, serta menuju lahan perkebunan. Sarana dan prasarana merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan promosi.

b. K e t e r b a t a s a n modal yang menghambat kemajuan usaha yang dialami petani dan peternak sapi serta komunitas karang taruna dalam pengembangan wisata Desa Kalipucang sehingga tidak bisa berjalan dengan optimal.

### D. Implikasi Praktis Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang

Setiap kebijakan public yang diimplementasikan di suatu kawasan pasti membawa implikasi praktis baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dalam konteks penelitian ini implikasi dari kebijakan pariwisata di desa Kalipucang diantaranya:

- a. Dari aspek tujuan kepariwisataan bahwa di desa Kalipucang mampu memberikan peluang dan tantangan bagi warga desa setempat dalam peningkatan taraf perekonomian dari hasil susu sapi yang dilekola secara kolaboratif antara pemerintah desa dan kelompok peternak sapi desa setempat. Peluang pada peningkatan taraf perekonomian sangat membantu kelompok peternak sapi dalam bargaining harga dengan pihak industri INDOLAKTO sebagai pihak yang menjadi mitra pengambil hasil panen kelompok peternak. Namun disisi lain faktor keterbatasan pengetahuan keorganisasian dan juga pemanfaatan limbah ternak menjadi tantangan bersama bagi pemerintah desa kalipucang dan warga desa setempat, karena selama

ini masih belum termanfaatkan dengan baik

- b. Dari aspek ikon kelokalan, implementasi kebijakan pariwisata di desa Kalipucang berimplikasi positif bagi promosi desa, dimana desa kalipucang lebih dikenal sebagai desa wisata susu sapi.
- c. Dari aspek persaudaraan dan persahabatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini mampu mendorong warga desa setempat untuk saling berkomitmen memajukan usaha mereka dengan membentuk wadah kelompok peternak sapi dan pihak desa menyediakan Koperasi Usaha Desa (KUD) sebagai wujud advokasi pemerintah desa terhadap kepentingan warga desa dalam mengembangkan usahanya.
- d. Dari aspek kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan adanya implementasi ini, warga desa setempat lebih meningkat kesejahteraannya karena usaha mereka diadvokasi oleh pemerintah desa setempat dan juga warga mampu mengemas usaha mereka dengan pengembangan promosi di edukasi susu sapi dan juga pengenalan budaya gotong royong yang tercermin dengan adanya kelompok peternak sapi

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan teori George Edward III implementasi kebijakan memiliki empat variabel. dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang melalui Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sudah cukup berjalan dengan baik karena adanya saling keterbukaan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Kalipucang, sumber daya alam yang melimpah, serta struktur birokrasi yang sudah cukup berjalan dengan baik antara aparatur desa yang turut andil dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan tersebut tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung

dan penghambat. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang yaitu keindahan alam yang dimiliki, Hamparan lahan perkebunan yang luas serta udara yang sejuk. Mayoritas penduduk yang bermatapencaharian petani dan peternak sapi juga memberikan daya Tarik tersendiri. Kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata (pemerintah, pihak swasta dan masyarakat) sudah siap menerima perkembangan desanya sebagai kawasan wisata.

Responsif dan dukungan penuh dari masyarakat Desa Kalipucang dalam mengembangkan wisata menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan berkunjung atau menarik pengusaha dan investor. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang yaitu Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang belum diperbaikinya menuju wisata air terjun Sumber Nyonya, 7 (tujuh) Sumber Telogo, Bukit Tumang, serta menuju lahan perkebunan. Sarana dan prasarana merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan promosi. Keterbatasan modal yang menghambat kemajuan usaha yang dialami petani dan peternak sapi serta komunitas karang taruna dalam pengembangan wisata Desa Kalipucang sehingga tidak bisa berjalan dengan optimal. Selain itu, Implikasi Praktis dari Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang menunjukkan adanya perubahan ekonomi dan sosial yang positif baik dari aspek tujuan kepariwisataan, aspek ikon kelokalan, aspek persaudaraan dan persahabatan serta aspek kesejahteraan masyarakat

Adapun rekomendasi dari peneliti untuk Pemerintah Desa diharapkan bisa mengatur Dana Desa (DD) supaya bisa di alokasikan untuk pengembangan destinasi wisata yang sarana dan prasarannya masih belum memadai. Rekomendasi dari peneliti untuk Masyarakat Desa Kalipucang dan juga Pokdarwis supaya lebih giat lagi dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawab yang sudah diberikan untuk terus mengembangkan destinasi wisata yang ada di Desa Kalipucang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hayat. (2018). Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi. Malang: Intrans Publishing.
- Indiahono, D. (2009). Perbandingan Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Kumparan.com “Melihat Lebih Dekat Potensi Wisata di Desa Kalipucang “. 26 Maret 2018. di akses di HYPERLINK “<https://m.kumparan.com/kabarpasuruan/melihat-lebih-dekat-potensi-wisata-di-desa-kalipucang>” <https://m.kumparan.com/kabarpasuruan/melihat-lebih-dekat-potensi-wisata-di-desa-kalipucang>
- Miles, M. A. (2014). Qualitative data analysis A methods sourcebook. Ed.3. america: sage publications.
- Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muljadi. (2012). Kepariwisata dan Perjalanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuzil, N. R. (2020). Pengembangan Kawasan Agroeduwisata Berbasis Potensi Unggulan Desa. Media Trend.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik,- Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2021 tentang Desa Wisata
- Surat Keputusan Bupati Pasuruan Tahun 2019 Tentang Penetapan Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Sebagai Desa Wisata Kalipucang
- Surya.co.id, “ Raih Predikat Kampung Susu, Desa Wisata Kalipucang Pasuruan Terus Kembangkan Konsep Wisata Edukasi “. 11 November 2019 diakses di HYPERLINK “<https://surabaya.tribunnews.com/2019/11/11/raih-predikat-kampung-susu-desa-wisata-kalipucang-pasuruan-terus-kembangkan-konsep-edukasi-wisata>” <https://surabaya.tribunnews.com/2019/11/11/raih-predikat-kampung-susu-desa-wisata-kalipucang-pasuruan-terus-kembangkan-konsep-edukasi-wisata> .
- Sugiyono. 2010. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Yulianto, K. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo: UNG Press.



# Gerakan Sosial Kewirausahaan Berbasis Komunitas Desa Oleh IBEKA

Cantika Swasti, Sutriyono  
STID AL-HADID Surabaya  
cantikaswasti@gmail.com, sutriyono0775@gmail.com

## ABSTRACT

Electricity energy in the future, because it is realized that fossil energy will sooner or later be depleted and will be eliminated by humans, besides that its reserves are depleting and the impact of carbon emissions resulting from combustion systems produced by motorized vehicles and industry has become a central issue for the global community. In fact, the government is also encouraging the creation of renewable energy and launching the acceleration of electric vehicles. So that electricity can be said as energy that will be consumed by mankind in the future, leaving energy that has a negative impact on the environment and health. Thus, the community's efforts to create cheap and affordable electrical energy for the community, villages need support and appreciation from both the government and entrepreneurs, as has been done by IBEKA. Institute of Business and People's Economics (IBEKA). This IBEKA has a mission to develop renewable energy which is beneficial for community independence in the socio-economic and environmental aspects. His research aims to analyze the entrepreneurial process based on rural communities, considering that most of Indonesia's population resides in rural areas. The potential of rural areas is enormous to be developed well economically, culturally, socially and politically. The theoretical approach used to analyze the process of social entrepreneurship is based on the Business Canvas Model (CMB). This study uses a qualitative descriptive methodology. The result of this research is that IBEKA has succeeded in developing a hybrid social enterprise model that combines social and business.

**Keyword:** enterprenurship, electric, village community

## I. PENDAHULUAN

“Habis gelap terbitlah terang”, itulah sebuah karya R.A. Kartini yang terkenal yang merupakan hasil korespondensinya dengan para sahabatnya dinegeri belanda. Tetapi kita tidak sedang membicarakan karya R.A. Kartini yang mencoba mendobrak zaman kearah kemajuan, khususnya emansipasi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia “merdeka” yang terpenjara dalam sekat-sekat nilai tradisi yang tidak emansipatif.

Tulisan ini memiliki semangat yang sama yaitu keluar dari “kegelapan menuju cahaya”, keluar dari desa yang gelap tanpa penerangan menjadi desa yang terang benderang. Untuk mencapainya maka perlu sebuah energi yaitu listrik. Agar bisa membuat desa-desa terpencil menjadi terang benderang sehingga kemajuan bisa diraih dan dicapai. Bukankah

kemajuan dan keberhasilan adalah hak siapa saja yang mau berusaha untuk keluar dari berbagai kesuitan.

Dalam ajaran Islam senantiasa diajarkan bahwa kemajuan peradaban manusia ditentukan oleh kemampuan dan usahanya dalam merubah keadaan dari keterbelakangan baik secara ekonomi, pendidikan, teknologi dsb. Dalam bahasa agama, Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubahnya” (QS. Ar-Ra'd:11). Sehingga dalam teologi Islam tidak diperkenankan manusia untuk menyerah pada keadaan, karena manusia diberikan kemampuan akal dan diberikan manah sebagai “*khalifah*” (QS. Al Baqarah: 30), sebagai pemimpin dan pengelolah bumi tentu harus berusaha dengan sekuat tenaga mengelola sumberdaya baik alam maupun manusia. Dalam al Qur'an surah an-Nahl ayat

14: “dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan manusia untuk dapat memanfaatkan dan mengelola berbagai sumberdaya baik alam maupun manusia untuk kemakmuran dirinya, masyarakatnya maupun bangsanya. Sehingga dengan mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi-potensi alam maupun non alam. Potensi alam inilah yang dimanfaatkan oleh IBEKA yang dipimpin oleh Tri Mumpuni untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan sehingga dengan memanfaatkan potensi alam tersebut akan mendapatkan keuntungan baik keuntungan dalam bentuk pendidikan, ekonomi, kesejahtraan, kesehatan, termasuk kegiatan ibadah baik sosial maupun spiritual.

Dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam dan manusia sebenarnya apa yang dilakukan oleh IBEKA adalah upaya-upaya manusia dalam mendapatkan keuntungan dan menikmati karunia Allah SWT dan dari sana manusia bisa bersyukur, bukan hanya sekedar ucapakan lisan tetapi dalam bentuk mempotensikan sumberdaya alam dan manusia yang dikaruniakan oleh Allah SWT.

Sebuah usaha pemberdayaan masyarakat bidang energi terbarukan yang digagas oleh institut Bisnis dan ekonomi kerakyatan (IBEKA). IBEKA adalah sebuah NGO (non goverment organisation) yang bergerak di bidang sosial dan energi yang bertempat di Indonesia. Organisasi ini mengusahakan akses listrik murah dan berbasis pada energi terbarukan, khususnya energi air dan angin yang banyak terdapat di daerah-daerah terpencil. Dengan menghadirkan teknologi listrik yang mampu mengolah sumber energi

yang ada disekitar dan bersifat terbarukan. Upaya tersebut mampu memberdayakan masyarakat, khususnya daerah-daerah yang belum bisa dijangkau oleh perusahaan listrik negara.

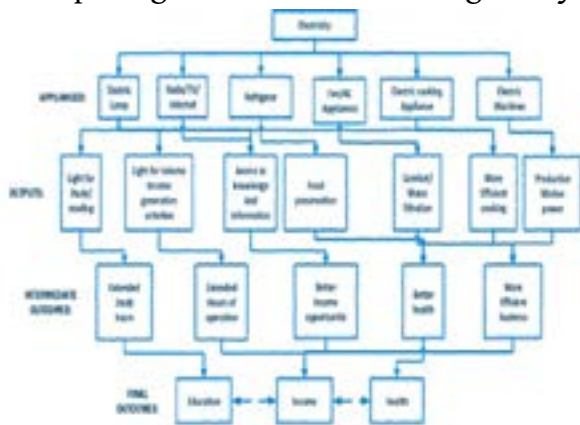
Selain menghadirkan teknologi, IBEKA juga melatih komunitas untuk dapat mengoperasikan teknologi secara mandiri, sehingga mereka bisa terlibat secara langsung dalam memelihara kelangsungannya. Dalam usaha penyelesaian masalah sosial ini, IBEKA menjalankan skema kewirausahaan sosial (Budhi Wibhawa, 2020). IBEKA mencoba menanamkan semangat kemandirian yang merupakan pijakan dasar bagi semua pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang termasuk bidang wirausaha sosial kelistrikan. IBEKA menawarkan produk dengan skema harga tertentu kepada sasaran masyarakat desa sekitar dan sasaran pengguna lainnya (Rangga Wiraspati: 2020). Sampai saat ini sudah ada 88 proyek yang telah diselesaikan dan dirawat oleh IBEKA sejak tahun 1992. Energi listrik memiliki peran yang vital bagi kehidupan manusia modern. Listrik sebagai sumber energi bagi rumah tangga dan industri baik besar maupun kecil tidak mungkin lepas dari energi listrik dan tentunya sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia.

Dalam sebuah keluarga dari anak hingga orang tua membutuhkan listrik. Anak-anak membutuhkan lampu untuk belajar dan butuh kipas angin untuk sirkulasi udara dan tidak meraa gerah, agar proses belajarnya bisa nyaman. Bahkan saat ini anak-anak juga bisa belajar lewat *smart phone* yang tentu sangat bergantung pada energi listrik. Kehadiran listrik adalah berkah tersendiri bagi manusia, seperti hadirnya api telah merubah dan menciptakan tatanan kehidupan baru dalam sejarah manusia.

Namun ketika hari mulai gelap, anak-anak mengalami kesulitan dalam meneruskan proses belajarnya. Penerangan dari lilin atau alat sejenis tidak cukup terang dan dapat berisiko bagi mata. Begitupun dengan orang

tua, setidaknya membutuhkan lampu untuk menunjang kerjanya supaya lebih produktif dengan bertambahnya jam kerja. (Maxensius Tri Sambodo & Rio Novandra, 2019: 132).

Khandker dkk, akses terhadap listrik dapat membantu manusia mengembangkan berbagai aspek misalnya; pendidikan, ekonomi, kesehatan, pertanian, peternakan dan lain-lain. Namun memang untuk menuju hasil tersebut tentu akses terhadap listrik saja tidak cukup, tetapi juga harus disertai usaha peningkatan kualitas dibidang lainnya.



Gambar 1. Skema Masalah Kelistrikan oleh Khandker dkk

Walau demikian, listrik memiliki potensi perbaikan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Padahal aspek-aspek yang disebutkan oleh Khandker dkk tersebut memiliki peran yang besar dalam pengembangan peningkatan kualitas hidup manusia.

Reiche dkk dalam penelitian Sambodo & Novandra (2019), menemukan bahwa elektrifikasi wilayah pedesaan atau daerah terpencil memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan sosial yaitu, naiknya standar hidup, penurunan tingkat penggunaan energi tradisional seperti kayu bakar yang berakibat pada kualitas kesehatan dan lingkungan yang lebih baik, peningkatan peluang pekerjaan, dan kenaikan produktivitas. Elektrisitas tentu juga berdampak pada kualitas ekologi yang sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik maupun mental masyarakat.

Sejalan dengan temuan lain dari Kanagawa & Nakata dalam penelitian yang sama,

bahwa akses listrik pada desa miskin di India memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap indikator-indikator kemiskinan yaitu pendidikan, kesehatan, pendapatan, serta lingkungan. Temuan hubungan akses listrik dengan kesejahteraan ini semakin menguatkan peran listrik dalam kehidupan manusia. Akses listrik tidak berhenti pada persoalan fisik atau infrastruktur saja, tetapi juga sosial. Pemerintah melalui kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan rasio elektrifikasi nasional mencapai 98,93 persen hingga April 2020. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi sentuh 99,99 persen di akhir tahun ini. Itu artinya pemerintah juga sangat berharap agar listrik bisa dinikmati oleh seluruh rakyat baik di perkotaan maupun dipedesaan.

Air, matahari, dan angin adalah sumber-sumber energi terbarukan yang memiliki berbagai dampak positif yang bisa didayagunakan oleh manusia. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi tentu sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat desa, apalagi yang berada di wilayah terpencil umumnya memiliki keterbatasan pada aspek pengetahuan, tenaga ahli, dan teknologi guna pemanfaatan sumber daya alam lokal menjadi energi terbarukan (Welhelmus Poek dan Irpoweliani Plaimo, 2018). Padahal potensi sumber daya alamnya memungkinkan mereka bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Tentu dibutuhkan solusi yang inovatif bagi permasalahan listrik khususnya di daerah-daerah terpencil, yang selama ini belum terjangkau perusahaan listrik negara. Solusi tersebut muncul dari sebuah yayasan IBEKA (Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan) merupakan organisasi non-profit yang mengembangkan model pemberdayaan listrik berbasis energi terbarukan, khusus bagi masyarakat daerah terpencil. Pemberdayaan listrik yang berbasis partisipasi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Hingga sampai saat ini IBEKA telah berhasil membangun proyek listrik baik yang

menggunakan sistem mikrohidro maupun listrik tenaga turbin angin.

Kesuksesan usaha kewirausahaan sosial kelistrikan yang dilakukan oleh IBEKA ini dapat ditandai dengan bertambahnya terus proyek pembinaan energi listrik pedesaan. Sampai saat ini, sudah tercatat 88 proyek yang telah diselesaikan dan terus dikelola IBEKA sejak tahun 1992. Dari listrik yang dikembangkan oleh IBEKA, penduduk setempat dapat memperbaiki kehidupan ekonominya seperti ibu-ibu yang dapat menenun kain sebagai pendapatannya setelah mereka dapat mamangkas waktu pengambilan air berjam-jam (kurang lebih 7 jam) dengan menggunakan listrik. (Michael Agustinus, 2020).

Bahkan Tri Mumpuni sebagai salah satu pendiri IBEKA pernah meraih prestasi internasional berkat usaha yang dilakukannya bersama IBEKA, salah satunya adalah ASEAN Social Impact Awards. Artinya kontribusi yang dilakukan IBEKA mendapat pengakuan secara luas. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari model kewirausahaan sosial yang diterapkannya. Penerapan prinsip kewirausahaan sosial secara operasional pada usaha yang dikelola menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi usaha *social enterprise (SE)*. (Dewi Meisari dkk, 2020: 205).

Trimumpuni lewat IBEKA juga mendapat penghargaan sebagai The Muslim 500 untuk kriteria Sains dan Teknologi. Dari latar belakang pentingnya pengembangan listrik khususnya di daerah terpencil dan desa-desa yang selama ini belum menikmati “cahaya terang” di malam hari, saat ini berpeluang bisa mengembangkan sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis pada sosial enterperpneuership pedesaan. Maka penelitian ini hendak menjawab rumusan masalahnya adalah bagaimana IBEKA melakukan pembangunan dan pemberdayaan sosial entrepreneurship kelistrikan berbasis komunitas pedesaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana proses pembangunan dan

pemberdayaan sosial entrepreneurship kelistrikan berbasis komunitas pedesaan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan secara positioning terhadap penelitian lainnya misalnya: Aisyianita (2017) melakukan penelitian berjudul “Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di D.I. Yogyakarta Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial”. Yang menjadi subyek penelitiannya adalah Desa Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, House of Lase, dan Difa City Tour. Penelitian ini bertujuan menemukan karakteristik dari kewirausahaan sosial bidang pariwisata pada ketiga subyek yang ditelitinya. Aspek yang diteliti meliputi; nilai sosial, modal sosial, serta inovasi. Adapun titik temu penelitian yang hendak peneliti lakukan, yakni deskripsi kewirausahaan sosialnya. Namun bidangnya berbeda, kewirausahaan yang diteliti oleh Aisyianita berada pada bidang pariwisata sementara penelitian peneliti pada bidang energi listrik berbasis sumberdaya alam terbarukan. Selain itu aspek yang diteliti oleh Aisyianita tersebut tidak mengacu pada tipe SE tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hendak mendeskripsikan model kewirausahaan sosial yang dijalankan IBEKA termasuk dalam tipe *Social Enterprice* tertentu.

Dalam penelitian lain, Safa’at dkk (2014) juga meneliti tentang kewirausahaan sosial yang dijalankan oleh suatu lembaga profesional, yaitu PT Bina Swadaya Konsultan yang merupakan anak perusahaan dari Bina Swadaya yang dikenal sebagai lembaga di Indonesia yang bergerak di bidang kewirausahaan sosial dan pengembangan masyarakat. Dalam penelitian tersebut menfokuskan pada strategi kewirausahaan sosial serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hal ini tentu berbeda dengan rumusan masalah peneliti yakni mengenai model penerapan kewirausahaan sosial. Model ini mengacu pada tipe yang dimiliki oleh *social enterprise*. Meskipun kewirausahaan sosial memiliki kriteria



dasar, tetapi pada pelaksanaannya terdapat keragaman.

Penelitian lain yang memiliki domain kewirausahaan sosial adalah penelitian Retno Kusumastuti, Eko Sakapurnama, Achmad Fauzi, dan Prima Nurita yang meneliti tentang kewirausahaan sosial pada Desa Wisata Bisnis Tegal Waru. Mereka menemukan bahwa Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru merupakan bentuk inovasi sosial dengan *value proposition* yang memberikan kemaslahatan untuk banyak orang dengan memberikan pembinaan dan pendidikan *entrepreneur* melalui desain pembelajaran interaktif bagi pengunjung dengan memberikan contoh aplikasi berbagai jenis usaha pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kajiannya, para peneliti menggunakan kanvas model bisnis yang membantu pengidentifikasian hal-hal yang ada pada Desa Wisata Bisnis Tegal Waru dalam menjalankan bisnisnya yang bertujuan pemberdayaan tersebut.

Selain penelitian-penelitian tersebut, terdapat penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Yaitu yang dilakukan oleh Budhi Wibawa pada objek sama: Yayasan IBEKA. Penelitian tersebut mengkaji tentang implementasi pelayanan sosial yang IBEKA lakukan dengan pendekatan *social enterprise*. Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus pada desa Cintamekar di Jawa Barat dan melakukan analisa dengan teori bentuk *social enterprise* oleh Defourny & Kim untuk mengkategorikan model IBEKA. Yang membedakan adalah objek yang lebih luas dan teori yang akan digunakan. Kategorisasi yang dilakukan Defourny & Kim berada pada lingkup Asia Timur. Sedangkan dalam penelitian ini, akan menggunakan teori model *social enterprise*/kewirausahaan sosial.

## II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menjelaskan model kewirausahaan sosial yang diterapkan oleh IBEKA pada bidang energi terbarukan. Artinya peneliti berusaha mendalami realitas

mode kewirausahaan yang dijalankan oleh IBEKA berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan gambaran unik mengenai model kewirausahaan sosial oleh IBEKA. Dikatakan unik, sebab pemahaman realitas dilakukan pada objek yang spesifik dan terbatas. Sehingga jenis penelitian yang peneliti akan lakukan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencari pengertian yang mendalam atas suatu gejala, fakta, atau realita.

## III. PEMBAHASAN

### A. Kewirausahaan dalam Islam

Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian (*biyadihi*), dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa ayat al-Qur'an maupun Hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini, seperti; "Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri, 'amalurraju' biyadihi (HR.Abu Dawud)"; "Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah"; "al yad al 'ulya khairun min al yad al sufla"(HR. Bukhari dan Muslim). Berusaha mempotensikan diri sendiri dengan memanfaatkan, mengupgrade potensiyangdimiliki baik potensialammaupun sumberdaya manusia lewat kewirausahaan tentu akan menghasilkan kemampuan sendiri, tidak banyak bergantung pada orang lain. Sehingga "menjadi tangan diatas" tidak menjadi "tangan dibawah" walaupun awalnya mungkin menjadi penerima bantuan, tetapi pada tahap berikutnya menjadi pemberi bahkan pemberdaya yang bisa menjadikan orang lain secara mandiri dan berkesinambungan memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Nabi mendorong umatnya untuk kerja keras supaya memiliki kekayaan, sehingga dapat memberikan sesuatu pada orang lain),(QS. An-Nisa: 77). Dalam memberikan bantuan kepada orang lain, tentunya setiap muslim diberikan kebebasan sesuai dengan kemampuannya, apakah dia mampu

memberikan sebagian hartanya, memberikan tenaganya, memberikan kemampuannya atau keahlian yang dimiliki atau ilmu yang dimiliki sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat muslim. Apa yang diberikan Trimumpuni berupa keahlian dan kemampuannya dalam mempotensikan sumberdaya alam untuk menghasilkan energi listrik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

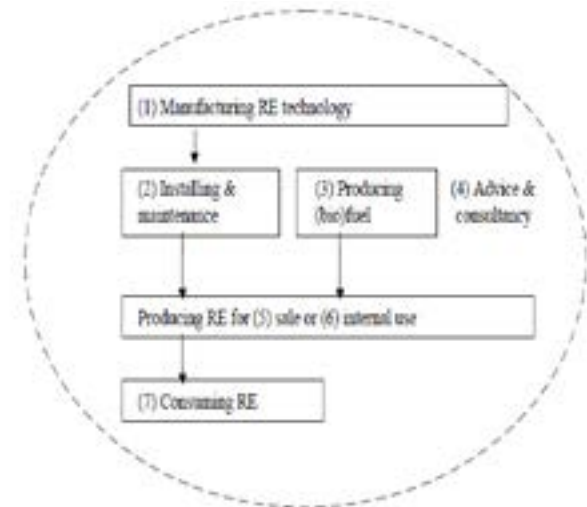
### B. Kewirausahaan Sosial Bidang Energi Terbarukan

Dalam sebuah jurnal yang berjudul *Social enterprise and renewable energy: emerging initiatives and communities of practice* meneliti beberapa *Social Enterprise* yang bergerak pada bidang energi terbarukan di Inggris. Terdapat temuan bahwa muncul beberapa masalah yang menyangkut sistem energi terpusat yang kemudian mendorong berkembangnya kewirausahaan sosial di bidang energi terbarukan berbasis komunitas desa (Dan van der Horst, 2008: 172). Adapun masalah-masalah tersebut meliputi sistem yang cenderung monopoli, model distribusi yang tidak merata, serta efek samping yang seringkali menyebabkan perubahan iklim. Kondisi demikian cenderung mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Selain itu terdapat beberapa penelitian yang meneliti mengenai kewirausahaan sosial di bidang energi terbarukan namun sifatnya lebih kepada studi kasus dengan penerapan energi terbarukan spesifik di berbagai wilayah negara.

Adapun nilai penting dari kewirausahaan sosial dalam bidang energi terbarukan. Pertama, dengan pendekatan ini nilai kemanfaatan yang didapat dua hal sekaligus yakni sosial dan lingkungan. Kedua, terdapat berbagai peluang pasar yang dapat mengembangkan usaha ini, mengingat beragamnya sumber daya energi terbarukan yang tersedia dalam berbagai wilayah berbeda. Ketiga, memungkinkan hubungan yang lebih menguntungkan antara produsen dan konsumen, yang cenderung sulit dicapai

ketika menggunakan sistem energi terpusat yang cenderung monopoli. Keempat, sumber daya energi terbarukan memungkinkan terjadinya proses berkelanjutan serta daur ulang sehingga menjamin ketersediaannya dalam jangka waktu yang panjang.

Sumber daya terbarukan yang berifat lokal atau kedaerahan memiliki potensi energi terbarukan yang menjanjikan dalam jangka panjangnya dan sekaligus dekat dalam kehidupan masyarakat lokal. Itu artinya pengembangan pada komunitas lokal dapat menyesuaikan dengan variasi sumber daya terbarukan yang dimiliki oleh yang ada dalam komunitas tersebut. Misalnya energi matahari, gelombang laut, pasang-surut, biomasa, air, angin, dsb. Variasi sumber daya yang dapat dijadikan energi ini memengaruhi perbedaan teknologi yang sesuai, skala produksi, tipe pemanfaatan, hingga potensi perkembangan lanjutan.



Gambar 2. Skema Sumber Daya Terbarukan

Pengembangan sumberdaya energi terbarukan dengan pendekatan kewirausahaan sosial mampu memberikan peluang bagi situasi yang selama ini tidak mendukung pengembangan energi terbarukan lokal melainkan dengan sistem terpusat. Pemanfaatan sumber daya alam lokal sebagai energi terbarukan memang membutuhkan teknologi berbiaya, tapi dengan adanya pendekatan kewirausahaan sosial hal ini dapat dijumpai dengan beragamnya sumber

pendanaan. Sehingga pengadaan fasilitas dan teknologi tidak bergantung pada pemerintah pusat utamanya soal pembiayaan. Berikut merupakan skema proses kegiatan kunci dalam rantai persediaan energi terbarukan: berdasarkan Kewirausahaan dan Konsumsi dalam supply-chain energi terbarukan.

Bagan di atas menjelaskan bagaimana skema dasar dalam rantai persediaan energi terbarukan yang dapat dikontekskan dalam kewirausahaan sosial. Skema ini pun dapat mengalami berbagai macam pengembangan sesuai kondisi yang aktual tempat dimana wirausaha tersebut dilakukan.

Salah satu praktik kewirausahaan sosial pada bidang energi terbarukan di Indonesia dapat ditelusuri pada usaha yang dilakukan oleh Sucipto untuk menerangi listrik di kawasan kaki Gunung Semeru. Sucipto yang merupakan warga daerah tersebut memiliki keinginan yang kuat bagi tersedianya listrik di daerahnya. Ia berhasil mengembangkan teknologi mikrohidro yang dapat digunakan sebagai penghasil energi listrik bagi masyarakatnya dengan biaya yang murah.

Gagasan Sucipto ini menghabiskan biaya yang lebih murah bagi warga penggunanya. Di samping menyediakan energi ramah lingkungan yang dapat berkelanjutan, Sucipto berhasil menyediakan energi alternatif berupa listrik murah bagi warganya. Bukan hanya itu Sucipto juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga di desanya.

Semua usaha yang dilakukan apakah terkait dengan penciptaan, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi mikrohidro sebagai kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh Sucipto ini tidak hanya diperuntukkan untuk konsumsi warganya sendiri. Sucipto juga mengembangkannya pada berbagai wilayah di pulau Jawa.

Selain di Indonesia, kewirausahaan sosial bidang energi terbarukan juga banyak dilakukan di berbagai penjuru dunia yang mengalami kesulitan akses terhadap jaringan listrik sentral. Misalnya seperti yang

dilakukan oleh M-Kopa Solar yang berpusat di Kenya.

Perusahaan ini bergerak pada bidang energi terbarukan dengan menggunakan energi sinar matahari atau *solar system* yang melimpah hampir sepanjang tahun. Misinya adalah menyediakan energi berkualitas tinggi yang terjangkau, khususnya masyarakat ekonomi bawah. Metodenya adalah dengan menyediakan produk teknologi *solar system* yang berbasis pada rumah yang digabungkan dengan teknologi lain yaitu ponsel dan *SIM Card* sebagai pengontrol. Produk listrik terbarukan tersebut dapat diaktifkan atau digunakan ketika penggunanya melakukan pembayaran melalui sistem (*mobile payment system*) yang terhubung dengan *SIM Card*. Inovasi energi terbarukan ini selain terjangkau dan menawarkan kemudahan serta kemandirian energi, juga ramah lingkungan dengan meninggalkan energi dari *Kerosene* yang mahal dan berdampak buruk bagi lingkungan. Walaupun memiliki berbagai keuntungan tersebut, tetap tidak mudah merubah masyarakat dari ketergantungan energi lama, maka untuk itu edukasi tetaplah hal utama yang harus didahulukan.

Produk yang ditawarkan adalah paket berupa: 2 lampu LED dengan tombol pengaturan kecerahan, 1 *LED portable solar torch light*, *phone charging USB with 5 standard connections*, radio solar, dan panel solar 8W. Produk tersebut akan menjadi milik pengguna secara keseluruhan ketika telah melunasi harga dengan pembayaran awal dan mencicil setiap tahun. Skema ini tentu berbeda dengan kebanyakan sistem energi yang cenderung tidak menjadi kepemilikan personal. Sistem pembayaran dibangun atas kerjasama dengan Safaricom (operator telekomunikasi), yang disebut '*pay-as-you-go*'. Pendanaan berasal dari berbagai sumber, diantaranya hadiah kompetisi kewirausahaan, investor, pinjaman, hingga pendapatan dari konsumen (Tonia Warnecke, 2016: 1-10). Dengan sistem pembayaran dan kepemilikan seperti itu akan

memudahkan masyarakat yang mayoritas dari kalangan ekonomi bawah.

### C. Profil IBEKA

IBEKA merupakan organisasi non-profit yang juga organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang energi, khususnya energi listrik terbarukan. Organisasi ini didirikan atas keresahan pada kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada pedesaan. Sehingga tujuannya adalah mengurangi ketidaksetaraan itu dengan melakukan edukasi dan pengembangan teknologi bagi wilayah pedesaan. IBEKA didirikan oleh Iskandar Budisaroso bersama dengan istrinya, Tri Mumpuni. IBEKA berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat pedesaan dengan menghubungkan kembali sumber daya lokal dengan teknologi yang sesuai. Organisasi ini mengkombinasikan penerapan teknologi dan kesadaran sosial untuk memberdayakan masyarakat desa dan kelompok marginal pada wilayah perkotaan. Tujuan dari apa yang dilakukannya ini tidak saja untuk meningkatkan pendapatan, tapi mendorong komunitas untuk merdeka atau mandiri dalam ekonomi serta kepercayaan diri atas komunitas.

Organisasi ini mengusahakan akses listrik pada daerah-daerah terpencil dengan menghadirkan teknologi listrik yang mampu mengolah sumber energi sekitar sehingga menjadi listrik yang mampu memberdayakan. Selain menghadirkan teknologi, IBEKA juga melatih komunitas untuk dapat mengoperasikan teknologi secara mandiri. Dalam usaha penyelesaian masalah sosial ini, IBEKA menjalankan skema kewirausahaan sosial, artinya gerak penyelesaian masalah sosial yang dilakukannya menggunakan wadah kewirausahaan sosial, dengan menawarkan produk dengan skema harga tertentu kepada sasaran masyarakat desa sekitar dan sasaran pengguna lainnya. Sampai saat ini sudah ada 88 proyek yang telah diselesaikan dan dirawat oleh IBEKA sejak tahun 1992.

Dalam menghadirkan solusi bagi masalah sosial terhadap akses listrik,

IBEKA mengembangkan berbagai skema produk sebagai sumber pendanaannya. Misalnya skema investasi, artinya IBEKA menanamkan modal dari berbagai dana yang diperolehnya dari berbagai sumber ke komunitas masyarakat desa untuk dilakukan pembangunan pembangkit listrik berbasis sumber daya alam setempat, yang kemudian secara perlahan masyarakat sasaran mampu memiliki pembangkit listrik mereka sendiri seiring dengan penguatan ekonomi. Selain itu IBEKA juga menjual jasa pelatihan bagi pemberdayaan masyarakat; menyewakan fasilitas pelatihan; hingga mengembangkan *cattle farm*. Dari berbagai sumber pendanaan tersebut, IBEKA dapat mengalokasikan dananya pada pemberdayaan listrik pada daerah-daerah terpencil, selain tentu untuk operasional yayasan (Budhi Wibhawa, 2020). Dalam menjalankan organisasinya, IBEKA memiliki struktur fungsi dengan penempatan sdm tertentu. Di dalamnya terdapat berbagai tim misalnya *project and planning, community development and social, program officer, enviromental*. Selain itu terdapat fungsi *social engineers, technical engineers, serta collaborator*.

### D. Diskusi

#### 1. *Value proposition,*

IBEKA sebagai lembaga pemberdaya wirausaha sosial bidang kelistrikan memiliki nilai lebih dibanding selainnya yaitu mampu menyediakan listrik murah, selain itu masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup, dimana mereka bisa memasak nasi dengan rice cooker, belajar anak-anak juga bisa dilakukan di malam hari dengan penerangan listrik, mengeringkan kopi dengan oven listrik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Sisi lainnya adalah mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk operator pembangkit listrik baik tenaga mikrohidro maupun tenaga angin. Selain itu listrik yang dapat dihasilkan, selain disalurkan kepada para pelanggan komunitas juga bisa dijual kepada pihak diluar komunitas, misalnya, PLN atau swasta yang membutuhkan.

Keuntungan ekonomi tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun infrastruktur desa. Dari sisi lingkungan dengan adanya pembangkit listrik terbarukan bisa mengurangi efek kerusakan lingkungan akibat gas emisi karbon yang menimbulkan efek rumah kaca. Pada bidang kesehatan kehadiran listrik ini bisa membantu puskesmas-puskesmas yang berada di daerah pelosok bisa menyimpan vaksin dan obat-obatan yang harus disimpan dalam lemari es. Dengan demikian puskesmas bisa mengantisipasi penyakit-penyakit yang bersifat menular dan membutuhkan vaksin, misalnya dalam masa pandemi Covid-19 ini justru sangat bermanfaat untuk menyimpan vaksin yang membutuhkan lemari es agar vaksin tidak rusak saat digunakan. Sebab vaksin tersebut membutuhkan tempat penyimpanan dengan suhu 2 hingga 8 derajat celsius.

Hadirnya listrik juga bisa mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru yang menggunakan sumberdaya listrik terbarukan, misalnya bengkel las, service elektronik, pengeringan kopi atau bisnis2 yang membutuhkan dukungan tenaga listrik, khususnya industri rumah tangga atau UMKM yang banyak dikembangkan di daerah-daerah terpencil atau pelosok untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dalam teori kewirausahaan sosial terdapat 2 jenis value proposition, yaitu: 1) self-empowerment & 2) people empowerment. Dalam konteks IBEKA, nilai preposisi sosial yang ditawarkannya adalah *people empowerment*. Jenis ini berarti manfaat sosialnya adalah untuk memberdayakan masyarakat atau komunitas luas di luar organisasi. Artinya IBEKA berusaha agar dengan pemberdayaan kelistrikan bukan hanya keuntungan material dari penjualan listrik, tetapi lebih pada bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan akan listrik dengan kemampuan mereka sendiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

## 2. *Customer Segment*

Segmentasi pengguna layanan produk dari IBEKA menyangkut dua pihak yang berbeda. Yang pertama merupakan pihak yang melakukan pembelian atau pembiayaan terhadap produk, sedangkan yang kedua adalah penerima manfaat dari produk tersebut. IBEKA memiliki produk berupa program pemberdayaan masyarakat di bidang energi terbarukan, yaitu membangun pembangkit listrik dengan energi lokal yang terbarukan. Pihak yang membiayai program tersebut berada dalam posisi sebagai pihak yang membeli produk pemberdayaan kelistrikan yang digagas oleh IBEKA, sedangkan sasaran program pemberdayaan kelistrikan adalah masyarakat desa atau wilayah-wilayah terpencil atau desa tertinggal, yang belum tersentuh akses listrik.

Skema ini mampu menjembatani biaya pembangunan pembangkit listrik yang memang tidak murah, tetapi menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Adanya pihak lain baik BUMN ataupun swasta yang memiliki dana besar dan kepedulian terhadap akses listrik untuk desa tertinggal atau wilayah terpencil dapat menjadi solusi bagi program tersebut. Kemitraan ini akan mampu menjembatani adanya kesenjangan pembangunan khususnya pada akses listrik yang diharapkan mampu turut mendorong ekonomi masyarakat desa tertinggal atau terpencil.

Adapun wilayah yang mendapatkan manfaat dari program pemberdayaan kelistrikan IBEKA berada di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan biaya proyek ini diperoleh dari donatur baik berasal dari swasta, pemerintahan atau BUMN dan luar negeri misalnya; Japanese Government (through the Japanese Embassy in Jakarta), HIVOS NETHERLAND, Swiss Contact-SKATT, Bank

mandiri dan tentunya PLN sebagai perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang kelistrikan.

### **3. Customer Relationship**

Dalam menjaga hubungan baik dengan pengguna layanan produknya, IBEKA mengembangkan beberapa cara. *Pertama* supaya program dapat berjalan dengan baik, diperlukan pendekatan interpersonal dengan masyarakat dengan metode 'live in'. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya pertemuan-pertemuan informal yang lebih jujur dan sesuai dengan keadaan masyarakat yang kebiasaan hidupnya cenderung guyub sebagaimana umumnya masyarakat pedesaan.

Cara ini memungkinkan IBEKA untuk mengenali kemauan, keinginan, harapan dan mungkin kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan sekaligus juga melakukan edukasi atas nilai penting dari adanya listrik dari potensi sumberdaya energi yang tersedia di daerah tersebut. Artinya IBEKA mencoba untuk melibatkan peran masyarakat setempat dalam usaha edukasi, pengenalan potensi, hingga pengambilan keputusan. Sehingga dalam setiap prosesnya masyarakat dilibatkan sehingga masyarakat merasa memiliki program tersebut.

Bahkan di masyarakat yang memiliki sistem pembagian kelas seperti di Sumba, dimana wanita dan kelas bawah (Ata) menjadi kelompok masyarakat marginal, mereka semua berusaha dilibatkan dalam diskusi-diskusi yang diadakan IBEKA dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, wanita dari kelompok sosial Ata disediakan forum yang mendorong kepercayaan diri dan antusiasme mereka dalam pembangunan listrik dengan cara memfasilitasi pembagian pengalaman antar wanita atas hidupnya. Dengan melibatkan masyarakat diberbagai lapisan dan menyesuaikan dengan kearifan lokal akan mendorong terjadinya internalisasi nilai-nilai positif dalam upaya pemberdayaan masyarakat bidang kelistrikan.

Metode tersebut secara khusus dinamai "River of Life". Dari pendekatan demikian,

masyarakat memberikan respon positif sejak awal proyek hingga pembangunan dilangsungkan, karena masyarakat merasa dilibatkan, sehingga merasa memiliki proyek tersebut. Dan tentu mereka akan berusaha menjaga kelangsungan program tersebut secara mandiri.

### **4. Channels**

Media yang ditempuh oleh IBEKA untuk menyalurkan layanan atau produknya kepada penerima manfaat adalah dengan cara distribusi langsung. Artinya IBEKA bertatap muka langsung dengan masyarakat penerimanya untuk dapat melakukan layanan produknya, yaitu pemberdayaan energi terbarukan dengan potensi lokal. Misalnya yang dilakukannya pada masyarakat Sumba, yaitu mendatangi mereka secara langsung dan mengadakan diskusi-diskusi informal untuk membaca kemauan, keinginan, harapan dan kendala-kendala warga, pengenalan program, hingga perumusan perangkat yang mendukung pembangunan listrik di desa mereka.

IBEKA ingin menawarkan nilai-nilai yang tidak saja berupa manfaat pembangkit listrik terbarukan bertenaga potensi sumberdaya lokal, tetapi juga kemandirian jangka panjang masyarakat untuk dapat menjaga dan mengelola pembangkit listrik tersebut. Artinya IBEKA juga menyiapkan agar masyarakat siap dan mampu untuk menerima dan menuai manfaat dari produk tersebut terlebih dahulu. Bahkan yang paling awal adalah melihat dan mengembangkan semangat atau passion dari masyarakat itu sendiri dalam membangun komunitasnya. Pendekatan langsung ini tidak saja berguna untuk memetakan keinginan kuat dari masyarakat untuk membangun dirinya, namun juga mendiskusikan bagaimana pembangkit listrik itu akan dibangun dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri. Teknologi pembangkit listrik juga langsung disalurkan pada masyarakat.

## 5. Key Activities

Terdapat beberapa aktivitas kunci yang dilakukan IBEKA dalam memproduksi dan mendistribusikan layanannya, yaitu: (aktivitas di bawah bukanlah tahapan yang berurutan)

- a. Pemetaan kemauan dan kemampuan masyarakat, serta asumsi masyarakat lainnya;
- b. Perumusan teknologi tepat guna;
- c. Pengajuan ijin pemerintah setempat untuk membangun listrik;
- d. Penyiapan manajemen dan rencana keuangan (penetapan tarif);
- e. Penggalan dana;
- f. Pelatihan tenaga ahli dari masyarakat;
- g. Pelobian pemerintahan dalam upaya listrik dapat dibeli PLN.

Hal pertama yang akan dilakukan IBEKA saat mendatangi masyarakat sasaran adalah mengajak dialog mereka untuk menemukan kemauan mereka terkait pembangunan listrik yang akan dilakukan di desanya.

Bagi IBEKA, apa yang disebut *passion* ini adalah hal penting pertama yang mesti ada dalam masyarakat sebelum diadakan pembangunan/ pemberdayaan kelistrikan dimulai. Kesadaran akan nilai penting pembangunan kelistrikan dari masyarakat itu sendiri harus hadir. Kemauan inilah yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mau terlibat dalam pembangunan dan selanjutnya melanjutkan pembangunan kelistrikan tenaga terbarukan secara mandiri.

## 6. Key Resources

Sumber daya manusia pada IBEKA berasal dari orang-orang profesional, artinya mereka yang direkrut adalah mereka yang memiliki latar belakang bidang teknik yang dibutuhkan maupun berjiwa kepedulian sosial. IBEKA tentu melakukan rekrutmen untuk melakukan pemberdayaan kelistrikan tersebut. Dimana karyawan atau stafnya digaji dalam nominal tertentu. Kepala divisi di IBEKA dapat digaji hingga mencapai 20 juta rupiah dalam satu bulan, sedangkan staf lapangan dapat digaji

hingga 4 juta rupiah dalam satu bulan (data tahun 2018). Mereka juga berlatar belakang pendidikan teknik sesuai dengan usaha IBEKA di bidang pembangunan teknologi pembangkit listrik, sekaligus memiliki jiwa kepedulian sosial.

Dalam laman resminya, IBEKA menyebutkan ada 12 insinyur sosial dan 11 insinyur teknik, serta 45 kolaborator yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Tanpa jiwa kepedulian sosial sumberdaya IBEKA tentu program tersebut tidak akan berhasil.

Kepedulian sosial juga menjadi salah satu sumber daya kunci kesuksesan program tersebut. Dengan semangat kepedulian sosial memungkinkan tim IBEKA dalam menjalankan misi sosialnya, dimana salah satunya adalah rela tinggal dengan masyarakat sebagai pendekatan awal dan pendampingan. Salah satu tahapan dalam sistem perekrutannya adalah seperti magang selama satu tahun untuk dapat menentukan apakah seorang pendaftar diterima menjadi karyawannya atau tidak. Dengan sistem magang ini pihak IBEKA bisa melihat kinerjanya, baik dari sisi kemampuan teknik maupun kemampuan sosial serta komunikasi dalam melakukan pendampingan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa IBEKA dalam membangun SDM-SDM-nya secara profesional. Baik dari latar belakang sdm hingga sistem perekrutan yang memiliki standar, terkait kemampuan teknik maupun kemampuan komunikasi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, tentu saja aspek moral.

IBEKA mampu mempekerjakan karyawan profesional yang memiliki gaji tidak lain sebab IBEKA memiliki pendanaan yang difungsikan sebagai pembiayaan operasional. Sehingga meskipun lebih banyak yang nampak adalah usaha sosialnya dalam memberdayakan masyarakat dengan mengandalkan pembiayaannya dari pihak donor, IBEKA juga mampu memberikan gaji yang layak bagi karyawannya. Pendanaan

untuk biaya operasional ini didapatkan dari penyewaan tempat pemberdayaan yang dimilikinya, cattle farming, serta kompensasi dari pemberdayaan energi yang dilakukannya di luar negeri.

### **7. Key Partnership**

Mitra kunci IBEKA melingkupi beberapa pihak, mulai dari donatur, pemerintah setempat, pemerintah pusat, PLN, hingga universitas. Masing-masing mitra tersebut memiliki peran yang berbeda terhadap usaha yang dijalankan oleh IBEKA.

Para mahasiswa Universitas Stanford dapat terlibat dalam program ini, ketika Tri Mumpuni ikut dalam program yang dimiliki oleh universitas tersebut, yaitu Eisenhower Fellowship pada tahun 2009. Setelah terjalin hubungan dan kerjasama dalam program tersebut, maka para mahasiswa Universitas Stanford terus mengunjungi IBEKA untuk bekerja diprogram pemberdayaan tersebut.

PLN sebagai mitra penting yang mendukung program pembangunan listrik yang dijalankan oleh IBEKA. Hubungan ini dapat terjadi ketika regulasi pembelian listrik dari masyarakat ditetapkan negara pertama kali pada tahun 2009. Meskipun pada tahun berikutnya regulasi tersebut dicabut dan diganti dengan regulasi lain yang juga mengakomodasi pembelian listrik dari masyarakat.

### **8. Revenue Stream**

Ada 3 macam bentuk pendanaan yang dilakukan oleh IBEKA: sosial, semikomersil, dan komersil. Untuk dana sosial berasal dari donor, mulai dari individu, lembaga (misalnya UN-ESCAP), perusahaan, hingga pemerintah. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah. Asalnya dari luar negeri maupun Indonesia. Seperti yang telah disebutkan pada customer segment bahwa donor memainkan peranan penting untuk membiayai pembangunan listrik energi terbarukan di komunitas masyarakat.

Untuk dana semikomersil adalah dari pinjaman lunak yang menggunakan suku

bunga rendah dan jangka pengembalian dana yang lebih panjang. Jenis pendanaan demikian tidak termasuk komersil, sebab model hutang pada umumnya memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan memiliki jangka waktu pengembalian yang lebih singkat. Jika ditarik dasarnya karena memang model hutang demikian adalah berorientasi untung, sehingga strategi permodelannya adalah mencari jalan bagaimana dana yang dihutangkan memberikan keuntungan secara cepat dan tinggi.

Selain itu pendanaan semikomersil juga datang dari kompensasi kegiatan sosial IBEKA yang dilakukan di luar negeri (pengembangan energi terbarukan untuk komunitas, misalnya di Filipina dan Timor Leste), pelatihan seputar pemberdayaan masyarakat di dalam maupun luar negeri. Sedangkan untuk pendanaan komersil berasal dari penyewaan tempat pelatihan yang dimiliki IBEKA dan dari cattle farming.

Dengan demikian masing-masing pendanaan memiliki karakteristik dan perannya masing-masing, seperti: donor yang lebih banyak untuk pembiayaan program pemberdayaan energi terbarukan masyarakat; pinjaman lunak untuk pengembangan proyek yang umumnya menggunakan skema grid-connected; aktivitas-aktivitas IBEKA lainnya yang termasuk dalam jenis semikomersil dan komersil untuk pembiayaan operasional.

### **9. Cost Structure**

Secara umum struktur cost banyak dialokasikan pada biaya pengembangan proyek listrik terbarukan dan biaya operasional serta pengembalian pinjaman yang bersifat profite.

### **10. Organizational Goals**

IBEKA dilihat dari perkembangan proyek yang dilakukannya sekarang dimana proyeknya semakin banyak, tidak saja asal usaha terus ada, maka dapat dibilang IBEKA memiliki orientasi sustainable and development. Artinya IBEKA menggerakkan usahanya tidak saja asal terus ada, seperti umumnya ditemukan pada model koperasi, tapi juga



berorientasi berkembangannya cakupan manfaat yang ditandai dengan bertambahnya terus proyek pembangunan listrik berbasis energi terbarukan. Dalam konteks IBEKA, misalnya ia melakukan bentuk kerjasama dengan perusahaan privat untuk terlibat dalam programnya dengan skema investasi. Dalam kesempatan lain, IBEKA juga mengembangkan program-program pelatihan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan bekerjasama bersama pemerintah. Tetapi dalam sumber lain menyebutkan bahwa IBEKA juga berusaha untuk membangun independensi atas pendanaannya, baik melalui unit usaha yang sudah dijalankannya, maupun dengan mengembangkan investasi pada skema pembangunan pembangkit listrik model grid-connected. Pendanaan secara mandiri merupakan salah satu ciri orientasi pertumbuhan. Namun meskipun demikian, pendanaan di IBEKA masih banyak bersumber dari donor.

Sekalipun terdapat usaha untuk pengembangan pendanaan yang mengarah pada kemandirian tidak sama dengan apakah pendanaan donor yang selama ini menjadi pendanaan utama akan ditinggalkan atau digantikan. Artinya memang terlihat pengembangan skala usaha bisnisnya (walaupun semikomersil), tetapi untuk saat ini tidak terlihat hal demikian menjadi pendanaan utama. Sebab skema *grid-connected* sendiri jumlahnya masih 4, jauh lebih besar skema off-grid, padahal skema investasi mampu dilakukan pada skema *grid-connected*.

Sebab pada skema tersebut, listrik terhubung langsung dengan jaringan listrik negara. Dengan demikian memungkinkan untuk dilakukan penjualan listrik kepada PLN dan kecenderungan pembangunannya akan berusaha memaksimalkan daya listrik sebanyak yang dibisa sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Hal ini berbeda dengan skema off-grid yang listriknya hanya untuk konsumsi komunitas itu saja, sedang di satu sisi memang belum terhubung dengan jaringan listrik negara. Skema ini biasanya berkembang

untuk masyarakat yang memang belum ada akses listrik dari negara (listrik PLN). Jadi, target pengembangan organisasinya masih dalam tahap development, belum growth. Dari usaha yang dilakukan untuk membuat proyek listrik dengan sumberdaya terbarukan yang dimulai tahun 2010 hingga tahun 2019 sudah ada 34 wilayah di seluruh Indonesia dengan menghasilkan lebih dari 822,93 KW.

### 11. Ownership & Control

IBEKA dalam pengelolaannya secara internal menggunakan pendekatan demokratis. Pendiri dan Executive Director, Tri Mumpuni tidak menjadi satu-satunya orang yang memutuskan dalam pengelolaan, melainkan ada di tangan manajer. Tri Mumpuni sering dijuluki ‘wanita listrik’. Bahkan Tri Mumpuni berhasil mendapatkan Nobel atau award Ashden Awards 2012. Ashden adalah lembaga swadaya masyarakat Inggris yang terlibat dalam energi ramah lingkungan. Pangeran Charles menjadi salah seorang penanggung jawab Ashden Awards.

Dalam bagan di bawah, terdapat struktur organisasi yayasan IBEKA yang memperlihatkan bagaimana pengaturan kerja di dalamnya. Yang bertanggungjawab atas segala pekerjaan yang dilakukan IBEKA adalah direktur manajer.



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Yayasan IBEKA

Namun para staf dalam manajemen berhak memberikan pendapatnya dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan sebab barangkali salah satu faktornya adalah sistem rekrutmen yang menunjukkan pemilihan sdm akan menyeleksi orang-orang yang paham visi dari IBEKA dan siap menerima konsekuensi kerja dari visi tersebut.

Artinya orang-orang di dalam IBEKA adalah orang-orang yang memiliki kepedulian sosial sama seperti pendiri. Sehingga dalam kesempatan-kesempatan pengambilan keputusan, mereka dapat memberikan pendapat untuk kemajuan organisasi. Dengan demikian, pola kontrolnya termasuk demokratis dan tidak terpusat pada satu pihak.

Sedangkan kepemilikannya sebagai organisasi nirlaba yang berbentuk yayasan termasuk dalam kepemilikan kolektif.

## **12. Model Kewirausahaan Sosial**

Dari tahapan sebelumnya ditemukan bahwa: 1) social value proposition dari IBEKA adalah people empowerment, 2) customer segment IBEKA adalah dua pihak yang berbeda, 3) key human resources IBEKA adalah profesional dan relawan, 4) revenue stream yang diandalkan oleh IBEKA menyangkut dana sosial, semikomersil, dan komersil, 5) organizational goal-nya adalah sustainability and development, dan 6) ownership & control-nya ialah kolektif-demokratis. Hasil analisa demikian menurut penulis dapat diidentifikasi pada model *hybrid social enterprise*.

Model *hybrid social enterprise* biasanya memiliki nilai preposisi people empowerment. Artinya berusaha untuk memberdayakan komunitas masyarakat yang lebih luas dan biasanya tidak berasal dari pendiri organisasi tersebut. IBEKA memberdayakan masyarakat pedesaan terkait pengembangan energi terbarukan, supaya dapat menjadi jalan bagi mereka melakukan pembangunan terhadap diri mereka sendiri.

Pemberdayaan yang dilakukannya pada suatu komunitas dibiayai oleh kelompok lain, yaitu para donor atau memang pihak yang menginginkan adanya pemberdayaan energi terbarukan atas suatu komunitas. Sehingga terdapat perbedaan pengguna layanan atas nilai preposisi yang ditawarkannya.

Bentuk kewirausahaan sosial demikian umumnya menginginkan manfaat sosial yang diberikannya mampu berkembang lebih banyak dan lebih luas, tidak saja sekedar berkelanjutan. Karena itu membutuhkan tenaga profesional yang umumnya bekerja berdasarkan ilmu dan kompetensi, sehingga hasilnya juga mampu baik. Terbukti hasil kerjanya selama lebih dari 20 tahun, sudah mengembangkan 88 proyek di sebagian besar wilayah Indonesia dan beberapa di luar negeri.

Namun bentuk ini juga membuka komposisi tenaga relawan, yang dalam konteks IBEKA adalah para mahasiswa, artinya pun mereka juga memiliki ilmu terkait dan memiliki orientasi pengembangan ilmunya, sehingga akan memberikan dampak positif bagi usaha kewirausahaan sosial yang dijalankan. Pendanaan berasal dari beragam jenis dana, baik itu sosial, semikomersil, maupun komersil. Meskipun dalam konteks IBEKA lebih banyak mengandalkan pendanaan sosial. Dalam pengambilan keputusan IBEKA, banyak dilakukan secara demokratis dengan mendorong rasa kepemilikan bersama, tapi juga terkadang dilakukan secara autokratis dan individual. Dalam pengertian masing-masing staf memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Dan keputusannya tidak terpusat pada pendiri.

## **IV. PENUTUP**

Kewirausahaan sosial yang dijalankan oleh IBEKA masuk ke dalam model *hybrid social enterprise*, bahwa: 1) social value proposition dari IBEKA adalah people empowerment, 2) customer segment IBEKA adalah dua pihak yang berbeda, 3) key human resources IBEKA adalah profesional dan relawan, 4) revenue stream yang diandalkan oleh IBEKA

menyangkut dana sosial, semikomersil, dan komersil, 5) organizational goal-nya adalah sustainability and development, dan 6) ownership & control-nya ialah kolektif-demokratis.

IBEKA yang memiliki misi people empowerment berusaha untuk memberdayakan masyarakat pedesaan mengalami masalah energi. Pendanaannya dapat berupa dana sosial maupun semikomersil tergantung kemampuan masyarakat dan potensi lokal setempat.

Pengguna layanan IBEKA mencakup 2 pihak yang berbeda, antara penerima manfaat dengan pihak yang membiayai. Para penerima manfaat ini adalah masyarakat pedesaan yang memiliki masalah energi. Sedangkan pihak yang membiayai proyek pemberdayaan tersebut adalah donor dan pemerintah. Kepada masyarakat penerima manfaat tersebut, proyek yang dilakukan IBEKA menghasilkan manfaat bagi produktivitas, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup, yaitu: masyarakat memiliki pendapatan tambahan, terdapat lapangan pekerjaan baru, peningkatan produktivitas pertanian, perkembangan layanan kesehatan masyarakat, pertambahan jam belajar anak-anak, pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian ekosistem, dsb.

Upaya yang ditempuh IBEKA untuk menjaga hubungan baik dengan penerima manfaatnya adalah pendekatan personal, dialog atau diskusi partisipatif, serta penghargaan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Sedangkan untuk para donor, dilakukan dengan memegang prinsip akuntabilitas. Dalam rangka pemberdayaan yang dilakukannya, IBEKA menggunakan tenaga profesional yang digaji dan memiliki kompetensi terkait bidang kerja IBEKA. Hal ini dapat ditunjang dengan pendanaan operasioanalnya yang semikomersil dan komersil, meskipun proyek yang dilakukannya sebagian besar masih bersifat sosial. Selain itu, IBEKA juga menerima relawan mahasiswa yang ingin mengembangkan kompetensi dan

ilmunya untuk bekerjasama dengannya dalam proyek yang dijalankan IBEKA. Namun tetap yang utama adalah para karyawan profesional yang dimiliki IBEKA.

Adapun kegiatan kunci yang dilalui IBEKA adalah: 1) pemetaan kemauan dan kemampuan masyarakat beserta asumsi lainnya; 2) perumusan teknologi tepat guna; 3) pengajuan ijin pemerintah setempat; 4) penyiapan manajemen dan penetapan tarif; 5) penggalan dana; 6) pelatihan tenaga ahli dari masyarakat; 7) pelobian pemerintahan dalam upaya listrik dapat dibeli PLN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lubis. (2007) "Energi Terbarukan dalam Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Teknik Lingkungan*. <https://doi.org/10.29122/jtl.v8i2.420>
- Agustinus, Michael. (2020) "Mengenal Tri Mumpuni, Pahlawan yang Menerangi Desa-desa Terpencil". diakses 25 Agustus <https://m.detik.com/finance/wawancara-khusus/d-3341796/mengenal-tri-mumpuni-pahlawan-yang-menerangi-desa-desa-terpencil>
- Bayu, Dimas Jarot. (2020) "Terkendala Infrastruktur dan Energi, 433 Desa Belum Teraliri Listrik". 15 Juli 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/03/terkendala-infrastruktur-dan-energi-433-desa-belum-teraliri-listrik>
- Budiman, Ibnu. (2020). "Setumpuk Kendala Penyebaran Biogas". diakses 2 September 2020 <https://wri-indonesia.org/id/blog/setumpuk-kendala-penyebaran-biogas>
- Dewi Meisari, dkk. (2015) *Berani Jadi Wirausaha Sosial?* DBS Foundation.
- Horst, Dan. (2008). "Social Enterprise and Renewable Energy: Emerging Intitiatives

- and Communities of Practice”. *Social Enterprise Journal*. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17508610810922686/full/html>
- Kurniawan, Frendy. (2020). “Menghitung Ulang Ancaman Krisis Listrik di Masa Depan”. Diakses 20 Juli 2020. <https://tirto.id/menghitung-ulang-ancaman-krisis-listrik-di-masa-depan-cl7Z>
- Noor, Munawar. (2011). “Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1: 94. <http://103.98.176.9/index.php/civis/article/viewFile/591/541>
- Novandra, Rio & Sambodo, Maxensius Tri. (2019). “The State of Energy Poverty in Indonesia and Its Impact on Welfare”. *Energy Policy Journal* 132: 113 – 121. Diakses pada 15 Juli 2020 <https://doi.org/10/1016/j.enpol.2019.05.029>
- Martin, Roger L. & Osberg, Sally. (2007) “Social Entrepreneurship: The Case for Definiton”. *Stanford Innovation Review*. <http://www.ngobiz.org/picture/File/Social%20Enterpeuneur-The%20Case%20of%20Definition.pdf>
- Poek, Welhelmus & Plaimo, Irpoweliani. (2018). “Pengembangan Energi Terbarukan Berdasarkan Masyarakat di Daerah Terpencil dan Kontribusinya Terhadap Perubahan Iklim dan Kesejahteraan Masyarakat”. dipresentasikan dalam Seminar Nasional Teknologi. <https://jurnal.teknikunkris.ac.id/idex.php/SEMNASTEK/article/viewFile/57/53>
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Roza, Prima. (2007). “Pendidikan dan Mutu Manusia”. *Jurnal Sositeknologi* 12: 306. <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/988>
- Suryabrata, Sumadi. (2014) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Usman, Husnaini & Akbar, Purnomo Setiady. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vito, Benekditus; Krisniani, Hetty; Resnawaty, Risna. (2015). “Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota”, *Prosiding KS: Riset & PKM* vol 2: 248. <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13533>
- Warnecke, Tonia. (2016). “Let There Be Light: Social Enterprise, Solar Power, and Sustainable Development”. *Faculty Publications*: 1 – 10. [https://scholarship.rollins.edu/as\\_facpub/229](https://scholarship.rollins.edu/as_facpub/229)
- Wibhawa, Budhi. (2018). “IBEKA’s social services delivery model in indonesia’s micro hydro power (case study in Cintamekar village)”. *Human System Management* 37: 387 – 397. <https://content.iospress.com/articles/human-systems-management/hsm1628>

# Collaborative Governance Dalam Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19

Retno Sunu Astuti<sup>1</sup>, Taufik<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro, <sup>2</sup>Dosen Ilmu Administrasi Negara, FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

<sup>1</sup>retnosunu@gmail.com, <sup>2</sup>taufik.fisip@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic has changed the world's learning system, from face-to-face to online (online). The transition of this system is a challenge that must be faced by education providers. This study aims to map the challenges faced in online learning, and analyze the use of a collaborative approach to deal with them. This research uses a qualitative descriptive approach, by utilizing literature and articles that are traced through literature studies. The results of the study found three challenges faced in online learning, namely: technology, socio-economics, and digital competence. There are five stakeholders in online learning collaboration during the COVID-19 pandemic, namely the government, the private sector, NGOs, universities, and the mass media. These stakeholders have their respective roles according to their capacities. Collaboration can work well by directly involving stakeholders in decision making, built through intensive communication between stakeholders in delivering creative and innovative ideas to solve online learning problems.*

**Keywords:** collaborative governance, the covid-19 pandemic, online learning, stakeholders.

## I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 membawa perubahan cara pandang, kebiasaan, dan perilaku masyarakat dari kebiasaan lama ke tatanan *new normal*. Hal ini ditandai dengan transformasi cara kerja dari manual dengan tatap muka menjadi berbasis digitalisasi (Taufik & Warsono, 2020). Selain mengancam kesehatan manusia, covid-19 juga berdampak pada kemerosotan ekonomi dunia (Shangguan et al., 2020). Tidak hanya itu, sektor transportasi, hotel, dan restoran juga ikut berdampak (Mas'udi & Winanti, 2020), termasuk sektor pendidikan.

Saat ini, layanan pendidikan di Indonesia pada umumnya telah beralih dari pembelajaran tatap muka ke metode pembelajaran *online* atau sering disebut "daring" (dalam jaringan). Pembelajaran daring merupakan penggunaan internet dan beberapa teknologi penting lainnya untuk mengembangkan materi untuk tujuan pendidikan, penyampaian instruksional, dan pengelolaan program (Fry, 2001). Istilah ini semakin populer di kalangan masyarakat

seiring dengan dikeluarkan kebijakan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah dengan tujuan salah satunya untuk pemenuhan hak peserta didik agar tetap memperoleh layanan pembelajaran sepanjang darurat covid-19.

Pembelajaran daring bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia Pendidikan Tinggi. Di Amerika Serikat metode pembelajaran ini telah digunakan sejak tahun 1982. Saat itu, Universitas Chicago meluncurkan program pembelajaran jarak jauh pertamanya untuk pendidikan tinggi (Suryatmojo et al., 2020). Sementara untuk Indonesia, Universitas Terbuka menjadi pionir yang menerapkan pembelajaran daring, atau dikenal dengan sebutan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada tahun 2002 (Andriani, 2003). Sistem pembelajaran ini memungkinkan peningkatan akses pendidikan tinggi dan bermutu bagi

calon mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia dengan biaya yang lebih efisien.

Pergeseran paradigma baru dalam dunia pendidikan tinggi telah terjadi di era pandemi covid-19. Dari pendidikan yang terbatas dalam ruang dan waktu, kini bermigrasi menjadi program jarak jauh dapat menjangkau masyarakat lebih luas dengan menggunakan teknologi. Pergeseran pembelajaran tatap muka ke daring bukanlah pekerjaan yang mudah. Terlebih lagi bagi perguruan tinggi yang sama sekali belum mempunyai pengalaman dalam menerapkan pembelajaran daring. Tidak semua perguruan tinggi didukung dengan dosen dan tenaga kependidikan yang melek teknologi. Hal ini menciptakan permasalahan baru, sekaligus menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk cepat beradaptasi dengan dunia digitalisasi. Disisi lain, permasalahan akses internet yang belum merata di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga mengakibatkan keterbatasan bagi daerah, khususnya bagi daerah yang termasuk dalam wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3 T). Permasalahan ini menjadi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam penerapan pembelajaran daring.

Berdasarkan hasil penelitian (Padmo et al., 2020) terkait pembelajaran *online* selama pandemi covid-19 di Indonesia menemukan 83% mahasiswa mengalami kendala pada koneksi internet. Angka ini menunjukkan representasi kesulitan umumnya yang dialami oleh mahasiswa dalam mengakses internet di berbagai daerah di Indonesia. Ada mahasiswa yang harus berjuang lebih kuat untuk mendapatkan sinyal internet, seperti yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh harus memanjat pohon demi mendapatkan sinyal (Serambinews, 2020). Di beberapa daerah lainnya, kendala yang dihadapi pada sambungan listrik yang tidak stabil, hal ini ikut memengaruhi pada koneksi internet (Padmo et al., 2020).

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran daring selama pandemi covid-19 belum berjalan optimal. Namun, disatu sisi perguruan tinggi harus tetap *survive* menghadapi situasi yang *unpredictable* seperti sekarang ini. Data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020 jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.621 dengan jumlah program studi 28.879. Jumlah tersebut melayani 8,3 juta mahasiswa, sehingga perguruan tinggi harus beradaptasi cepat untuk terpenuhi layanan pendidikan. Bagaimana perguruan tinggi tetap *survive* dan strategi apa yang harus ditempuh oleh perguruan tinggi untuk tercapainya optimalisasi pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi covid-19? Tulisan ini lebih lanjut akan memetakan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring dan menganalisis yang berfokus pada membangun kolaborasi dengan lintas aktor dalam penyelesaian masalah yang selama ini di hadapi selama pembelajaran daring di perguruan tinggi.

Model *collaborative governance* muncul sebagai respon terhadap masalah publik yang kompleks. Permasalahan yang telah diuraikan di atas merupakan masalah yang kompleks, sehingga, menyelesaikan masalah yang kompleks diperlukan keterlibatan berbagai aktor di dalamnya (Astuti et al., 2020). Pendekatan kolaboratif bertujuan untuk tercapainya keefektifan manajemen publik melalui keterlibatan lintas aktor, baik aktor pemerintah, swasta, NGO, Perguruan Tinggi, dan media massa.

## II. METODOLOGI

Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan tipe penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan rujukan referensi buku, literatur, catatan, dan bermacam laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian (Nazir, 1998). Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: *pertama*, melakukan penelusuran

berbagai temuan dengan menggunakan kata kunci; pembelajaran daring, *e-learning*, atau sejenisnya dari berbagai sumber dari hasil penelitian. Penelusuran dilakukan melalui sumber jurnal penelitian, *website* lembaga resmi pemerintah yang terkait dengan pembahasan penelitian ini, serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan fokus kajian. Setelah ditelusuri kemudian membaca, dan mencatat bagian-bagian penting yang menunjang dengan pembahasan dalam penelitian ini. *Kedua*, memadukan seluruh temuan baik konsep, model, maupun teori dari pembelajaran daring. *Ketiga*, melakukan analisis dari setiap temuan dari bahan bacaan, baik hasil penelitian sebelumnya, data-data, praktik terbaik yang berkaitan dengan penelitian ini. Keempat adalah mengelaborasi model maupun pendekatan yang berbeda dari penemuan dalam studi sebelumnya yang menjadikan sisi berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Potret Pembelajaran Daring Di Indonesia Masa Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 mengubah metode pembelajaran di seluruh dunia. Namun, transformasi dari pembelajaran manual ke digitalisasi belum berjalan dengan baik. Laporan baru yang dirilis oleh lembaga internasional membidangi anak, UNICEF mengungkapkan bahwa setidaknya sepertiga anak di seluruh dunia atau dengan jumlah 463 juta anak menghadapi kesulitan dalam mengakses pembelajaran *online* setelah kegiatan di sekolah dihentikan akibat covid-19 (Unicef, 2020a).

Sementara untuk Indonesia, survei yang sama dilakukan oleh UNICEF, pada tahun 2020 melalui kanal U-Report yang terdiri dari SMS, WA, dan *Facebook Meesenger* yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil survei sebanyak 3.949, atau 69% responden dari total jumlah pemilih 4.019, mengatakan bosan belajar dari rumah. Lebih lanjut, 87% hasil survei tersebut menginginkan cepat kembali

belajar di sekolah (tatap muka). Adapun tantangan yang dihadapi saat belajar dari rumah menurut survei tersebut menunjukkan 38% kurang mendapatkan bimbingan dari guru. Kemudian, akses internet tidak lancar sebanyak 35%. Hasil survei tersebut dapat dilihat di bawah ini:

**Gambar 1. Survei UNICEF Terkait Belajar Dari Rumah Masa Pandemi**



Sumber: (Unicef, 2020b)

Untuk menghasilkan pembelajaran daring yang efektif, ada beberapa hal yang diperhatikan. Hasil kajian yang dilakukan oleh (Damayanti, 2020) menemukan beberapa faktor mempertimbangkan pemilihan media *e-learning*, yaitu:

- a) **Pertama, Aksesibilitas.** Faktor ini menjadi penentu apakah penggunaan akan menggunakan suatu media atau tidak. Kemudahan akses menjadi salah satu indikator peningkatan minat untuk

memilih media yang digunakan dalam pembelajaran daring. Hasil survei menunjukkan faktor ini dipilih sebanyak 83,3%.

- b) **Kedua, Perangkat media yang didukung.** Pemilihan terhadap perangkat media yang dapat mendukung (kompatibel) kemudahan dalam pengunggahan media pembelajaran perlu diperhatikan oleh penyelenggara pendidikan selama pandemi covid-19. Sebanyak 66,7% responden menyatakan bahwa setuju bahwa media penunjang penting dalam pemilihan *platform e-learning*.
- c) **Ketiga, Fitur Komunikasi Yang Disediakan.** Faktor ini dipilih dikarenakan kesediaan fitur komunikasi dalam pembelajaran daring. Pemilihan fitur komunikasi ini dipilih sebanyak 66,7% responden.
- d) **Keempat, Proses dan jenis penilaian.** Sebanyak 50% responden mempertimbangkan jenis penilaian yang tersedia dalam *platform e-learning*.
- e) **Kelima, Desain.** Faktor ini menjadi alasan bagi penyelenggara pendidikan dalam memilih suatu media pembelajaran daring. Hal ini dibuktikan dari hasil pemilihan responden sebanyak 50% memilih desain dalam pelaksanaan pembelajaran daring.
- f) **Keenam, Harga.** Beberapa aplikasi *e-learning* mengharuskan penggunaannya untuk membayar biaya langganan untuk menikmati fitur tambahan yang disediakan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka banyak responden memilih media *e-learning* yang tidak berbayar, seperti *Google Classroom*, *Edmodo*, *Zoom*, *Whatsapp* dan *Youtube*

## B. Tantangan Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19

Transformasi digital bukanlah sebuah fenomena baru, dan kini telah menyertai dalam dunia pendidikan tinggi selama beberapa tahun belakangan ini (Kopp, 2019). Transformasi digital di perguruan tinggi merupakan isu yang perlu diketahui oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Hal

ini dikarenakan perguruan tinggi merupakan institusi yang mempersiapkan dan sekaligus mencetak para generasi profesional untuk menghadapi tantangan global, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada suatu negara. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebenarnya menjadi “*role model*” dalam upaya perubahan transformasi digital. Untuk mencapai optimalisasi penerapan pembelajaran daring di institusi perguruan tinggi, (Cameron & Green, 2019) menyarankan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: persiapan strategis, pembentukan kepercayaan, pemikiran dalam proses, penggabungan dan penguatan semua pihak yang terlibat, berkolaborasi dan pengetahuan organisasi. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam upaya perubahan kebiasaan pembelajaran yang konvensional ke digitalisasi.

Pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi telah menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

### 1. Tantangan Teknologi

Pembelajaran daring secara keseluruhan sangat bergantung pada perangkat teknologi dan internet. Koneksi internet yang buruk cenderung ditolak saat ingin mengakses pembelajaran daring. Ketergantungan teknologi dan koneksi internet merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh siswa pada pembelajaran daring selama pandemi covid-19. Penelitian (Padmo et al., 2020) menemukan 83,21% responden mengaku kesulitan dalam mengakses internet.

Daya saing digital Indonesia belum menunjukkan hasil yang baik bila dibandingkan dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil laporan *IMD World Digital Competitive Ranking 2020* menempatkan Indonesia pada posisi 56 dari 63, atau berada pada posisi delapan peringkat terbawah jumlah negara yang dilakukan penilaian. Posisi Indonesia masih jauh tertinggal bila di bandingkan dengan Thailand pada posisi (39) Malaysia (26), Taiwan (11), dan Singapore (2).



Berikut perbandingan posisi Indonesia dalam daya saing digital dunia:

**Tabel 1. Posisi Indonesia Pada IMD World Digital Competitive Ranking 2020**

Country	Rank	
	2020	2019
Singapore	2	2
Taiwan	11	13
Malaysia	26	26
Thailand	39	40
Indonesia	56	56
Philippines	57	55

Sumber: <https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/> (diakses, 30 September 2021).

Meski tidak dapat disamakan posisi Indonesia dengan negara tetangga, yang memiliki perbedaan misalnya luas wilayah, ekonomi, dan aspek lainnya, setidaknya kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan indeks digitalisasi untuk lebih baik lagi. Bila dicermati dari data di atas, posisi Indonesia tidak mengalami peningkatan, masih berada pada posisi tahun sebelumnya. Teknologi digital menjadi unsur penting dalam upaya keberhasilan pembelajaran daring selama covid-19. Hal ini dikarenakan keberhasilan pembelajaran daring sangat tergantung pada kesediaan teknologi digital yang mampu menjangkau ke seluruh daerah di Indonesia.

## 2. Tantangan Sosial Ekonomi

Perkembangan kasus positif di Indonesia telah mencapai 4.219.284 orang, dan kasus meninggal sebanyak 142.173 orang (Kemenkes, 3 Oktober 2021). Berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 telah dilakukan, mulai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan ini berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan sosial masyarakat semakin turun.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh lembaga *Smeru Research Institute* terhadap

sampel yang tersebar di 34 provinsi yang dilakukan pada bulan Oktober dan November 2020 menghasilkan temuan bahwa keuangan rumah tangga mengalami dampak parah dari pandemi Covid-19 (Smeru, 2021). Sekitar tiga perempat rumah tangga atau 74,3% mengalami penurunan pendapatan dari yang mereka terima pada bulan Januari 2020. Selain penurunan pendapatan, peningkatan pengeluaran biaya bulanan rumah tangga. Hal ini dikarenakan naiknya biaya belanja bahan makanan dan keperluan pokok lainnya. Temuan menarik lainnya adalah terjadinya peningkatan secara signifikan bagi rumah tangga dengan memiliki anak terhadap biaya internet sebanyak 65% bila dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki anak 28,9%. Ini membuktikan bahwa pembelajaran daring membutuhkan biaya lebih banyak untuk pembelian paket internet dengan kondisi ekonomi rumah tangga yang melemah dampak dari pandemi Covid-19.

Senada dengan hal tersebut peralihan dari pembelajaran tatap muka ke daring ada mahasiswa yang mengandalkan layanan komputer dan internet gratis di kampus. Kini proses pembelajaran membutuhkan komputer dan internet sendiri. Himpitan ekonomi membuat para orang tua melakukan perbuatan salah mencuri laptop demi anaknya kuliah daring, seperti kasus seperti ini terjadi di Lampung (RadarLampung, 2020). Hal ini menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran daring, karena status sosial ekonomi masyarakat tidaklah sama. Apalagi setelah pandemi covid-19 melanda dunia angka pengangguran semakin tinggi.

## 3. Tantangan Kompetensi Digital

Kompetensi digital dapat diartikan sebagai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan saat menggunakan perangkat digital. Di era saat ini, kompetensi digital harus dimiliki pada semua strata pendidikan. Mahasiswa dan dosen dengan kompetensi digital rendah cenderung tertinggal dalam pembelajaran daring (Adedoyin & Soykan,

2020). Kompetensi digital menjadi mutlak yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan dosen. Karena segala aktivitas pembelajaran dilaksanakan berbasis digitalisasi. Saat ini banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring, misalnya *zoom*, *google classroom*, *microsoft team*, *whatsapp group*, *google meet*, serta jenis aplikasi lainnya. Kesemua aplikasi ini telah memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi covid-19.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 2020) terkait pemilihan platform media pembelajaran daring selama pandemi covid-19 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memilih media Whatsapp 46,1% sebagai media dalam pembelajaran daring selama pandemi. Kemudian aplikasi *line* 13,8 %, *Google Clasroom*, 6,1 %, dan sisanya menggunakan aplikasi lain sebesar 34%. Tantangan lainnya juga berasal dari faktor usia dosen ikut berpengaruh terhadap kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi pembelajaran daring (Dikti, 2020). Dengan demikian kita berharap kompetensi digital bagi penyelenggara pendidikan, baik itu dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan untuk terciptanya pembelajaran daring yang berkualitas.

### C. Kolaborasi Dalam Pembelajaran Daring

Pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi covid-19 di Indonesia belum berjalan dengan baik. Berbagai tantangan dialami perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan di dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah, swasta, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya perlu bersinergi dalam membangun pembelajaran daring untuk lebih baik ke depan. Permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran daring merupakan masalah yang kompleks, sehingga diperlukan sebuah upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Konsep kolaborasi sebenarnya telah banyak dipraktikkan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Studi *Collaborative governance* tidak hanya dalam kajian kebijakan (Scott & Thomas, 2016), namun juga digunakan dalam pemecahan masalah bencana, kesehatan masyarakat, dan lingkungan (Astuti & Asmarasari, 2020; Fauzi et al., 2019; Rachim et al., 2020). Artikel ini menawarkan *collaborative governance* sebagai strategi dalam optimalisasi dalam pendidikan, khususnya pada pembelajaran daring.

*Collaborative governance* menyatukan banyak pemangku kepentingan dengan lembaga pemerintah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada pemecahan masalah secara bersama. Sebagaimana definisi *collaborative governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) berupa serangkaian tata kelola lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintahan dalam sebuah proses pengambilan kebijakan yang berorientasi pada konsensus, dan deliberatif dengan tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan, mengelola program, maupun aset pemerintah. Dari makna ini dapat dipahami bahwa telah terjadi perubahan cara pandang penyelenggaraan pemerintahan, tidak hanya melihat negara dalam hal ini pemerintah sebagai aktor tunggal dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, melainkan pada pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan di luar pemerintah.

Studi pemangku kepentingan telah banyak diminati dalam kajian administrasi publik. Perkembangan pemangku kepentingan mulai dari *triple helix* (pemerintah, akademisi, dan swasta) berkembang menjadi *quadra helix* (pemerintah, akademisi, swasta, dan NGO). Kemudian mengalami perkembangan menjadi *Penta Helix* adanya penambahan aktor dari sebelumnya, yaitu media massa (Astuti et al., 2020). Saat ini studi *stakeholders* terus mengalami perkembangan, misalnya kajian yang dilakukan oleh (Rachim et al., 2020) menemukan *Hexa Helix* (pemerintah,

akademisi, swasta, NGO, media massa, dan masyarakat terdampak) dalam kajian penanganan bencana alam di danau tempe Sulawesi Selatan.

Mencermati permasalahan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 dan dalam kaitannya dengan kolaborasi, serta pemangku kepentingan, dapat dipetakan melalui model *penta helix*. Model ini sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan multi pihak, dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingannya (Lindmark et al., 2009). Adapun kolaborasi pemangku kepentingan dalam pembelajaran daring, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembelajaran Daring**



Sumber: Diadaptasi dari pemangku kepentingan *penta helix*

Berdasarkan gambar di atas terdapat lima pemangku kepentingan yang dapat bersinergi dalam pembelajaran secara daring pada masa pandemi covid-19. Kolaborasi pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring yang didukung oleh beragam sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* dan saling berinteraksi secara bersinergi. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki perannya Pemerintah dalam hal ini birokrasi merupakan kelompok yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring. Kelompok ini terdiri dari Kementerian Pendidikan sebagai *leading sector* pada tingkat pusat dalam pembelajaran daring di Indonesia. Sementara pada tingkatan daerah berupa Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kabupaten /Kota, serta lembaga pemerintah lainnya

baik pusat maupun daerah yang mempunyai kaitan dalam pembelajaran daring. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan masalah yang dihadapi .

Peran dari pemerintah dalam pembelajaran daring berupa: Pertama, menyelaras program pendidikan dengan perkembangan covid yang terjadi dalam negeri baik pada level pusat maupun daerah. Kedua, menyiapkan data dan informasi yang akurat dan terbaru yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan. Ketiga, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan advokasi kepada masyarakat luas terhadap adaptasi pendidikan daring selama pandemi covid-19. Keempat, melaksanakan *monitoring* dan evaluasi, serta pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring, baik kendala maupun tantangan yang dihadapi selama diberlakukan pembelajaran daring. Kelima, pemerintah menyiapkan pendanaan untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Umumnya pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah terbatas, tidak terjangkau ke segala lini, dan hal ini sering ditemui sebagai keterbatasan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, maupun pelayanan publik.

Swasta juga memainkan peran penting dalam pembelajaran daring berupa memfasilitasi program/kegiatan. Program ini dapat berupa kerja sama dalam hal infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring. Dapat juga berupa kerja sama penyediaan paket internet dengan diskon besar, penyediaan pembelajaran daring, serta hal lainnya. Selain itu, peran swasta dapat juga berupa dukungan pendanaan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh (Ansary & Behera, 2018) bahwa keterlibatan swasta dalam sektor pendidikan dapat menciptakan model inovasi untuk sistem pendidikan, dan infrastruktur sekolah di India.

Organisasi Non Pemerintah berupa organisasi yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa maksud

dan tujuan untuk memperoleh keuntungan baginya. Dalam sektor pendidikan umumnya kita temui lembaga internasional seperti Unicef, Unesco, serta lembaga non pemerintah nasional lainnya yang *concern* dibidang pendidikan. Perandari pemangku kepentingan ini dapat berupa memfasilitasi program atau kegiatan di lapangan, melakukan advokasi kepada mahasiswa, membangun pemahaman kepada publik, dan melakukan *monitoring* pelaksanaan pembelajaran daring.

Perguruan tinggi mempunyai kapasitas sumber daya manusia yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Para akademisi memiliki banyak pengetahuan, dan pengalaman yang dibangun dari kegiatan tri-darma perguruan tinggi yang dapat di *sharing* untuk penguatan pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi covid-19. Perannya dapat berupa peningkatan kapasitas para dosen, pemantauan dan evaluasi, melakukan penelitian kebijakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan, dan melakukan *monitoring* pelaksanaan pembelajaran daring.

Pemangku kepentingan terakhir dalam pembelajaran daring adalah media. Kehadiran media massa untuk memberikan informasi yang luas pada masyarakat melalui media yang mereka miliki. Peran dari media massa dalam pembelajaran daring berupa kegiatan diseminasi dan advokasi kepada masyarakat, membangun pemahaman publik melalui *sharing* informasi kepada masyarakat terhadap pemahaman pembelajaran daring, sehingga masyarakat umum dengan sendirinya mendapatkan informasi melalui informasi yang dibaca dari media. Terakhir perannya dapat juga *monitoring* pelaksanaan pembelajaran yang dikemas dalam pemberitaan pada media massa. Dengan demikian dapat membantu pemerintah dalam menyerap berbagai informasi terkait hambatan-hambatan pelaksanaan pembelajaran daring dari berbagai daerah. Ringkasnya untuk peran masing-masing dari aktor tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembelajaran Daring**

Aktor	Peran
Pemerintah	Penyelaras program pendidikan dengan perkembangan covid Penyiapan data dan informasi yang digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan Sosialisasi, komunikasi dan advokasi Monev dan Pelaporan Pendanaan
Swasta	Fasilitasi program/ kegiatan Dukungan pendanaan
NGO	Advokasi kepada mahasiswa Fasilitasi program atau kegiatan di lapangan Membangun pemahaman publik
Perguruan Tinggi	Monitoring pelaksanaan  Peningkatan kapasitas para dosen Pemantauan dan evaluasi Policy research sebagai bahan rekomendasi kebijakan Monitoring pelaksanaan
Media Massa	Diseminasi & advokasi kepada masyarakat Membangun pemahaman publik Monitoring pelaksanaan

#### IV. PENUTUP

Fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi pada perkembangan teknologi digital menjadi faktor utama keberhasilan pembelajaran daring. Namun fakta di lapangan ditemu banyak tantangan dan kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring berlangsung, mulai koneksi internet, jaringan listrik, adaptasi teknologi digital, hingga pada keterbatasan ekonomi. Kendala ini dapat diselesaikan dengan bersama, dengan melibatkan para pemangku kepentingan didalamnya. Adapun kolaborasi pemangku kepentingan dalam pembelajaran daring terdiri dari pemerintah, swasta, NGO, perguruan tinggi, dan media massa. Para

pemangku kepentingan yang diidentifikasi memiliki perannya masing-masing dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Kendala dan keterbatasan yang dialami selama pembelajaran daring dapat diatasi dengan menguatkan kolaborasi melalui terlibat langsung para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan bersama. Selain itu, membangun komunikasi yang intens dan efektif antar pemangku kepentingan dengan menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif terhadap pemecahan masalah pembelajaran *online*. Sehingga, permasalahan yang ditemui di lapangan selama pembelajaran *online* dapat diatasi dengan baik

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Covid-19 Pandemic and Online Learning: The Challenges and Opportunities. *Interactive Learning Environments*, 0(0), 1–13. <https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180>
- Andriani, D. (2003). Sistem Pendidikan Jarak Jauh untuk Pendidikan Tinggi yang Berkualitas. In *Cakrawala Pendidikan; E-Learning Dalam Pendidikan*. Universitas Terbuka.
- Ansary, M., & Behera, S. K. (2018). Role of Public Private Partnership in Education Sector in India. *IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL)*, 6(8). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15418.85446>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R. S., & Asmarasari, B. (2020). Collaborative Governance in Policy Advocacy of Exclusive Breastfeeding Practice in Semarang City. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 389(Icstcsd 2019), 188–192.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro Press.
- Cameron, E., & Green, M. (2019). *Making Sense of Change Management: A Complete Guide to the Models, Tools and Techniques of Organizational Change*. Kogan Page Publishers.
- Damayanti, L. S. (2020). Implementasi E-Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di Pendidikan Tinggi Pariwisata di Bali Selama Pande Covid-19. *Journey*, 2, 63–82.
- Dikti. (2020). *Buku Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19*. Diirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Fauzi, A. R., Yayuk, A., & Rahayu, S. (2019). Pencegahan HIV / AIDS melalui Collaborative Governance antara Pemerintah , Lembaga Swadaya Masyarakat , dan Masyarakat HIV / AIDS Prevention Through Collaborative Governance Among Government , Non Government Organizstion , And Society in DKI Jakarta Pr. *Jurnal Inspirasi*, 10(April), 14–31.
- Fry, K. (2001). E-learning Markets and Providers: Some Issues and Prospects. *Education + Training*, 43, 233–239.
- Hakim, L. (2020). Pemilihan Platform Media Pembelajaran Online Pada Masa New Normal. *JUSTEK: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 3(2), 27–36.
- Kopp, M. (2019). Five Common Assumption That Prevent Digital Transformation at Higher Education Institutions. *INTED2019 Proceedings, March*, 1448–1457.
- Lindmark, A., Nilsson-Roos, M., & Stureson, E. (2009). *Difficulties of Collaboration for*

- Innovation - A Study in the Öresund Region*. Au. Lund University School of Economic and Management.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). Covid-19: Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Padmo, D., Ardiasih, L. S., & Idrus, O. (2020). Online Learning During the Covid-19 Pandemic and Its Effect on Future Education in Indonesia. *The Impact Of COVID19 on The International Education System*, November, 71–86. <https://doi.org/10.51432/978-1-8381524-0-6>
- Rachim, A., Warella, P. Y., Astuti, R. S., & Suharyanto, S. (2020). Hexa Helix: Stakeholder Model in the Management of Floodplain of Lake Tempe. *Prizen Social Science Journal*, 4(1), 20–27.
- RadarLampung. (2020). *Sedih! Bapak Curi Laptop Demi Anak Belajar Daring*. <https://radarlampung.co.id/sedih-bapak-curi-laptop-demi-anak-belajar-daring/>
- Scott, T. A., & Thomas, C. W. (2016). Unpacking the Collaborative Toolbox : Why and When Do Public Managers Choose Collaborative Governance Strategies ? *The Policy Studies Journal*, 00(00), 1–24.
- Serambinews. (2020). *Demi Kuliah Online, Mahasiswa di Simeulue Harus Panjat Pohon untuk Dapat Sinyal*. 1 Oktober 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/01/demi-kuliah-online-mahasiswa-di-simeulue-harus-panjat-pohon-untuk-dapat-sinyal>
- Shangguan, Z., Wang, M. Y., & Sun, W. (2020). What Caused the Outbreak of COVID-19 in China : From the Perspective of Crisis Management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 1–16. <https://doi.org/10.3390/ijerph17093279>
- Smeru. (2021). *Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 Terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia*.
- Suryatmojo, H., Kusumawardani, S. S., Aluicius, I. E., & Widyatmanti, W. (2020). Disrupsi dan Resiliensi Pendidikan Tinggi dalam Menangani Dampak Covid-19. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal* (pp. 125–142). Gadjah Mada University Press.
- Taufik, & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19. *DIALOGUE: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2, 1–18.
- Unicef. (2020a). *COVID-19: Laporan baru UNICEF mengungkap setidaknya sepertiga anak sekolah di seluruh dunia tidak dapat mengakses pembelajaran jarak jauh selama sekolah ditutup*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/covid-19-laporan-baru-unicef-mengungkap-setidaknya-sepertiga-anak-sekolah-di-seluruh>
- Unicef. (2020b). *Indonesia: Survei Terbaru Menunjukkan Bagaimana Siswa Belajar Dari Rumah*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-survei-terbaru-menunjukkan-bagaimana-siswa-belajar-dari-rumah>

# Dinamika Pengelolaan Zakat Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Salma Munawwaroh, Nura Fajria

STAI Islamic Centre Demak Jawa Tengah, UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

Salmamuna96@gmail.com, nuraasyhar@fastikom-unsig.ac.id

## ABSTRACT

Indonesia as a country with the largest number of Muslims has tremendous potential in alleviating poverty, namely through zakat, but this potential has not been realized in achieving this goal. The Ministry of Religion as an institution that has the main task and function as zakat management should have best practice in zakat management. This study aims to identify the management of zakat in the Office of the Ministry of Religion of Demak Regency. The results of this study reveal that zakat in the Ministry of Religion of Demak Regency is not optimal for Amil or zakat managers because the management is not arranged ex-officio. Management still uses the old way, which is just distributing zakat without thinking about contemporary zakat management. The management of zakat at the Office of the Ministry of Religion of Demak Regency does not have supervision and transparency for muzakki. The researcher's recommendation is that ex-officio restructuring of amil is needed, and it is necessary to form a discussion group forum as an effort to equip amil's understanding of contemporary zakat management. And a monitoring system is needed for the management of zakat and the need for data transparency so that Muzakki's trust in Amil is created

Keywords: *Management, Zakat, Ministry of Religious Affairs*

## I. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dalam Islam mewajibkan zakat bagi pemeluknya. Zakat memiliki potensi yang besar namun kenyataannya dari penghimpunan dan dampak zakat bagi kesejahteraan umat Islam Indonesia masih sangat rendah. Dengan manajemen penerapan dalam pengelolaan zakat yang baik akan menghasilkan dampak pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat telah diatur sejak pembentukan BAZNAS pada masa Orde Baru tahun 1968 dibentuk dengan nama lembaga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Setelah memasuki reformasi pada tahun 1999 legitimasi OPZ semakin kuat dengan disahkannya legitimasi perundangan UU No 39 Tahun 1999 tentang Zakat. Beberapa keadaan mendasar terkait pengelolaan zakat di mana kelembagaan amil zakat lebih kuat dan profesional. Untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya, maka regulasi zakat UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna dan menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999.

Pengembangan regulasi zakat ini mempunyai tujuan mengimplementasikan ajaran zakat agar pengelolaannya secara amanah, adil, meningkatnya kepastian hukum. Manfaat dalam pendayagunaan zakat dapat dalam bentuk pemberdayaan, untuk menanggulangi kemiskinan serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Regulasi zakat ini mendorong pengelolaan zakat yang terintegrasi yang akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Kementerian Agama memiliki tugas dan fungsi pengelolaan zakat yang tertuang di PMA Nomor 19 Tahun 2019 dalam Pasal 550 huruf g. Penyelenggara atau Lembaga Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, dan juga penyusunan rencana serta pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

Ketua Umum Badan Amil Zaka Nasional Didin Hafidhudin menyatakan bahwa jumlah zakat yang telah terkumpul belum sebanding dengan potensi zakat yang bisa dikumpulkan dari umat muslim di Indonesia, dari sekitar 68

juta penduduk Indonesia mencapai 200 Trilyun, tapi zakat yang dapat dihimpun pada tahun ini baru terkumpul 1,3 trilyun. Di Kabupaten Demak pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk 1.079.861, jumlah penduduk miskin 198.800, yaitu 18,76%, dengan pemeluk beragama Islam sebesar 99,35 %. Kabupaten Demak telah mempunyai BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) pada tahun 2007, berdasarkan SK Bupati No. 451/744/2006. Dan Berdasarkan laporan keuangan Bazda Kabupaten Demak tanggal 30 september 2011, pemasukan zakat sejumlah 574.798.064 rupiah. Hal ini tentu masih sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim dan mempunyai potensi membayar zakat (Kusriyah, 2016).

Kabupaten Demak dengan jumlah penduduk 1.063.763 jiwa, 99,45 beragama Islam, fakirmiskin 198.800 jiwa, zakat merupakan sumber kekuatan dalam penanggulangan kemiskinan. Data yang didapatkan akan dianalisis dengan memperhatikan kualitas data yang berupa fakta terjadi dalam praktek lapangan maupun dari kepustakaan. Pengelolaan zakat di Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 451/20/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak, dan Keputusan Bupati Demak Nomor: 451/455/2011 tentang Himbuan Berzakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa penting melakukan penelitian Bagaimanakah pengelolaan zakat meliputi, perencanaan pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.

## II. METODOLOGI

Metode penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Demak sebagai fokus penelitian pelaksanaan zakat karena sifat daerah ini yang religius (Marwoto, 2016). Dilakukan wawancara pada pegawai pengelola zakat untuk mendapatkan informasi terkait perencanaan, pembagian sampai pada pertanggungjawaban. Observasi dilakukan dengan melihat bagaimana zakat diambil dan didistribusikan kepada yang berhak untuk menerima zakat.

## III. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan management diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan (Echols, 2005). Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (Kemendikbud, 2020).

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah: 'seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak dite ntukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari. Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2012).

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata zakā-yazku-zakā'an-wa zakwan yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-



Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Zakat juga digunakan untuk arti taharah (suci), barokah, dan shalah (baik) (Furqon, 2015).

UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu 'Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat'. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: 'Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat'. Terdapat perbedaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak sama sekali menyebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi adalah hal yang urgen dalam pengelolaan. Pakar manajemen seperti Stonner dan Daft, menyebutkan fungsi pengawasan dalam manajemen, hingga pada aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat.

Walaupun dalam UU No.23 tahun 2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan dalam definisi pengelolaan zakat, namun tetap mencantumkan perihal pengawasan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 34 disebutkan hal tentang pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan oleh Menteri atau pimpinan daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota sedangkan dalam pasal 35, menyebutkan pengawasan dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Menggabungkan antara dua pengertian pengelolaan zakat dari kedua undang-undang pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat adalah kegiatan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Manajemen Zakat (Jaelani, 2015)

## B. Pengelolaan Zakat

### 1. Perencanaan Zakat

Didalam manajemen zakat step awal proses yang perlu dilakukan yaitu perencanaan. Perencanaan berhubungan dengan pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang musti dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap guna pencapaiannya, dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilakukan oleh Badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisas (Jaelani, 2015).

Hasil wawancara dengan penyelenggara zakat wakaf (Garazawa) Kementerian Agama Kabupaten Demak yang mana memiliki tugas fungsi melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, juga penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat, menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kankemenag Kabupaten Demak. Ironisnya Gara Zawa dengan fungsi tersebut tidak termasuk ke dalam kepengurusan Unit Pengelola Zakat.

Dari hasil wawancara dalam perencanaan belum memiliki rencana kerja terstruktur bahkan tidak memiliki dokumen program kerja. namun berikut perencanaan yang dilakukan oleh UPZ Kankemenag Kabupaten

Demak yang selama ini dilaksanakan. Perencanaan zakat harusnya memiliki kaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut (Jaelani, 2015):

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran zakat. sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka (Ahmad Atabik, 2015) namely zakat imposed pda each job tau professional expertise, whether done alone or shared with the people or institutions, which bring in income (money. Muzakki di Kantor Kementerian Agama mutlak berasal dari Aparatur Sipil Negara di bawah binaan Kankemenag Kabupaten Demak sejumlah 1.275 ASN (Demak, 2018). Zakat ini berupa zakat profesi yang dipotong langsung dari gaji/ tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kankemenag Demak. Sedangkan zakat ditasharufkan kepada mustahiq dari daftar yang diajukan oleh para penyuluh agama Islam di setiap kecamatan se-Kabupaten Demak.
- b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak memiliki dua Lembaga yaitu Garazawa dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Secara structural UPZ bertanggungjawab kepada BAZNAS dan GARAZAWA bertanggungjawab pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Bentuk organisasi ini seharusnya bisa berjalan beriringan apabila pemangku kebijakan memahami aturan bahwa pengurus UPZ dapat bersifat ex-officio pada pimpinan masing-masing (BAZNAS, 2016). Artinya ketua UPZ seharusnya dijabat oleh Pejabat Penyelenggara Zakat akan tetapi pada prakteknya jabatan ketua

masih diduduki oleh mantan pejabat yang sudah rotasi dari Garazawa terkait tugas fungsi yang melekat pada jabatan tersebut. UPZ memiliki kepengurusan terdiri dari penasehat berjumlah 1 orang ketua, 7 orang anggota dan pengurus harian terdiri 1 orang anggota, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang wakil sekretaris, 1 orang bendahara dan 1 orang wakil bendahara. Kepengurusan yang tidak dilaksanakan secara ex-officio mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas karena rotasi yang biasa dilakukan instansi. Beberapa penasehat dan pengurus yang menduduki sector penting dipahami oleh ketua UPZ tidak bisa digantikan personelnnya sehingga pengelolaan dan pengawasan tidak maksimal.

- c. Menetapkan metode atau cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak atas penerimaan zakat. Saat ini UPZ mengelola dari satu sumber yaitu zakat profesi dan zakat fitrah ASN Kankemenag Kabupaten Demak. Saat awal dilaksanakan kebijakan zakat profesi di Kankemenag Kabupaten Demak terjadi keberatan, namun seiring berjalannya waktu kebijakan pemotongan zakat profesi bisa diterima semua pihak (Mualimah & Kuswanto, 2019). Kemenag Kabupaten Demak tidak melakukan inovasi ataupun penggalan sumber zakat di luar zakat yang dipotong oleh bendahara, jika ditelisik lebih dalam penggalan sumber zakat dapat dilakukan dengan menggali muzakki dari jumlah anggota keluarga ASN KanKemenag Kabupaten Demak, untuk memudahkan ASN namun dengan melalui persetujuan masing-masing ASN, hal ini memudahkan ASN membayarkan zakat untuk anggota keluarganya.
- d. Menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan dengan skala

prioritas menentukan waktu untuk mendistribusikan zakat. Sumber zakat yang dikelola diterima secara berkala setiap bulan dari hasil pemotongan pajak oleh para bendahara, sedangkan pendistribusian zakat secara berkala dilakukan pada kegiatan rutin seperti saat bulan Romadlon, dzul hijjah maupun incidental seperti bantuan zakat pada korban bencana.

- e. Menetapkan amil atau panitia pengelola zakat dengan menentukan orang yang yang mempunyai kompetensi mindset, memiliki komitmen, dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat. Anggota dan penasehat UPZ diangkat dari unsur pimpinan di Kankemenag Kabupaten Demak akan tetapi tidak *ex officio*, sehingga saat jabatan kedinasan telah dimutasi atau non aktif, tidak terjadi penggantian anggota;
- f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan. Berdasarkan wawancara tidak ada pengawasan di UPZ Kankemenag Kabupaten Demak. Muzakki tidak pernah mendapatka laporan penyaluran, bahkan peneliti selaku salah satu muzakki tidak diperkenankan mempelajari laporan penyaluran zakat yang telah disusun.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Dalam Pengelolaan zakat dibutuhkan pengelola yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen kuat sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/ Lembaga Amil Zakat.

### a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Yusuf Qardawi mempunyai pendapat bahwa petugas pelaksana zakat (amil) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dilaksanakan

merupakan kewajiban bagi umat islam dalam urusan yang sangat penting dalam Islam oleh karena itu urusan ini harus diurus oleh sesama muslim.

- 2) Mukallaf yaitu orang Islam telah dewasa yang sehat akal pikiranya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) Mempunyai sifat amanah yaitu jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- 4) Memahami dan mengerti hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melaksanakan sosialisasi dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- 5) Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kesungguhan Amil zakat untuk melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya, tidak sambilan apa lagi asal-asalan.

Pelaksana zakat di Kankemenag Kabupaten Demak tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan optimal. Karena tidak ditetapkan secara *ex officio* sehingga pengurus yang sudah dimutasi tidak melaksanakan tugasnya.

### b. Penggalian Sumber Zakat

Untuk penggalian sumber zakat, Amil tentunya harus mempunyai kepandaian dalam melaksanakan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik terhadap masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat semakin tumbuh kesadaranya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

- 1) Pembentukan unit satuan untuk pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk mepermudah bagi pengelola zakat dalam menjangkau muzakki serta memudahkan para muzakki

untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di beberapa tempat sesuai dengan tingkatannya. Atau pun bisa sesuai dengan daerah lokasinya.

- 2) Pembukaan unit kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat juga membuat konter atau loket zakat.
- 3) Pembukaan melalui rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tidak ada upaya lain untuk menggali sumber zakat di luar zakat profesi ASN yang dinaungi (Nafis, 2021)

### 3. Pengawasan Zakat

Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya Sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.

Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
- b. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- c. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:

- a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
- b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
- c. Jenis anggaran meliputi :
  - 1) Anggaran pendapatan dan pengeluaran
  - 2) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
  - 3) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain.
  - 4) Anggaran kas Badan atau LAZ
  - 5) Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat
- d. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:

- 1) Data statistik atau akuntansi
- 2) Grafik pulang pokok (breakeven)
- 3) Audit operasional
- 4) Observasi pribadi

Kemenag Kabupaten Demak menurut peneliti masih menggunakan cara-cara lama, yang seharusnya mereka berpikir tentang pentingnya mengelola zakat dalam sebuah manajemen yang rapi: Para pengelola zakat masih beranggapan bahwa pengelola zakat hanya merupakan kegiatan ritual, oleh karena itu, dilakukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban agama atas dasar keikhlasan saja.

#### IV. PENUTUP

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tidak berjalan secara terencana dan tidak terawasi. Pengelolaan zakat tidak dilakukan dengan transparan dan masih bersifat pengelolaan lama. Dalam hal ini diperlukan reorganisasi yang efektif melibatkan pihak sehingga terdapat sinergi antara Seksi penyelenggara Zakat Wakaf dengan Unit Pengelola Zakat. Dibutuhkan pembekalan kepada para Amil sistem pengelolaan yang kontemporer sehingga zakat bisa mencapai tujuannya sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Selain itu, dibutuhkan sistem pengawasan sehingga pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.

BAZNAS. *Peraturan BAZ NASIONAL No. 2 Thn 2016 Pembentukan dan Tata Kerja UPZ.pdf.* , (2016).

Demak, K. (2018). *Laporan Tahunan Kankemenag Kab. Demak Tahun 2018*. Demak.

Echols, J. M. dan H. S. (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: UIN Walisongo.

Handoko, T. H. (2012). *Manajemen dalam Berbagai Perspektif*. Semarang: Erlangga.

Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam [Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam]*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3747.1609>

Kemendikbud. (2020). KBBI Daring.

Kusriyah, S. (2016). Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 140. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.140-149>

Marwoto. (2016). Spiritual Phenomena in the Town of Demak. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227(November 2015), 451–457. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.100>

Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>

## SISTEMATIKA PENULISAN JURNAL ASKETIK

1. Naskah ditulis dengan menggunakan ukuran kertas A4, margin 4-4-3-3, Times New Romans (12 font size), Spasi 1,5 dan Panjang Naskah 4000-7000 kata.
2. Naskah ditulis dengan mengikuti sistematika berikut:
  - a. **Judul**
    - Lugas dan informatif
    - *Bold*
  - b. **Nama Penulis**
    - Ditulis dibawah judul
    - Nama lengkap tanpa gelar
    - Jika penulis lebih dari satu dihubungkan dengan koma
    - Institusi penulis
    - Alamat email yang masih aktif
  - c. **Abstrak**
    - Ditulis dengan bahasa Inggris jika naskah bahasa Indonesia, ditulis Indonesia jika naskah dalam bahasa asing
    - Panjang abstrak 250-300 kata, spasi 1
    - Mencantumkan setidaknya 3 sampai dengan 5 kata kunci
  - d. **PENDAHULUAN**
    - Latar belakang masalah
    - Tujuan dan manfaat penelitian
  - e. **METODOLOGI**

Metodologi penulisan menyajikan langkah-langkah atau prosedur yang benar yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang menguraikan secara cermat cara atau metode pengumpulan informasi dan atau data, analisis informasi dan atau data, penarik kesimpulan, serta merumuskan saran. Metode penulisan dapat mencakup: jenis penelitian, lokasi penelitian beserta alasannya, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, validitas data, dan analisis data.
  - f. **PEMBAHASAN**

Temuan dan hasil penelitian
  - g. **PENUTUP**
  - h. **Daftar Pustaka**
    - Contoh penulisan Daftar Pustaka: (Nama penulis dibalik, judul buku, kota terbit, tahun terbit. **Contoh:** Larner Daniel, 1983, *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
    - Naskah mencantumkan rujukan dengan menggunakan sistem catatan perut (adnote) dengan ketentuan sebagai berikut:

Sumber yang dirujuk pertama kali ditulis secara lengkap dengan mencantumkan: Nama Penulis, Tahun, Halaman (Nama Penerbit, Tahun Terbit), halaman (hlm).
    - Naskah mencantumkan daftar pustaka dengan pola penulisan yang sama seperti catatan kaki dengan menghilangkan keterangan halaman dan tanda kurung pada data publikasi. Daftar pustaka disusun menurut abjad mendahulukan nama belakang pengarang.